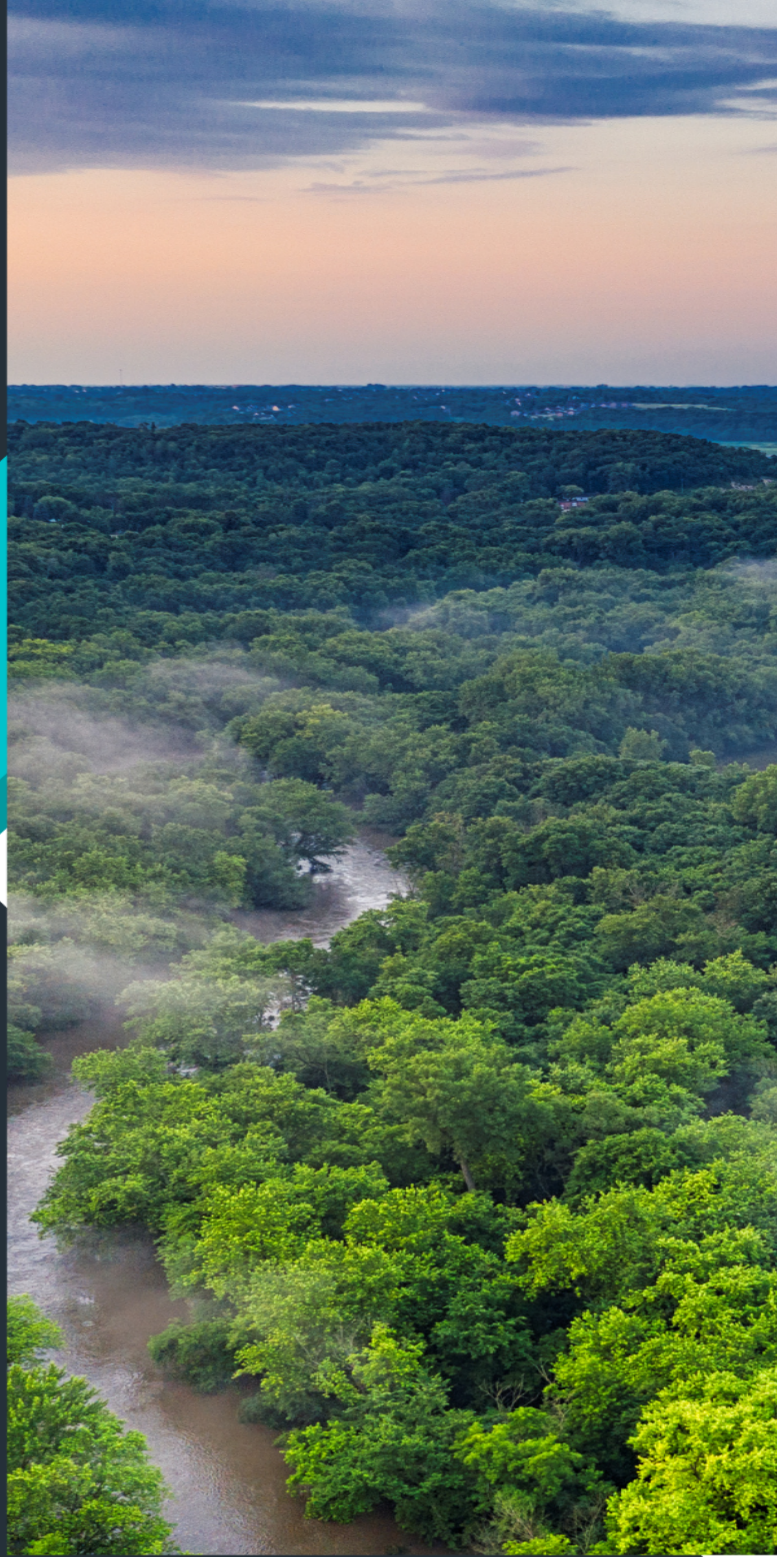




RENCANA KERJA 2023



**BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
WILAYAH XII**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR TABEL	
KATA PENGANTAR	
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	
C. Struktur Organisasi	
BAB II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN TAHUN 2022	
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022	
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	
BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2023	
A.Strategi dalam Mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional	
B.Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023	
C.Pembiayaan Tahun 2023.....	
BAB 4. PENUTUP	

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu disusun sebagai dokumen perencanaan untuk menjabarkan target-target kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja 2023 yang disepakati Kepala Balai dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

Secara operasional, dokumen Rencana Kerja disusun untuk memastikan pencapaian target indikator Rincian Ouput dengan menyertakan input intervensi anggaran, kerangka kebijakan dan sumber daya manusia, memanfaatkan potensi dan kesempatan internal dan eksternal serta memperhatikan arahan Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari.

Diharapkan melalui Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu tahun 2023 ini, para penanggung jawab dan pelaksana kegiatan memperoleh ikhtisar target kerja dan gambaran sumber daya yang tersedia untuk mencapai target tersebut.

Palu, Januari 2023
Kepala BPHL Wilayah XII Palu,

The image shows a circular official stamp of the Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu. The stamp contains the text 'KEPADA LAKSANA KEMENTERIAN RI KEMENTERIAN LINGKUNGAN, KEBUDAYAAN DAN KEMAHANEAN' around the perimeter. In the center, there is a stylized logo featuring a tree and a sun. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Elbakti, S.Hut.T., M.Sc
NIP. 19740504 199301 1 001

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional sesuai RPJMN tahun 2020-2024 sebagai tahapan terakhir dari Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2024 mempunyai sasaran : mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dan menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,3-5,9 persen, tingkat kemiskinan 7,5-8,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3-6,0 persen, rasio gini 0,375-0,378, Indeks Pembangunan Manusia 73,31-73,49 persen, penurunan emisi gas rumah kaca 27,02 persen, serta nilai tukar petani 103-105, dan nilai tukar nelayan 106-107.



Infografis 1. Arah Kebijakan Prioritas RKP Tahun 2023

Kebijakan pembangunan RKP tahun 2023 salah satunya memprioritaskan **Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem** yang antara lain dapat ditempuh dengan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan melalui program pengembangan tanaman agroforestry.

Prioritas pembangunan lainnya adalah **Mendorong Pemulihan Dunia Usaha**, hal ini sejalan dengan peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal fasilitasi sertifikat SLK UMKM atas produk hasil hutan yang berdaya saing tinggi dan mampu menembus pasar global.

Pengelolaan hutan lestari juga turut menjadi bagian dari **Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi**.

Keterkaitan partisipasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam arah kebijakan pembangunan RKP tahun 2023 sebagaimana di ikhtisarkan di awal, dijabarkan secara berjenjang ke eselon I menurun ke eselon II dan seterusnya hingga di level teknis melalui UPT Kementerian yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam sistem perencanaan program dan anggaran, metode ini dikenal sebagai metode *cascading* yakni suatu proses penyelarasan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kegiatan hingga ke level rincian output.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XII Palu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2022 ditetapkan menjadi Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XII Palu dengan lokasi kedudukan dan wilayah kerja tetap mencakup Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Sulawesi Utara.

BPHL ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari yang memiliki tugas melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, BPHL didukung dengan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung serta Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung.

Seksi Perencanaan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (P3HPHL) bertugas untuk :

1. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan;
2. kerja sama dan kemitraan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
3. penugasan dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan.

Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (PEPHPHL) bertugas untuk :

1. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang usaha pemanfaatan hutan, iuran dan penatausahaan hasil hutan;
2. Pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
3. Pemantauan dan penilaian kinerja tenaga teknis bidang pengelolaan hutan.

Pelaksanaan tugas Seksi di atas juga didukung dengan dukungan manajemen operasional perkantoran yang diemban oleh Sub Bagian Tata Usaha yang bertugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; Urusan administrasi kepegawaian, Keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; dan pengelolaan data dan informasi.

Selain itu, BPHL juga didukung oleh kelompok jabatan fungsional yang bertugas untuk memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPHL sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur oleh ketentuan dan perundang-undangan.

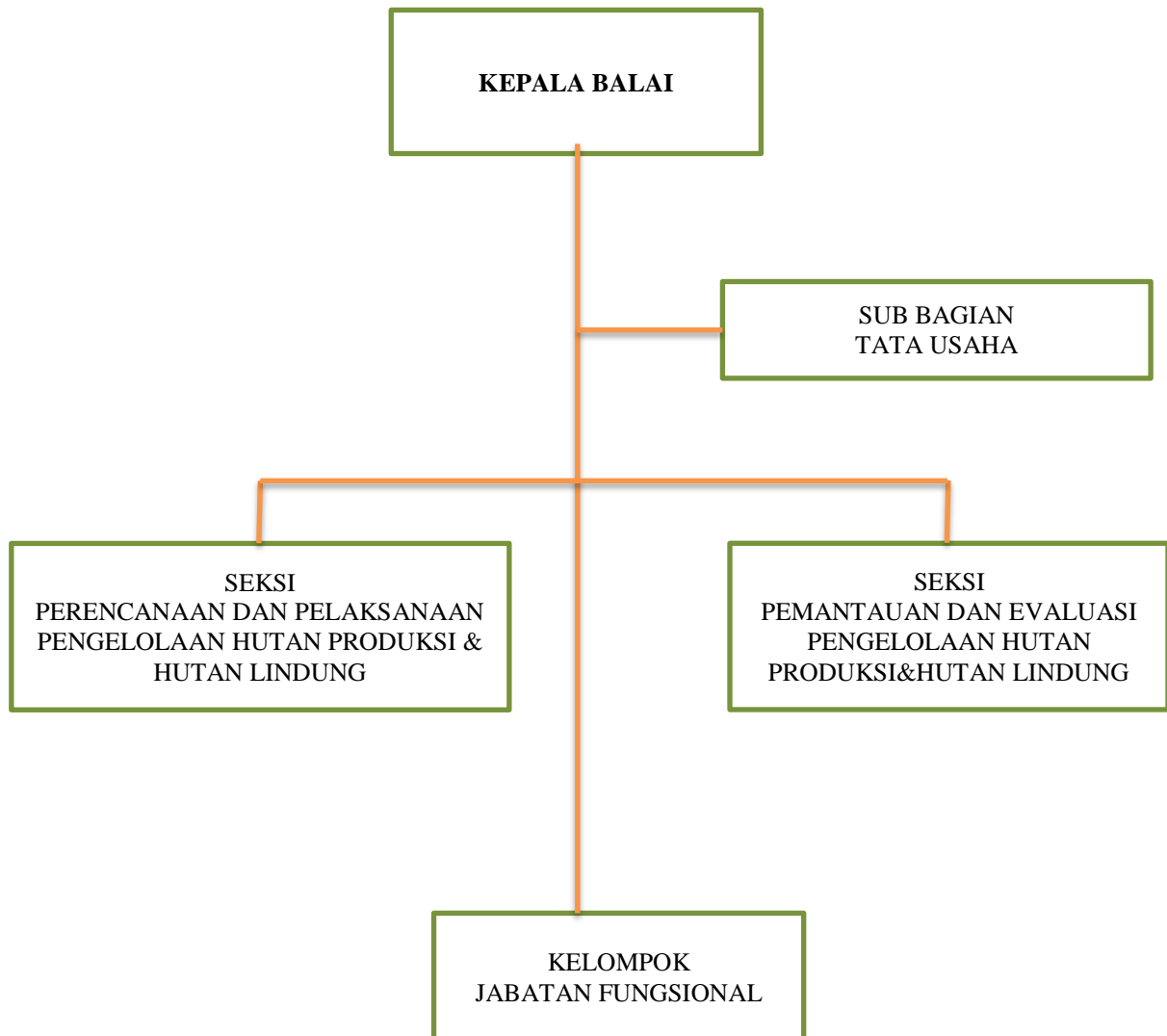


Infografis 2 berikut menggambarkan fungsi yang dijalankan BPHL Wilayah XII Palu dalam mencapai kinerja yang menjadi tujuan didirikannya Balai Pengelolaan Hutan Lestari.

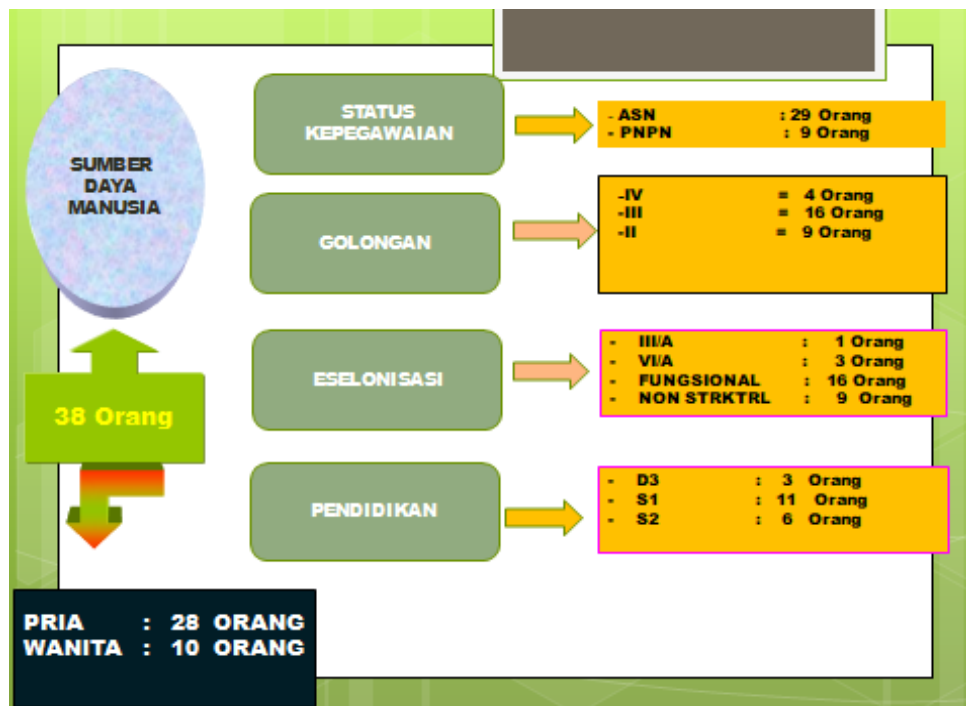
Infografis 2. Fungsi Organisasi BPHL berdasarkan PermenLHK Nomor 16 tahun 2022

C. Struktur Organisasi dan SDM

Adapun struktur Organisasi Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XII Palu adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi BPHL sesuai Permen LHK Nomor 16 Tahun 2022



Infografis 3.

SDM pada

BPHL Wilayah XII

Infografis di atas menggambarkan SDM yang dimiliki BPHL Wilayah XII Palu. Didukung oleh 29 orang ASN dan 10 orang tenaga PNP yang terdiri atas 10 orang perempuan dan 28 orang laki-laki. Jumlah personil ini terbilang kurang, mengingat wilayah kerja BPHL Wilayah XII cukup luas mencakup 3 (tiga) provinsi yakni Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Utara. Kekurangan sumber daya manusia ini seringkali menyebabkan penundaan pelaksanaan kegiatan menunggu ketersediaan tenaga. Menyikapi hal tersebut, Pimpinan berupaya mengisi kekurangan pegawai dengan memetakan analisis beban kerja untuk menentukan kebutuhan riil pegawai.

II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN TAHUN 2022

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021 dan Tahun 2022

Terjadinya perubahan struktur organisasi dan diterapkannya kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), menyebabkan perubahan pengukuran capaian kinerja BPHL. Pada tahun 2021 capaian kinerja BPHL diukur dari target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sementara pada tahun 2022 capaian kinerja BPHL diukur dari realisasi atas target Rincian Output. Rincian output dapat dikatakan sebagai “produk turunan” akhir dari kinerja program Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari.

Indikator Kinerja Kegiatan BPHP Wilayah XII tahun 2021 yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021, adalah sebagaimana diikhtisarkan dalam infografis di bawah ini :

Infografis 4. Indikator Kinerja Kegiatan BPHP Wilayah XII Palu Tahun 2021



Selain Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2021, BPHL Wilayah XII juga memfasilitasi terselenggaranya Proyek Forest Investment Program II (FIP II) yang didonasi oleh *World Bank*. Proyek FIP II mengusung judul *Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project*.

Capaian kinerja BPHP Wilayah XII Tahun 2021 atas IKK disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1. Pencapaian Kinerja BPHP Wilayah XII Tahun 2021

IKK		Target	Realisasi
Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi			
	Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin	337,500 juta Ha	941,230 Juta Ha
	Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi	11,000 Juta m3	11,370.93 Juta m3
	Tenaga kerja profesional bidang pemanfaatan hutan	7 orang	4 orang
	Produksi komoditas HHBK meningkat	3,868 ton	4,099.02 ton
	Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu	34,896 juta m3	32,738.11 juta m3

Kebijakan RSPP Balai mendorong perumusan Rencana Kerja yang menyentuh hingga ke level output yang berkualitas (*eye catching* dan spesifik). Balai tidak lagi memiliki IKK tetapi mendukung pencapaian target IKK unit kerja eselon II melalui pelaksanaan Rincian Output. Rincian Output BPHL Wilayah XII Tahun 2022 adalah juga sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Target Rincian Output BPHL Wilayah XII Palu Tahun 2022 sebagaimana dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja BPHL Wilayah XII Tahun 2022, ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

NO	RINCIAN OUTPUT	TARGET
(1)	(2)	(3)
Program Dukungan Manajemen		
1	Layanan Umum	1 Layanan
2	Layanan Perkantoran	1 Layanan
3	Layanan Sarana Internal	1 Unit
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		
4	HLN Forest Investment Program (FIP) II : Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	1 Kegiatan
5	Perencanaan Pengelolaan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	1 Lembaga
6	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	1 Lembaga
7	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	3 Badan Usaha
8	Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	1 Badan Usaha
9	Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	2 Badan Usaha
10	Fasilitasi dan Pembinaan Tertib Iuran dan Penatausahaan hasil Hutan	5 Badan Usaha
11	Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan	6 Badan Usaha
12	Fasilitasi dan Pembinaan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Kecil dan Menengah	10 Badan Usaha
13	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan	4 UMKM
14	Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya	7 Badan Usaha

Tabel 2. Target Rincian Output BPHL Wilayah XII Tahun 2022

Adanya indikator pengukuran yang berbeda antara target kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, mengakibatkan komparasi tidak dapat sepenuhnya mewakili pengambilan kesimpulan. Selain itu, perubahan struktur organisasi yang berpengaruh pada restrukturisasi tusi Direktorat Jenderal PHL, Direktorat pada unit kerja eselon II hingga ke level Balai turut mengubah nomenklatur beberapa RO. Detil Rincian Output tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Rincian Output	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022
Layanan umum	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
Layanan Sarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
HLN Program FIP II : Promoting Sustainable Commonity Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
Perencanaan Pengelolaan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	7 Lembaga	9 Lembaga	1 Lembaga	3 Lembaga
Fasilitasi dan Pembinaan KPH menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari	RO tidak ada di tahun 2021		1 Lembaga	3 Lembaga
Kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang diawasi dan dikendalikan	1 Lembaga	8 Lembaga	3 badan usaha	3 badan usaha
Fasilitasi pengembangan multiusaha bagi perizinan berusaha pemanfaatan hutan	RO tidak ada di tahun 2021		1 Badan Usaha	2 Badan Usaha
Kinerja multi usaha pemanfaatan hutan yang diawasi dan dikendalikan	RO tidak ada di tahun 2021		2 badan usaha	9 badan usaha
Fasilitasi dan pembinaan tertib iuran dan penatausahaan hasil hutan	1 Lembaga	1 Lembaga	5 Badan Usaha	11 Badan Usaha
Iuran dan penatausahaan hasil hutan yang diawasi dan dikendalikan	2 Lembaga	16 Lembaga	6 badan usaha	8 badan usaha
Fasilitasi dan pembinaan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan skala usaha kecil menengah	RO tidak ada di tahun 2021		10 badan usaha	14 badan usaha
Fasilitasi dan pembinaan UMKM Kehutanan	RO tidak ada di tahun 2021		4 UMKM	4 UMKM
Perizinan pengolahan hasil hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya	10 Lembaga	36 Lembaga	7 Badan usaha	7 Badan usaha

Tabel 3. Perbandingan Target dan Realisasi Rincian Output BPHL Wilayah XII Tahun 2021 dan Tahun 2022

B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2022

Tahun 2021 BPHL Wilayah XII Palu mencatatkan realisasi anggaran 99,23%. Tahun 2021 Balai harus melakukan revisi anggaran dan bentuk penyelenggaraan kegiatan yang terhambat pelaksanaannya akibat pembatasan sosial berskala besar akibat penyebaran COVID-19. Realisasi anggaran per kegiatan Tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2021 berdasarkan OMSPAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XIV PALU

REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN												
NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	5396 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	PAGU REALISASI	3,255,300,000 3,179,092,428 (97.66%)	1,330,000,000 1,316,832,971 (99.01%)	182,153,000 181,338,100 (99.55%)	0	0	0	0	0	0	4,767,453,000 4,677,263,499 (98.11%)
		SISA	76,207,572	13,167,029	814,900	0	0	0	0	0	0	0
2	5397 Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	PAGU REALISASI	0 7,599,026,000 (99.86%)	0 7,588,207,681 (99.86%)	0	0	0	0	0	0	0	7,599,026,000 7,588,207,681 (99.86%)
		SISA	0	10,818,319	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5398 Peningkatan Usaha Hutan Produksi	PAGU REALISASI	0 523,118,000 518,729,785 (99.16%)	0 523,118,000 518,729,785 (99.16%)	0	0	0	0	0	0	0	523,118,000 518,729,785 (99.16%)
		SISA	0	4,388,215	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5399 Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	PAGU REALISASI	0 362,313,000 359,139,950 (99.12%)	0 362,313,000 359,139,950 (99.12%)	0	0	0	0	0	0	0	362,313,000 359,139,950 (99.12%)
		SISA	0	3,173,050	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5400 Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	PAGU REALISASI	0 503,828,000 503,166,175 (99.87%)	0 503,828,000 503,166,175 (99.87%)	0	0	0	0	0	0	0	503,828,000 503,166,175 (99.87%)
		SISA	0	661,825	0	0	0	0	0	0	0	0
6	5401 Peningkatan Usaha Industri Kehutanan	PAGU REALISASI	0 400,000,000 399,931,170 (99.98%)	0 400,000,000 399,931,170 (99.98%)	0	0	0	0	0	0	0	400,000,000 399,931,170 (99.98%)
		SISA	0	68,830	0	0	0	0	0	0	0	0
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	3,255,300,000 3,179,092,428 (97.66%)	10,718,285,000 10,686,007,732 (99.70%)	182,153,000 181,338,100 (99.55%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	14,155,738,000 14,046,438,260 (99.23%)
		SISA	76,207,572	32,277,268	814,900	0	0	0	0	0	0	0

Tahun 2022 Satker BPHL Wilayah XII, mengalami 3 kali revisi besaran pagu. 1 kali Revisi penambahan pagu karena adanya Top Up dana HLN program FIP II dan 2 kali revisi pengurangan pagu untuk menghapus/realokasi pagu anggaran yang terblokir.

Tabel 5. Monitoring Revisi Realokasi Anggaran BPHL Wilayah XII Tahun 2022

REVISI	TANGGAL	DIGITALSTAMP	PAGU	KETERANGAN REVISI
10	1 Desember 2022	4829-2068-6303-6130.	10,435,066,000	Revisi Realokasi Anggaran Lingkup Ditjen PHL TA 2022 Yang Terblokir Ke BUN
8	11 Oktober 2022	3273-4470-2765-3005	11,207,941,000	Revisi DJA (hapus blokir belanja pegawai)
4	24 Mei 2022	0025-4915-1448-6404	11,413,655,000	Revisi DJA Top Up Dana HLN Program FIP II
0	17-Nov-21	0931-1482-8052-3154	10,972,155,000	DIPA Awal

Anggaran DIPA tahun 2022 BPHL Wilayah XII dialokasikan untuk kegiatan utama yaitu program pengelolaan hutan berkelanjutan yang pagunya berdasarkan revisi terakhir berjumlah Rp5.790.280.000 dan kegiatan pendukung yakni program dukungan manajemen yang pagunya berdasarkan revisi terakhir berjumlah Rp4.644.786.000.. Berdasarkan jenis belanja, anggaran BPHL Wilayah XII dibagi menjadi 3 kategori : Belanja pegawai dengan pagu revisi terakhir Rp3.362.286.000, belanja barang dengan pagu revisi terakhir Rp7.002.780.000 dan belanja modal dengan pagu revisi terakhir Rp70.000.000.

Realisasi anggaran tahun 2022 diambil dari data OMSPAN tanggal 12 Januari 2023, menunjukkan angka capaian 99,69% atau senilai Rp 10.402.817.090 dari total Pagu akhir yang berjumlah Rp 10.435.066.000. Sisa dana tidak terealisasi porsi terbesar ada pada pagu belanja pegawai, yang tersisa senilai Rp 31.545.426 atau sebesar 0,94% dari pagu belanja pegawai.

Tabel 6. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2022 Berdasarkan OMSPAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XIV PALU

REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	5396 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dijen Pengelolaan Hutan Lestari	PAGU	3,362,286,000	1,212,500,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	4,644,786,000
		REALISASI	3,330,740,574 (99.06%)	1,212,428,893 (99.99%)	69,943,240 (99.92%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4,613,112,707 (99.32%)
		SISA	31,545,426	71,107	56,760	0	0	0	0	0	0	31,673,293
2	6729 Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	PAGU	0	2,437,395,000	0	0	0	0	0	0	0	2,437,395,000
		REALISASI	0.00%	2,437,311,865 (100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2,437,311,865 (100.00%)
		SISA	0	83,135	0	0	0	0	0	0	0	83,135
3	6730 Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	PAGU	0	558,611,000	0	0	0	0	0	0	0	558,611,000
		REALISASI	0.00%	558,571,323 (99.99%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	558,571,323 (99.99%)
		SISA	0	39,677	0	0	0	0	0	0	0	39,677
4	6731 Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	PAGU	0	924,472,000	0	0	0	0	0	0	0	924,472,000
		REALISASI	0.00%	924,305,340 (99.98%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	924,305,340 (99.98%)
		SISA	0	166,660	0	0	0	0	0	0	0	166,660
5	6732 Peningkatan Tertib luran dan Penatausahaan Hasil Hutan	PAGU	0	377,784,000	0	0	0	0	0	0	0	377,784,000
		REALISASI	0.00%	377,764,020 (99.99%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	377,764,020 (99.99%)
		SISA	0	19,980	0	0	0	0	0	0	0	19,980
6	6733 Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	PAGU	0	1,492,018,000	0	0	0	0	0	0	0	1,492,018,000
		REALISASI	0.00%	1,491,751,835 (99.98%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1,491,751,835 (99.98%)
		SISA	0	266,165	0	0	0	0	0	0	0	266,165
GRAND TOTAL		PAGU	3,362,286,000	7,002,780,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	10,435,066,000
		REALISASI	3,330,740,574 (99.06%)	7,002,133,276 (99.99%)	69,943,240 (99.92%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	10,402,817,090 (99.69%)
		SISA	31,545,426	646,724	56,760	0	0	0	0	0	0	32,248,910

III. RENCANA KERJA TAHUN 2023

A. Strategi dalam Mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional

Sebagaimana telah dikemukakan di bagian pendahuluan dokumen Renja ini, Kebijakan pembangunan RKP tahun 2023 salah satunya memprioritaskan **Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem** yang antara lain dapat ditempuh dengan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan melalui program pengembangan tanaman agroforestry. Prioritas pembangunan lainnya adalah **Mendorong Pemulihan Dunia Usaha**, hal ini sejalan dengan peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal fasilitasi sertifikat SLK UMKM atas produk hasil hutan yang berdaya saing tinggi dan mampu menembus pasar global. Pengelolaan hutan lestari juga turut menjadi bagian dari **Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi**.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 menjadi acuan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan nasional bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional. Sebagai bagian Pemerintah Pusat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkontribusi mendukung pelaksanaan RKP tahun 2021 khususnya Program Prioritas Nasional (PN1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; (PN2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (PN3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan (PN6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Dari empat Program Prioritas Nasional (PN) yang dilaksanakan oleh Kementerian LHK, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sejalan dengan tupoksinya berpartisipasi pada Program PN1 yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Program prioritas nasional PN1 dijabarkan dalam 8 (delapan) program prioritas (PP) yaitu : (PP1) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT); (PP2) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; (PP3) Peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan; (PP4) Peningkatan pengelolaan kemaritiman perikanan dan kelautan; (PP5) Penguatan kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi; (PP6) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi; (PP7) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat

Kandungan Dalam Negeri (TKDN) serta (PP8) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

Untuk mendukung Program prioritas nasional tahun 2023, Ditjen PHPL berpartisipasi melaksanakan program prioritas PP2 (peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta program prioritas PP6 (peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi. Pelaksanaan dua program prioritas ini juga diselaraskan dengan sasaran Renstra Ditjen PHPL tahun 2020-2024 yang antara lain: 1) Penyederhanaan regulasi untuk investasi dan perizinan; 2) Peningkatan produktivitas hutan produksi melalui pembinaan sistem silvikultur seperti pengembangan multi usaha di dalam areal pemanfaatan izin dan diversifikasi produk hasil hutan; 3) pemberian akses kelola hutan produksi pada masyarakat; 4) Optimalisasi bahan baku yang terintegrasi industri pengolahan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan; 5) Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan nilai tambah (*added value*).

Strategi Ditjen PHPL dalam mendukung prioritas nasional PN1 dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan ruang kelola hutan produksi dan diversifikasi produksi hasil hutan untuk meningkatkan PNBP, tertib peredaran hasil hutan dan legalitas kayu serta peningkatan ekspor produk industri kehutanan. Implementasi kebijakan dan strategi Ditjen PHPL tahun 2023 termasuk dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas nasional PN1 secara teknis diimplementasikan oleh Satuan Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah I s.d XVI.

Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Eselon I Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari menyusun Rencana Kerja dengan menganut sistem *cascading* atau penjabaran sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja organisasi secara vertikal untuk menciptakan keselaran dalam organisasi. BPHL sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, menerima pelimpahan tugas vertikal dari direktorat-direktorat unit eselon I Ditjen PHL, dengan gambaran alur pendistribusian kegiatan sebagaimana ditampilkan pada matriks di bawah ini :

Tabel 1. Matriks Cascading IKP, IKK, RO Ditjen PHL Tahun 2023

MATRIKS CASCADING IKP, IKK, RO DITJEN PHL 2023

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) UKE I	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	RINCIAN OUTPUT/SATKER
T1.S4.1.1.1. Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan.	T1.S4.1.1.1.2.1. Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung; (Dit. BRPH)	6729.AFA.001 - NSPK Perencanaan Pengelolaan Hutan.
		6729.BAH.001 - Layanan Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan)
	T1.S4.1.1.1.2.2. KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan; (Dit. BRPH)	6729.BAB.001 - Layanan Pengesahan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hutan - RPHJP.
		6729.BEF.001 - HLN Forest Investment Program (FIP) I : Investasi Khusus Bagi Masyarakat untuk Penanggulangan Deforestasi dan Degradasi Hutan
		6729.BIC.001 - Perencanaan Pengelolaan Hutan yang diawasi dan dikendalikan
	T1.S4.1.1.1.2.3. Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari. (Dit. BRPH)	6729.QDB.001 - Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Perencanaan Pengelolaan Hutan
		6729.QDB.002 - Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari
	T1.S4.1.1.1.1.1. Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan; (Dit.PUPH)	6731.QAC.001 - Layanan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan
T2.S2.1.1.1. Jumlah produksi kayu bulat.	T2.S2.1.1.1.2.1. Investasi perizinan berusaha pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (Dit. BUPH)	6730.AFA.001 - NSPK usaha pemanfaatan hutan
		6730.BAH.001 - Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

	T2.S2.1.1.1.2.2. Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan. (Dit. BUPH)	6730.BDH.001 - Pembinaan Teknis/ Supervisi Bidang Usaha Pemanfaatan
		6730.BIH.001 - Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan
	T2.S2.1.1.1.1.1. Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas; (Dit. PUPH)	6731.AFA.001 - NSPK Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan
		6731.BDH.001 - Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan
	T2.S2.1.1.1.1.2. Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu; (Dit. PUPH)	6731.QIH.001 - Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan
	T2.S2.1.1.1.1.3. Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan. (Dit. PUPH)	6731.BDH.002 - Fasilitas Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
T3.S3.1.2.1. Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat.	T3.S3.1.2.1.1.1 Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat. (Dit. PUPH) *Belum tercantum pada dokumen anggaran	6731.BDD.001 - Fasilitas dan Pembinaan Pemanfaatan HUTan
T2.S4.1.1.1. Nilai PNBP dari Pemanfaatan Hutan.	T2.S4.1.1.1.1.1. Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan; (Dit. IPHH)	6732.AFA.001 - NSPK Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan
		6732.BAC.001 - Layanan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan
		6732.BIH.001 - Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan
	T2.S4.1.1.1.1.2. Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT. (Dit. IPHH)	6732.BDH.001 - Pembinaan Teknis/ Supervisi Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan
		6732.BDH.002 - Fasilitas dan Pembinaan Tertib Iuran dan Penatausahaan hasil Hutan
T2.S3.1.1.1. Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan.	T2.S3.1.1.1.1.1. Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK; (Dit. BPPHH)	6733.AFA.001 - NSPK Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

		6733.PBV.001 - Rekomendasi Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu
		6733.QAH.001 - Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Besar
		6733.QDH.001 - Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
		6733.BDH.002 - Fasilitasi dan Pembinaan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Kecil dan Menengah
		6733.QIH.001 - Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya
	T2.S3.1.1.1.2.1. Ekspor produk olahan hasil hutan; (Dit. BPPHH)	6733.BAC.001 - Layanan Notifikasi Ekspor dan Impor Hasil Hutan
	T2.S3.1.1.1.2.2. UMKM yang difasilitasi sertifikasi/ penilikan SVLK. (Dit. BPPHH)	6733.QDG.001 - Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan
		6733.QDG.002 - Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan oleh BPHP

Gambar Sasaran Program, Indikator Kinerja Program Ditjen PHL tahun 2022

Pengarusutamaan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJMN 2020-2024 disebutkan bahwa pengarusutamaan (*mainstreaming*) dimaksudkan sebagai bentuk inovasi dan adaptasi pembangunan terhadap kondisi terkini untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Renja BPHL Wilayah XII Tahun 2023 ini terdapat 4 (empat) pengarusutamaan yang berkaitan satu sama lain, yaitu sebagai berikut :

1. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan hutan produksi yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pengarusutamaan ini dilakukan dengan rencana pemanfaatan/ pengelolaan hutan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan

perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan hutan produksi bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, untuk menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang *responsive gender* (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang *responsif gender*; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG. Implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan hutan produksi sesuai rencana kerja BPHL Wilayah XII Tahun 2023.

BPHL Wilayah XII Palu memandang isu kesetaraan gender sebagai bagian penting dalam perencanaan dan penganggaran. Menindaklanjuti kegiatan workshop peningkatan kapasitas SDM KTH berbasis responsif gender tahun 2022, BPHL Wilayah XII akan melanjutkan internalisasi penganggaran responsif gender dalam DIPA tahun 2023.

3. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

4. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi

pengarusutamaan transformasi digital pada Ditjen PHL terdiri atas aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan *big data* melalui web Satu Data.

B. Rincian Output Tahun 2023

Kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran mendorong perumusan kinerja yang lebih tepat sasaran. BPHL tidak lagi memiliki IKK tetapi mendukung pencapaian IKK Unit Kerja Eselon II (Direktorat) melalui Rincian Output. Rincian Output BPHL Wilayah XII Palu adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja 2023 :

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII PALU
 DITJEN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	RINCIAN OUTPUT	TARGET
(1)	(2)	(3)
Program Dukungan Manajemen		
1	Layanan Umum	1 Layanan
2	Layanan Perkantoran	1 Layanan
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		
3	Rencana Pengelolaan Hutan yang Efektif	1 Lembaga
4	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	1 Lembaga
5	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	2 Badan Usaha
6	Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	1 Badan Usaha
7	Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	1 Badan Usaha
8	Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan	2 Kelompok Masyarakat
9	Pemantauan dan Evaluasi bidang Iuran dan Penatausahaan hasil Hutan	5 Badan Usaha
10	Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	6 Badan Usaha
11	Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan	12 Badan Usaha
12	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya	7 Badan Usaha
13	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan oleh BPHL	4 UMKM

Anggaran :
 Rp. 8.432.079.000

C. Pembiayaan Tahun 2023

Untuk melaksanakan arah kebijakan, strategi dan program pengelolaan hutan berkelanjutan dan program dukungan manajemen serta dalam rangka mencapai target kinerja sesuai dengan Renstra Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai, baik yang bersumber dari APBN Murni maupun dana tak terikat lainnya. Pendanaan yang berasal dari APBN akan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yaitu diprioritaskan pada program dan kegiatan yang memberikan hasil/dampak (outcome/impact) yang nyata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rencana alokasi anggaran dalam Renja BPHP Wilayah XII Palu Tahun 2023 didasarkan *cascading* IKP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat lingkup Ditjen PHL. Alokasi pagu BPHL Wilayah XII Palu Tahun 2023 pagu anggaran BPHL Wilayah XII berkurang sebesar Rp 2.302.987.000 dari anggaran tahun 2022, menjadi hanya sebesar Rp 8.432.079.000 (delapan milyar empat ratus tiga puluh dua juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas anggaran sumber dana RM sebesar Rp.6.832.030.000 (enam milyar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah), sumber dana PNPB sebesar Rp.1.600.049.000,- (satu milyar enam ratus juta empat puluh sembilan ribu rupiah), dimana Rp 300.000.000 dalam posisi tidak dapat dicairkan karena blokir pencadangan anggaran (*automatic adjustment*). Anggaran yang terblokir terbagi di 2 (dua) program yakni di program pengelolaan hutan berkelanjutan terdapat blokir anggaran sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan di program dukungan manajemen terdapat blokir anggaran sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Struktur anggaran BPHL Wilayah XII Palu tahun 2023 per output adalah sebagai berikut :

NO.	KODE NAMA KEGIATAN / OUTPUT	PAGU
1	5396 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	5,065,139,000
2	5396EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	5,065,139,000
Jumlah		5,065,139,000

NO.	KODE NAMA KEGIATAN / OUTPUT	PAGU
1	6729 Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	672,068,000
2	6729BIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	241,291,000
3	6729QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	430,777,000
Jumlah		672,068,000

NO.	KODE NAMA KEGIATAN / OUTPUT	PAGU
1	6730 Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	202,978,000
2	6730BIH Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	202,978,000
Jumlah		202,978,000

NO.	KODE NAMA KEGIATAN / OUTPUT	PAGU
1	6731 Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	1,060,361,000
2	6731BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	95,000,000
3	6731BDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	399,905,000
4	6731QIH Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	565,456,000
Jumlah		1,060,361,000

NO.	KODE NAMA KEGIATAN / OUTPUT	PAGU
1	6732 Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	377,134,000
2	6732BDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	142,496,000
3	6732BIH Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	234,638,000
Jumlah		377,134,000

NO.	KODE NAMA KEGIATAN / OUTPUT	PAGU
1	6733 Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	1,054,399,000
2	6733BDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	317,064,000
3	6733QDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	408,109,000
4	6733QIH Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	329,226,000
Jumlah		1,054,399,000

Tanpa memperhitungkan pagu blokir AA, total pagu anggaran BPHL Wilayah XII berjumlah Rp 8.132.079.000

Kementerian : 029 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Unit Organisasi 03 DITJEN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
Satuan Kerja : 613221 BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII PALU

Uraian	Pagu Revisi
JUMLAH SELURUHNYA	8,132,079,000
FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	3,166,940,000
FF.6729 Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	472,068,000
BIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	241,291,000
QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	230,777,000
FF.6730 Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	202,978,000
BIH Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	202,978,000
FF.6731 Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	1,060,361,000
BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	95,000,000
BDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	399,905,000
QIH Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	565,456,000
FF.6732 Peningkatan Tertib luran dan Penatausahaan Hasil Hutan	377,134,000
BDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	142,496,000
BIH Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	234,638,000
FF.6733 Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	1,054,399,000
BDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	317,064,000
QDGFasilitasi dan Pembinaan UMKM	408,109,000
QIH Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	329,226,000
WA Program Dukungan Manajemen	4,965,139,000
WA.5396 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	4,965,139,000
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,965,139,000

IV. PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu Tahun 2023 ini merupakan arahan dan pedoman pelaksanaan kegiatan bagi para pegawai di lingkungan Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu, serta implementasi kebijakan baik teknis maupun penganggaran.

Keberhasilan pelaksanaan RENJA Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu Tahun 2022 akan sangat tergantung pada kesungguhan para pegawai serta koordinasi yang baik dengan para pihak terkait, Dinas Provinsi Kehutanan mencakup KPH dan KTH, Unit Manajemen (PBPH), pihak penyedia barang dan jasa serta masyarakat sekitar hutan dalam mengimplementasikan rencana-rencana kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam rencana kerja ini.

Selain itu diperlukan komitmen para penanggung jawab kegiatan di semua level, lingkup Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu, untuk bersama-sama memenuhi target kinerja tahun 2023.

Dengan demikian pada akhirnya hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang pengelolaan hutan produksi lestari mampu memberikan hasil pembangunan yang optimal yang dapat dirasakan semua pihak.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Elbakti, S.Hut.T., M.Sc.

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Desember 2022

Pihak Kedua,

Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.
NIP. 19630807 198803 1 001

Pihak Pertama,

Elbakti, S.Hut.T., M.Sc.
NIP. 19740504 199301 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII PALU
 DITJEN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	RINCIAN OUTPUT	TARGET
(1)	(2)	(3)
Program Dukungan Manajemen		
1	Layanan Umum	1 Layanan
2	Layanan Perkantoran	1 Layanan
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		
3	Rencana Pengelolaan Hutan yang Efektif	1 Lembaga
4	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	1 Lembaga
5	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	2 Badan Usaha
6	Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	1 Badan Usaha
7	Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	1 Badan Usaha
8	Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan	2 Kelompok Masyarakat
9	Pemantauan dan Evaluasi bidang Iuran dan Penatausahaan hasil Hutan	5 Badan Usaha
10	Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	6 Badan Usaha
11	Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan	12 Badan Usaha
12	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya	7 Badan Usaha
13	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan oleh BPHL	4 UMKM

Anggaran :
 Rp. 8.432.079.000

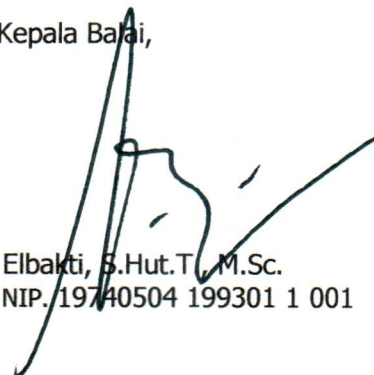
Jakarta, 15 Desember 2022

Direktur Jenderal
 Pengelolaan Hutan Lestari,



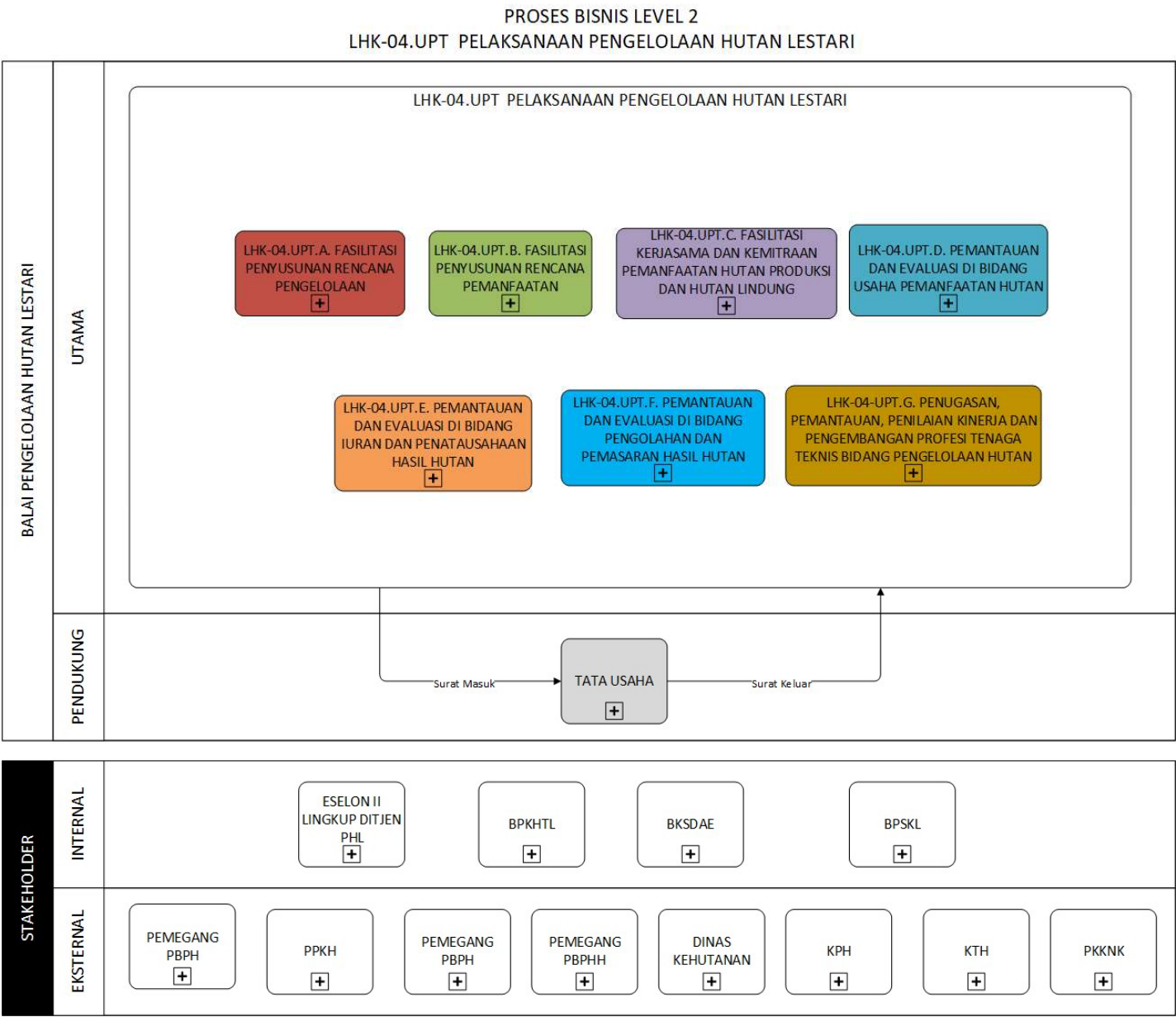
Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.
 NIP. 19630807 198803 1 001

Kepala Balai,



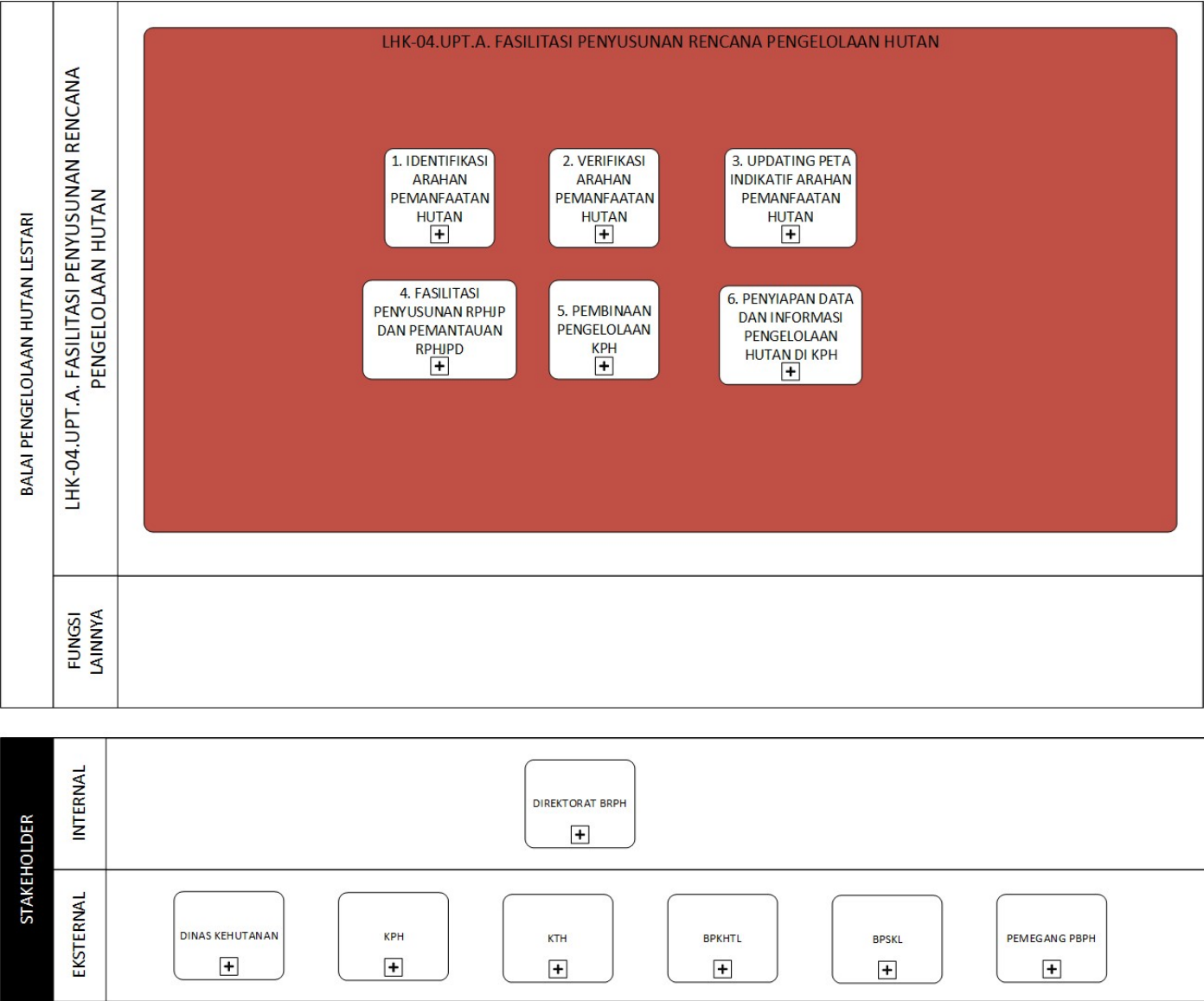
Elbakti, S.Hut.T., M.Sc.
 NIP. 19740504 199301 1 001

6 LHK-04.UPT. PELAKSANAAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI



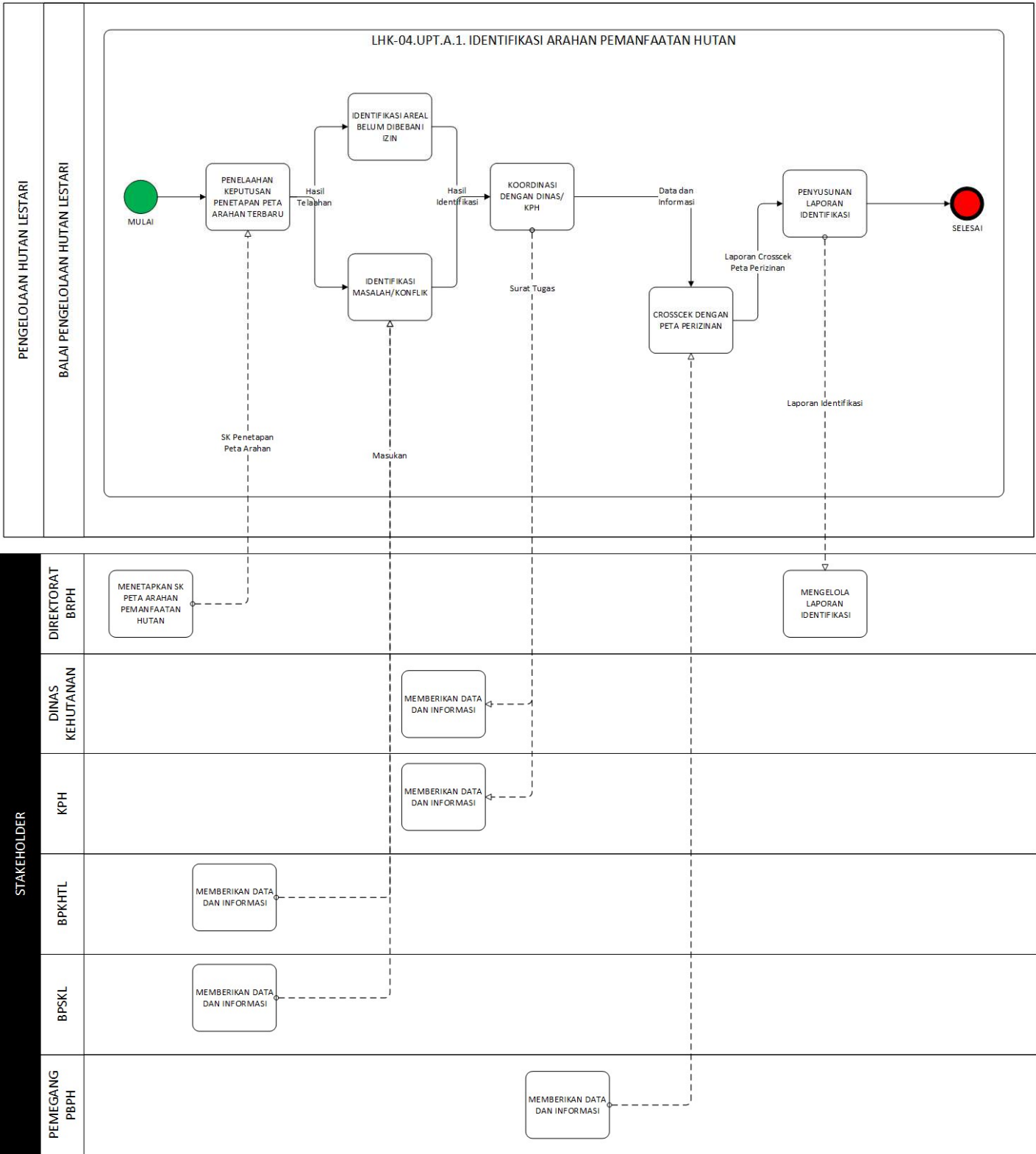
6.1 LHK-04.UPT.A. FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 3
LHK-04.UPT.A. FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN



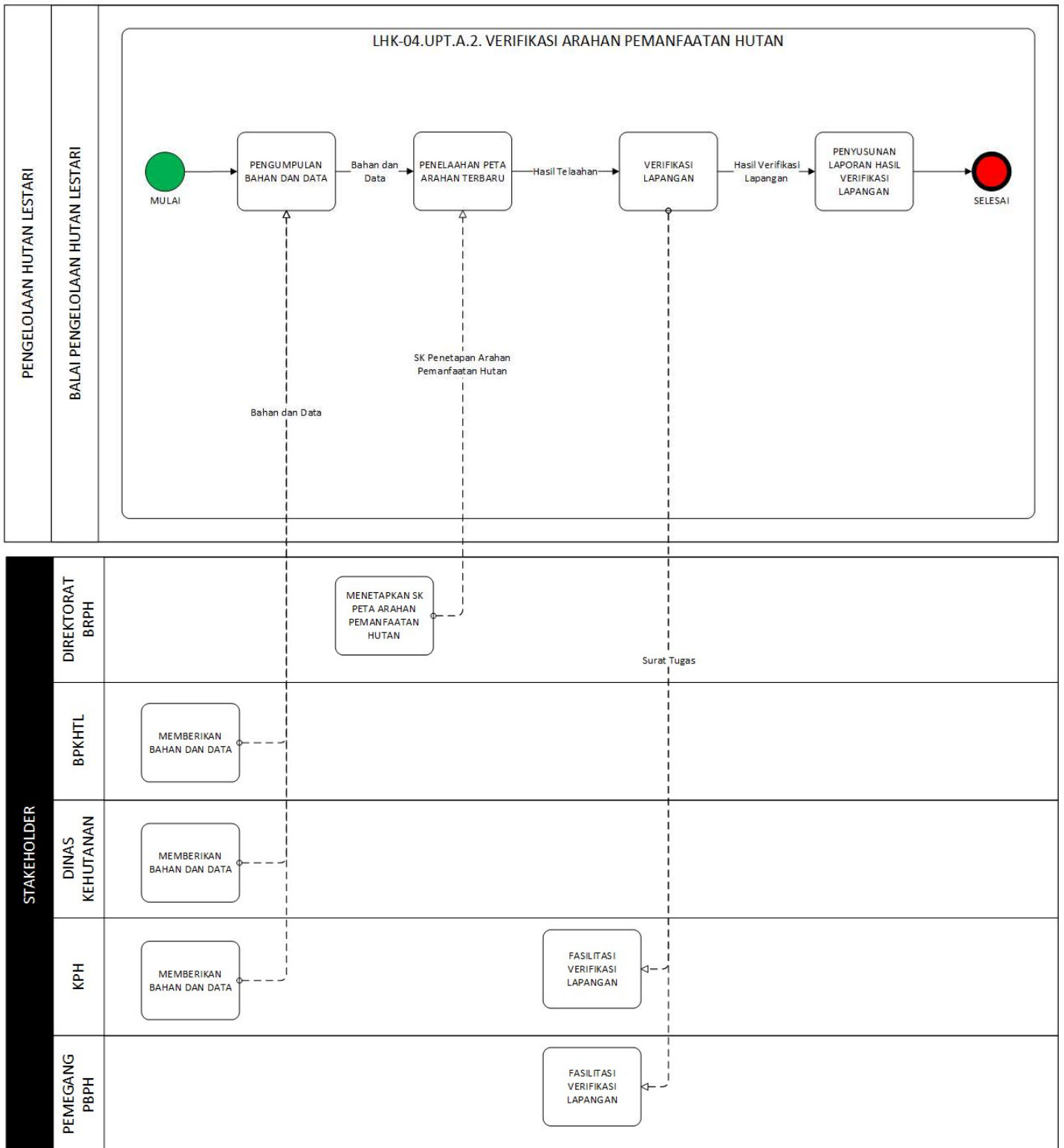
6.1.1 LHK-04.UPT.A.1. IDENTIFIKASI ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.A.1. IDENTIFIKASI ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN



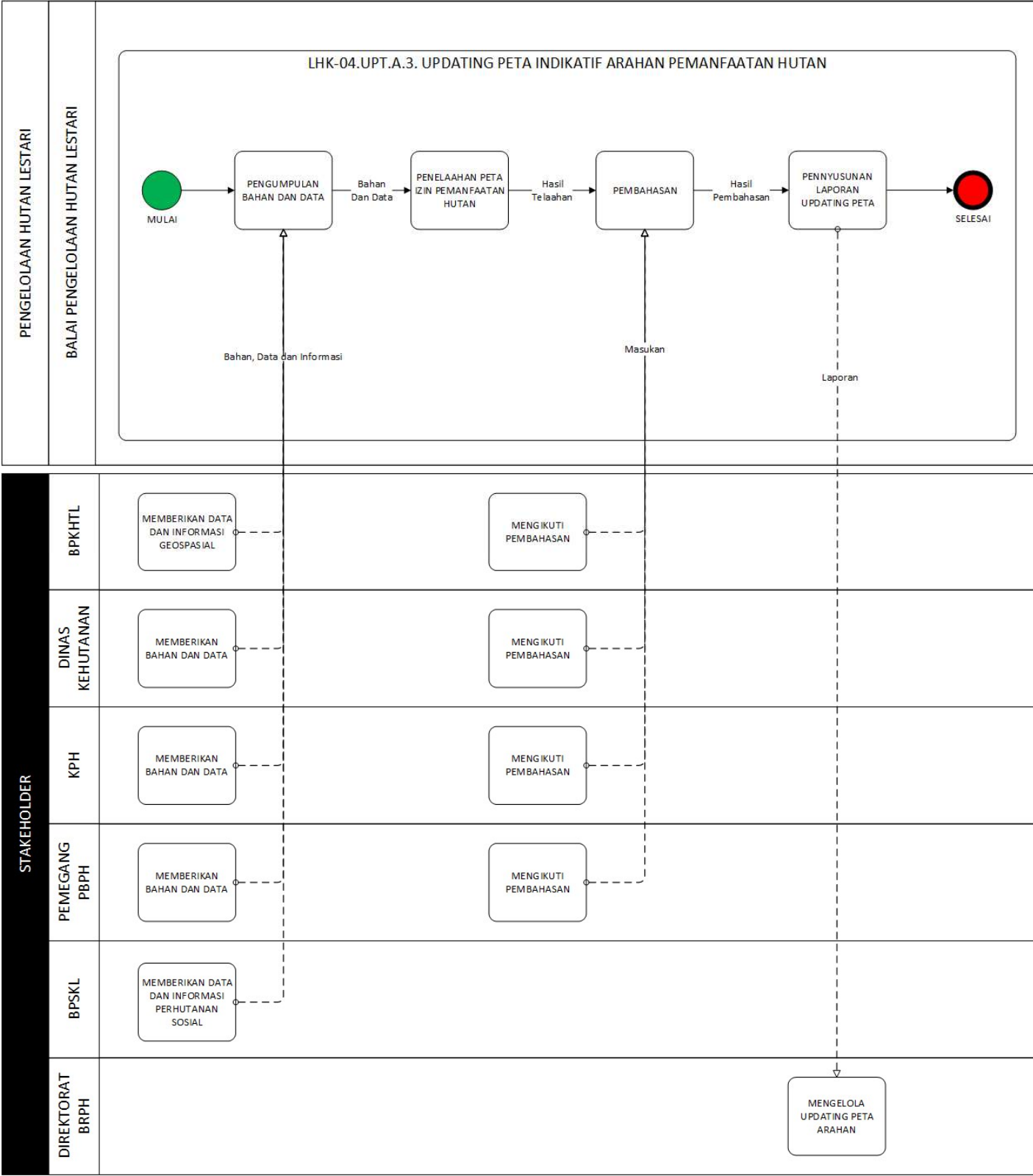
6.1.2 LHK-04.UPT.A.2. VERIFIKASI ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.A.2. VERIFIKASI ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN



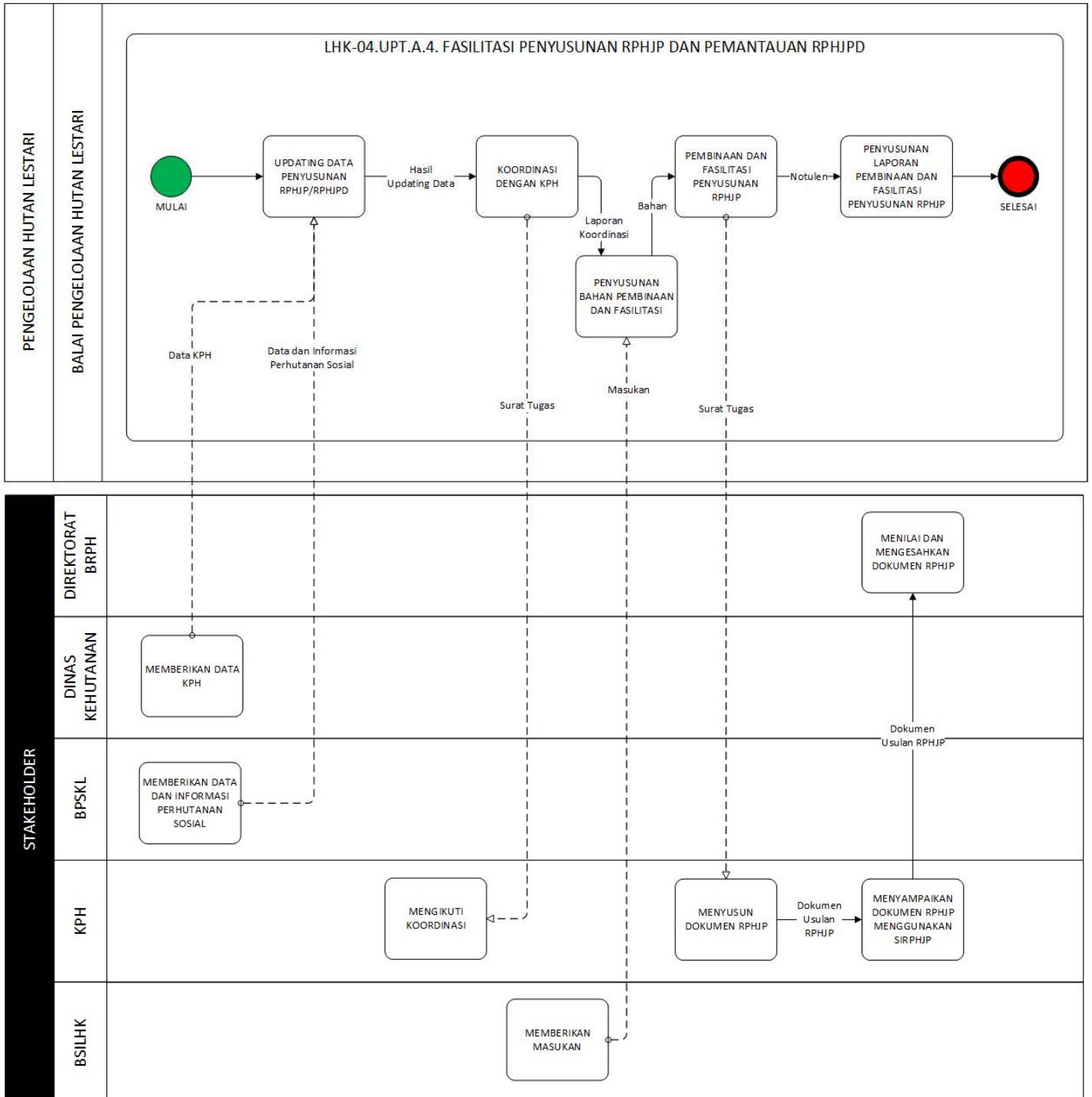
6.1.3 LHK-04.UPT.A.3. UPDATING PETA INDIKATIF ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.A.3. UPDATING PETA INDIKATIF ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN



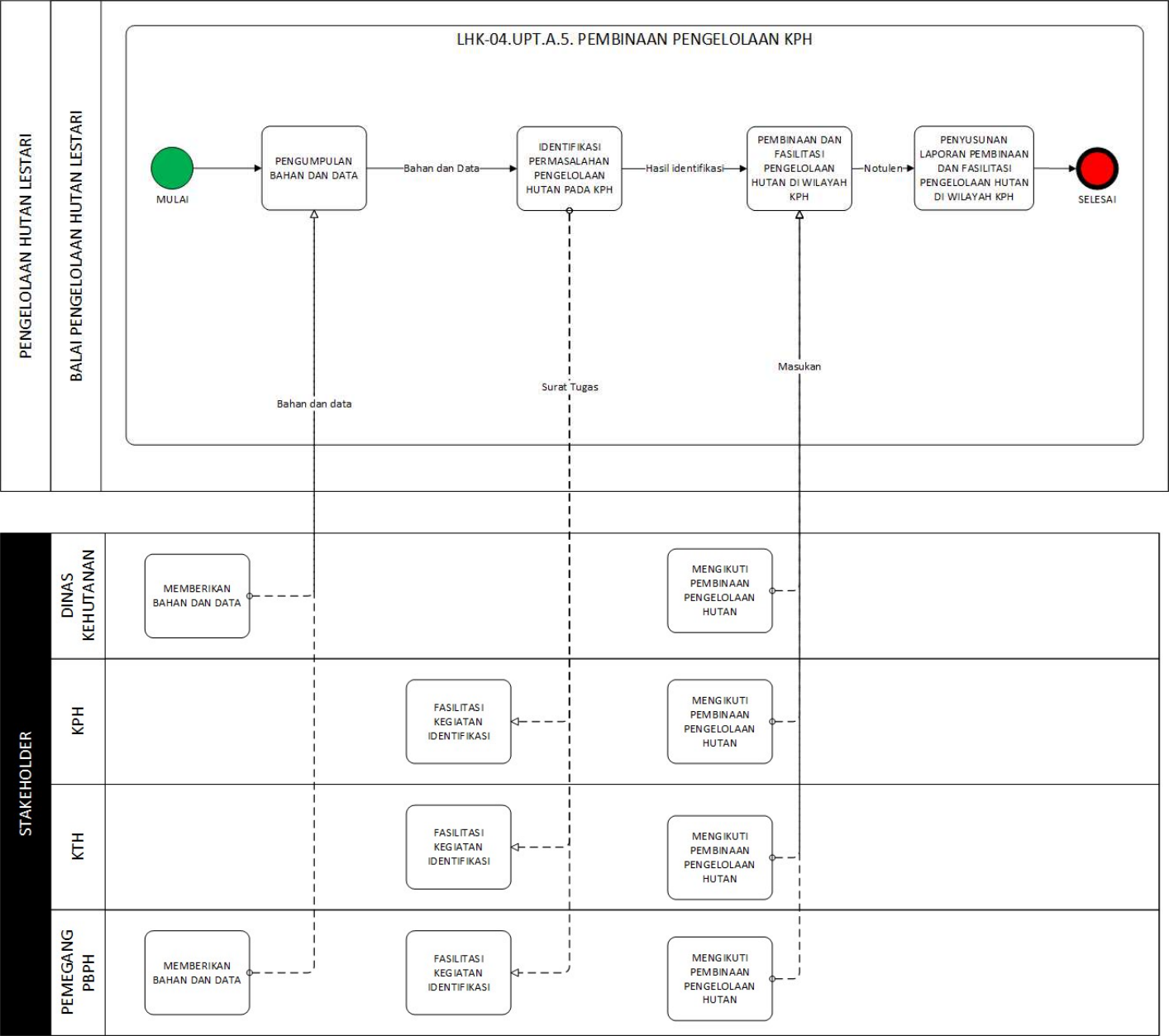
6.1.4 LHK-04.UPT.A.4. FASILITASI PENYUSUNAN RPHJP DAN PEMANTAUAN RPHJPD

PROSES BISNIS LEVEL 4 LHK-04.UPT.A.4. FASILITASI PENYUSUNAN RPHJP DAN PEMANTAUAN RPHJPD



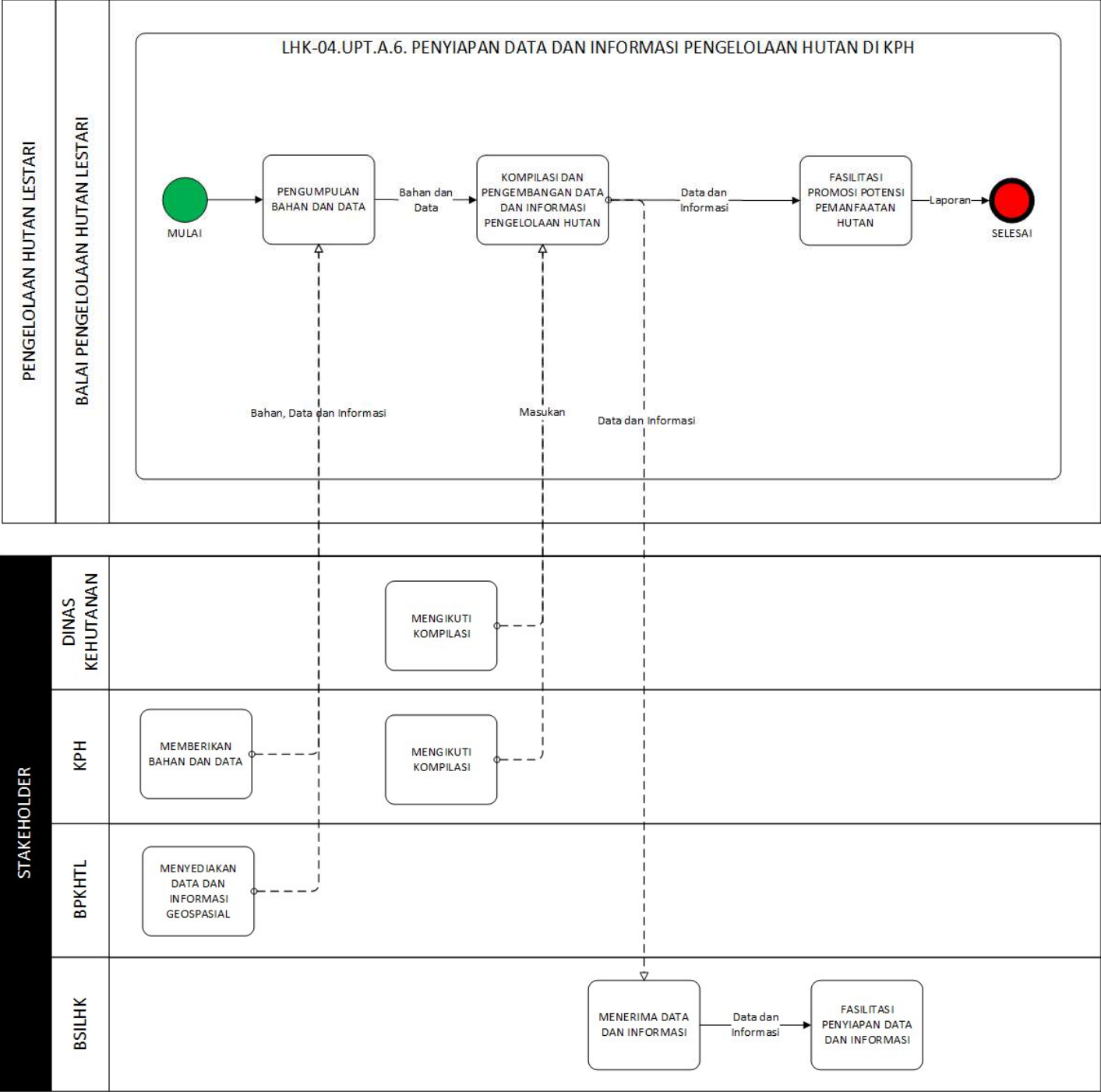
6.1.5 LHK-04.UPT.A.5. PEMBINAAN PENGELOLAAN KPH

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.A.5. PEMBINAAN PENGELOLAAN KPH



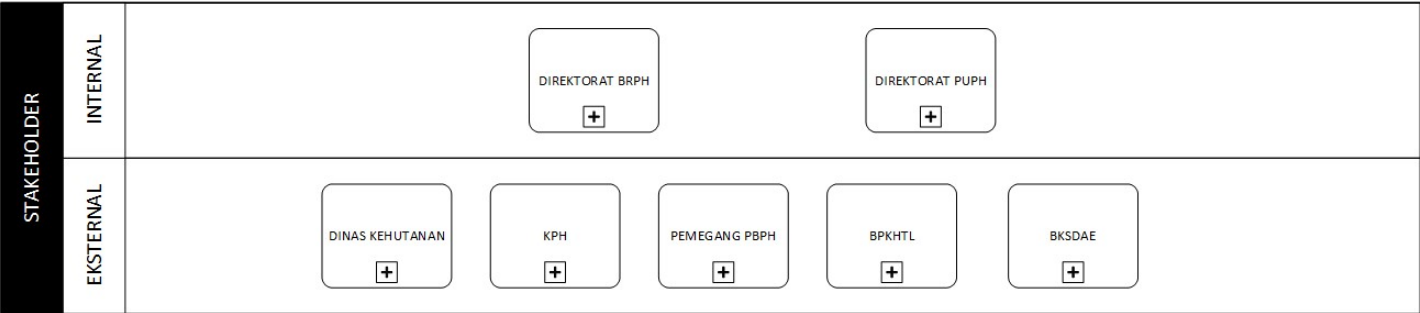
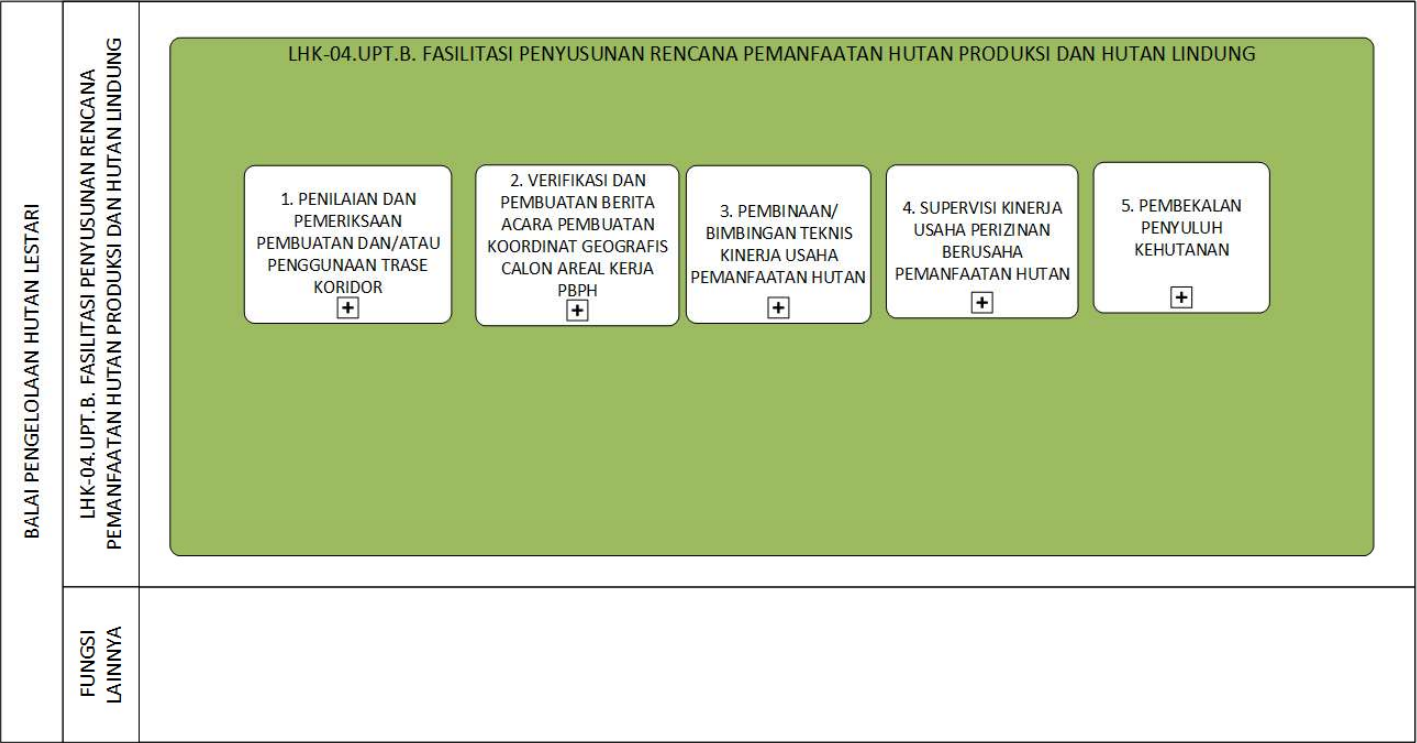
6.1.6 LHK-04.UPT.A.6. PENYIAPAN DATA DAN INFORMASI PENGELOLAAN HUTAN DI KPH

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.A.6. PENYIAPAN DATA DAN INFORMASI PENGELOLAAN HUTAN DI KPH



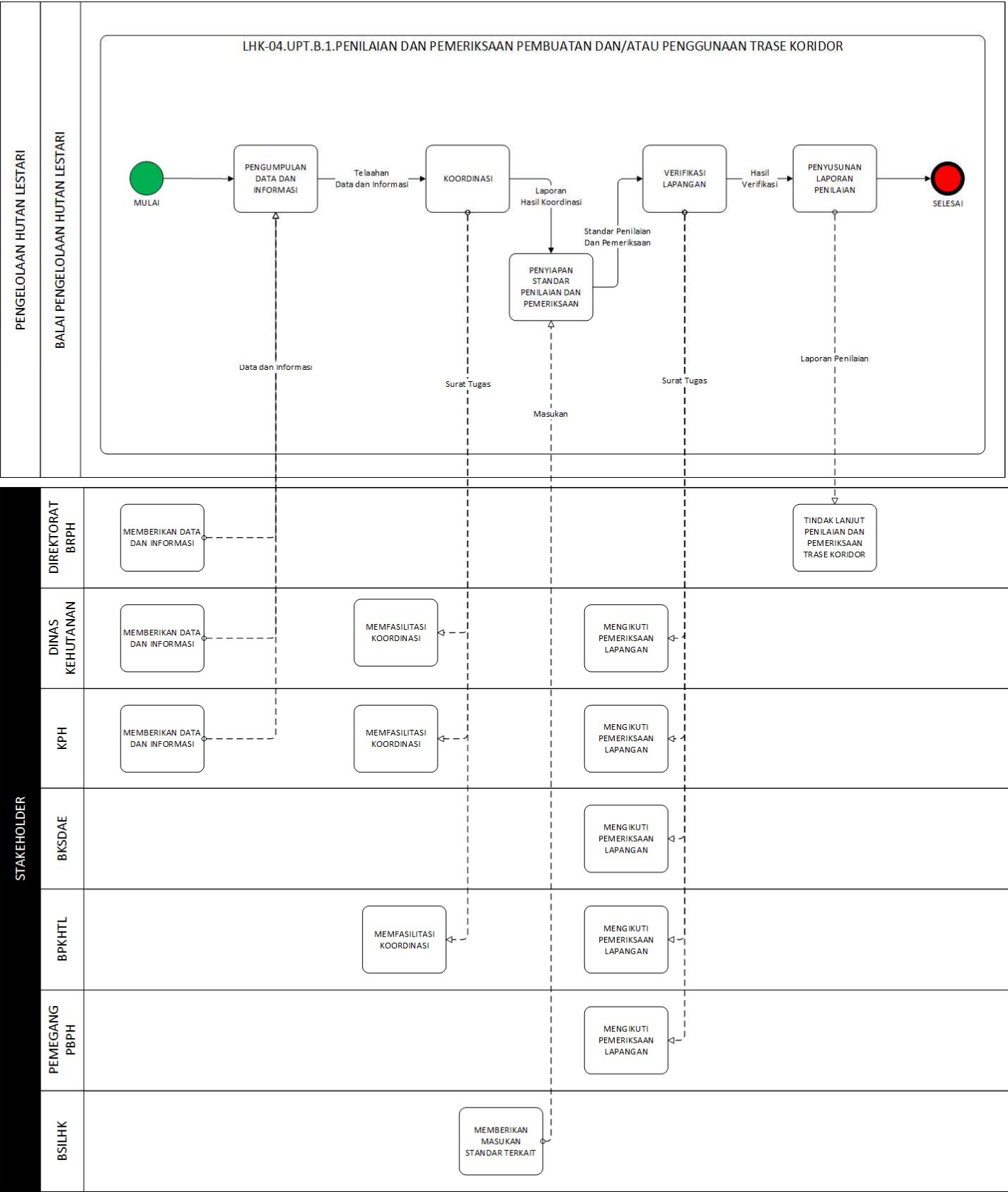
6.2 LHK-04.UPT.B. FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG

PROSES BISNIS LEVEL 3
LHK-04.UPT.B. FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG



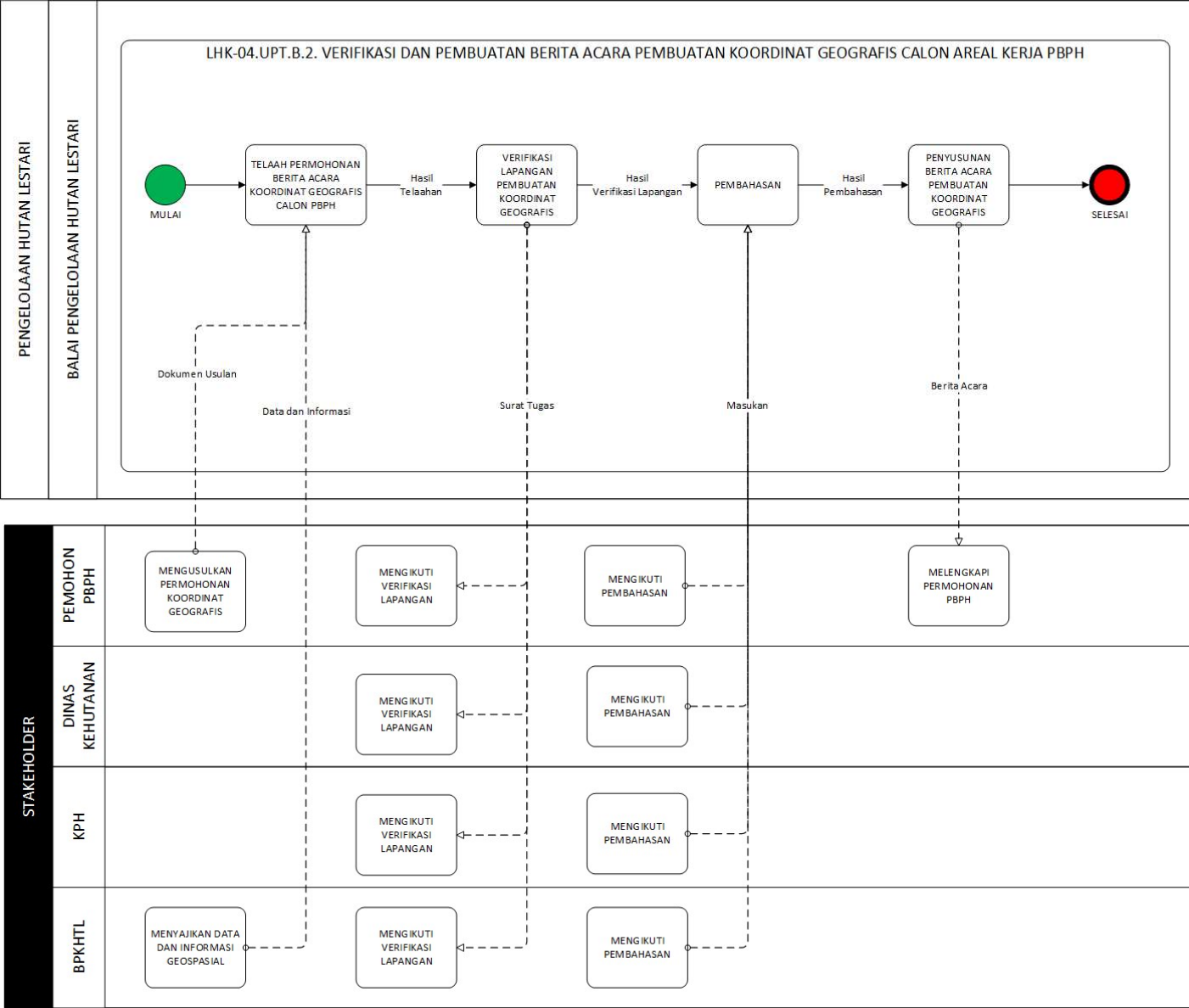
6.2.1 LHK-04.UPT.B.1. PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN PEMBUATAN DAN/ATAU PENGGUNAAN TRASE KORIDOR

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.B.1.PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN PEMBUATAN DAN/ATAU PENGGUNAAN TRASE KORIDOR



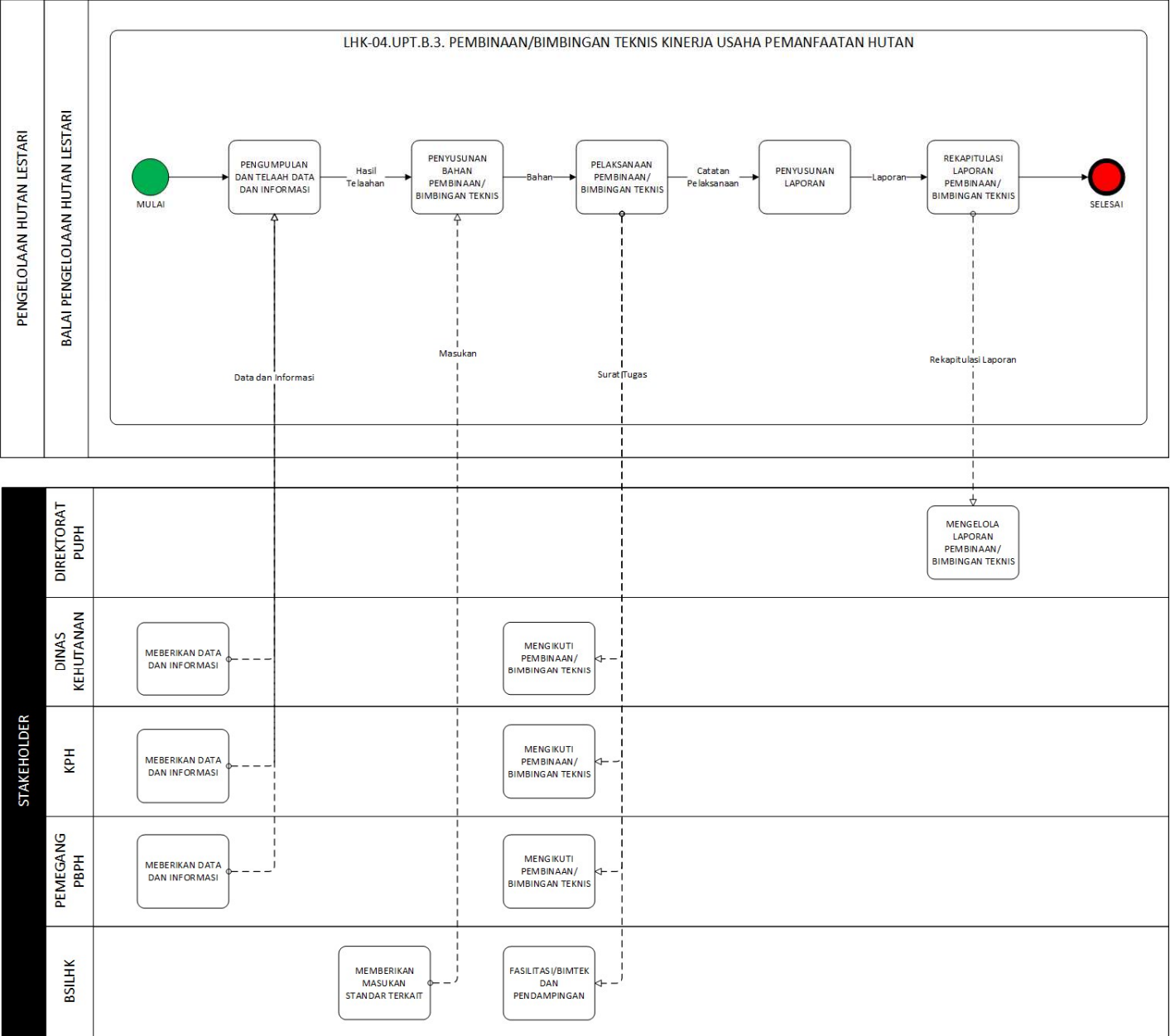
6.2.2 LHK.04.UPT.B.2. VERIFIKASI DAN PEMBUATAN BERITA ACARA PEMBUATAN KOORDINAT GEOGRAFIS CALON AREAL KERJA PBPH

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.B.2. VERIFIKASI DAN PEMBUATAN BERITA ACARA PEMBUATAN KOORDINAT GEOGRAFIS CALON AREAL KERJA PBPH



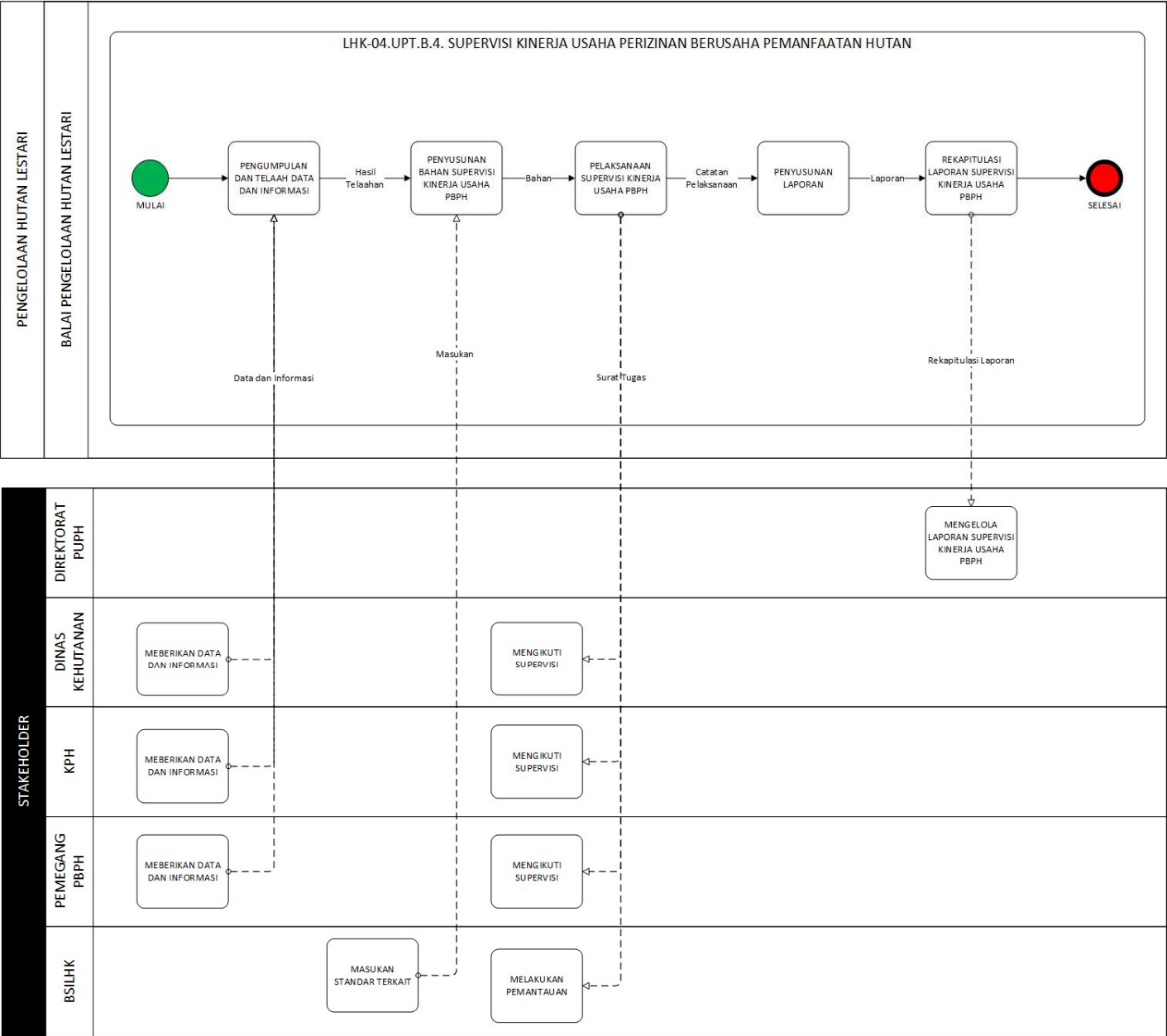
6.2.3 LHK-04.UPT.B.3. PEMBINAAN/BIMBINGAN TEKNIS KINERJA USAHA PEMANFAATAN HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.B.3. PEMBINAAN/BIMBINGAN TEKNIS KINERJA USAHA PEMANFAATAN HUTAN



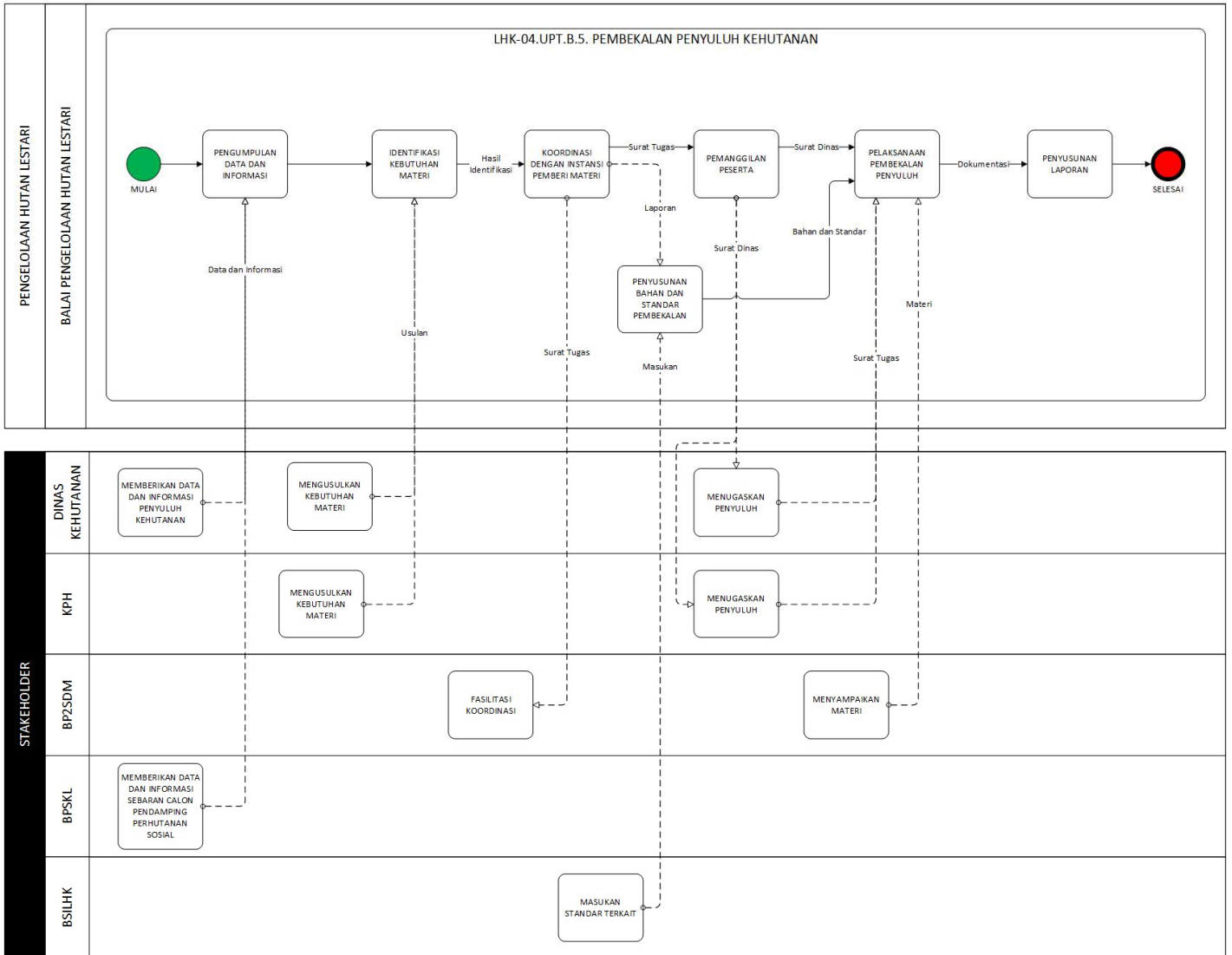
6.2.4 LHK-04.UPT.B.4. SUPERVISI KINERJA USAHA PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.B.4. SUPERVISI KINERJA USAHA PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN



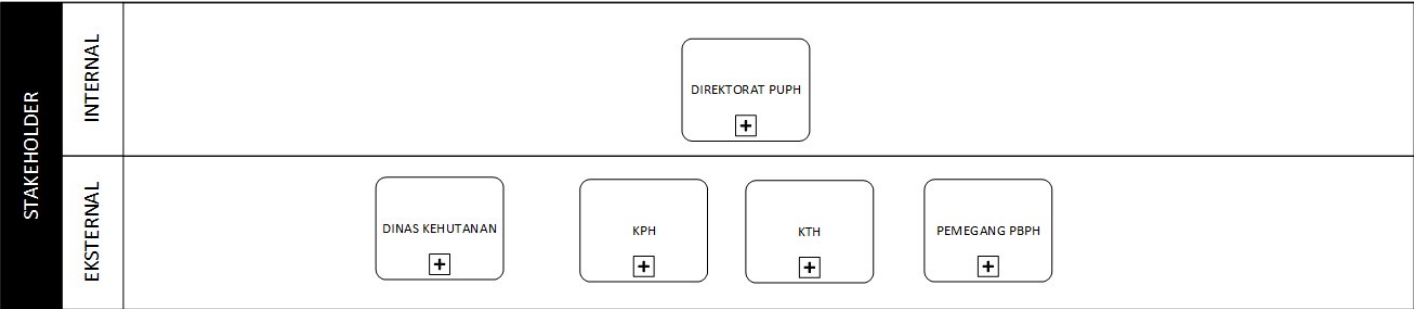
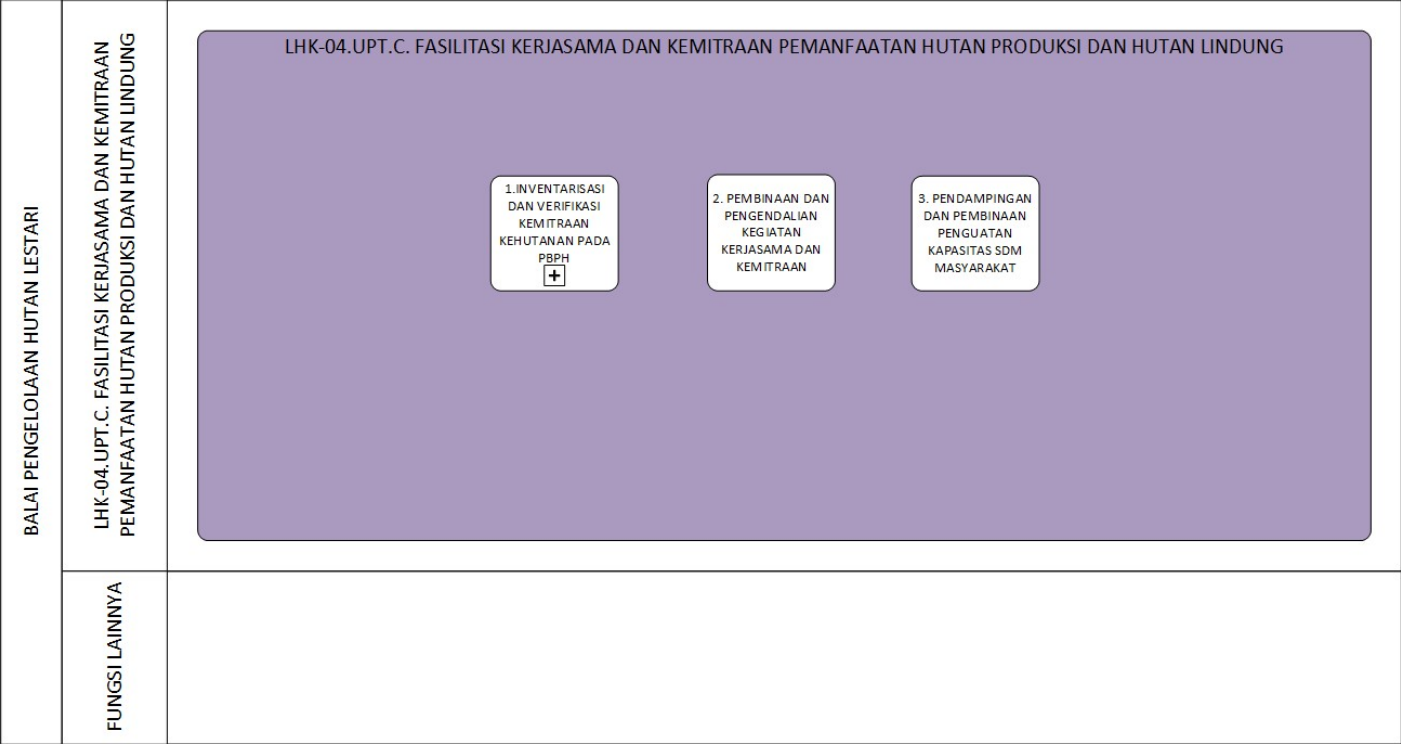
6.2.5 LHK-04.UPT.B.5. PEMBEKALAN PENYULUH KEHUTANAN

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.B.5. PEMBEKALAN PENYULUH KEHUTANAN



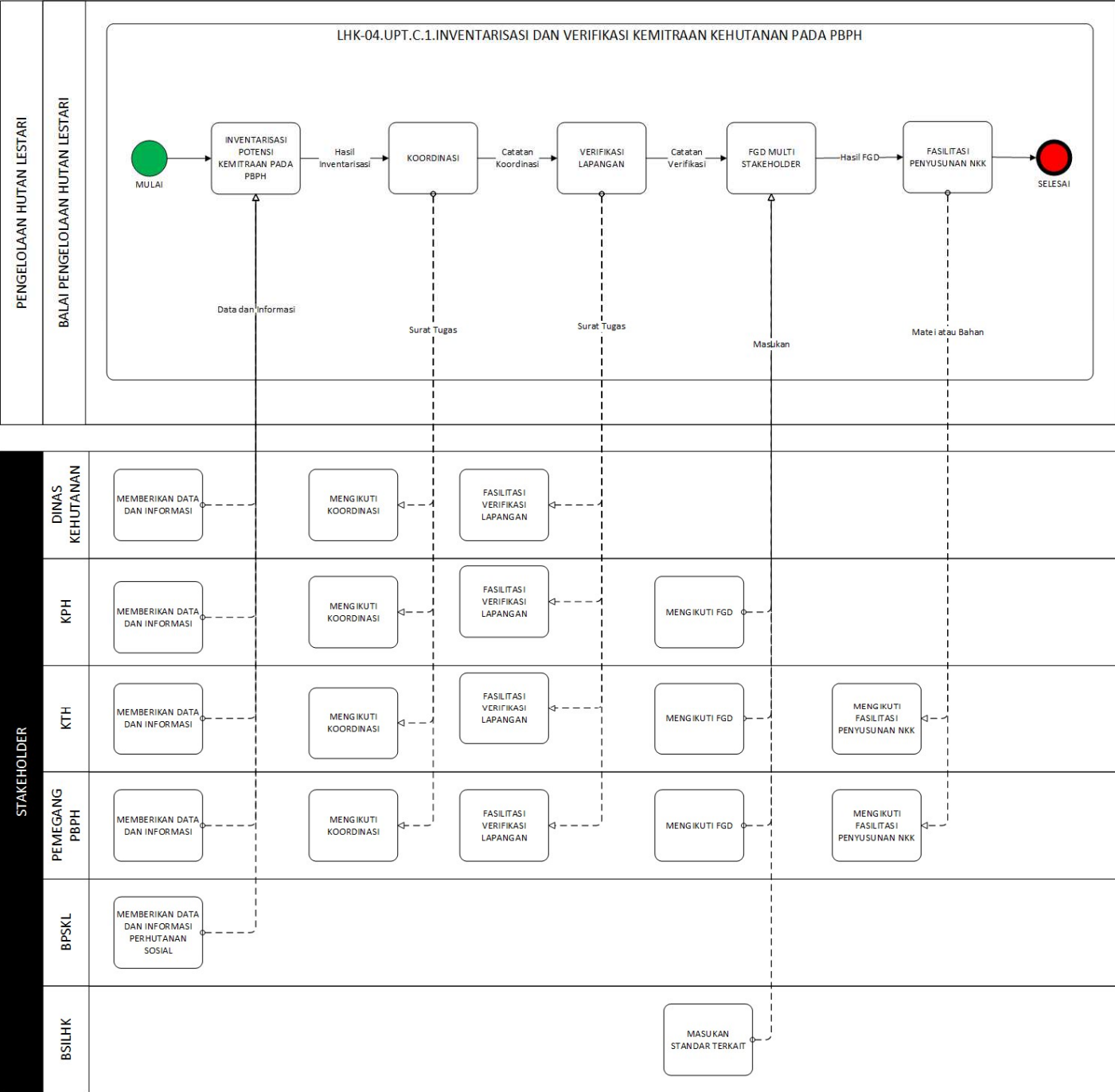
6.3 LHK-04.UPT.C. FASILITASI KERJASAMA DAN KEMITRAAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG

PROSES BISNIS LEVEL 3
LHK-04.UPT.C. FASILITASI KERJASAMA DAN KEMITRAAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG



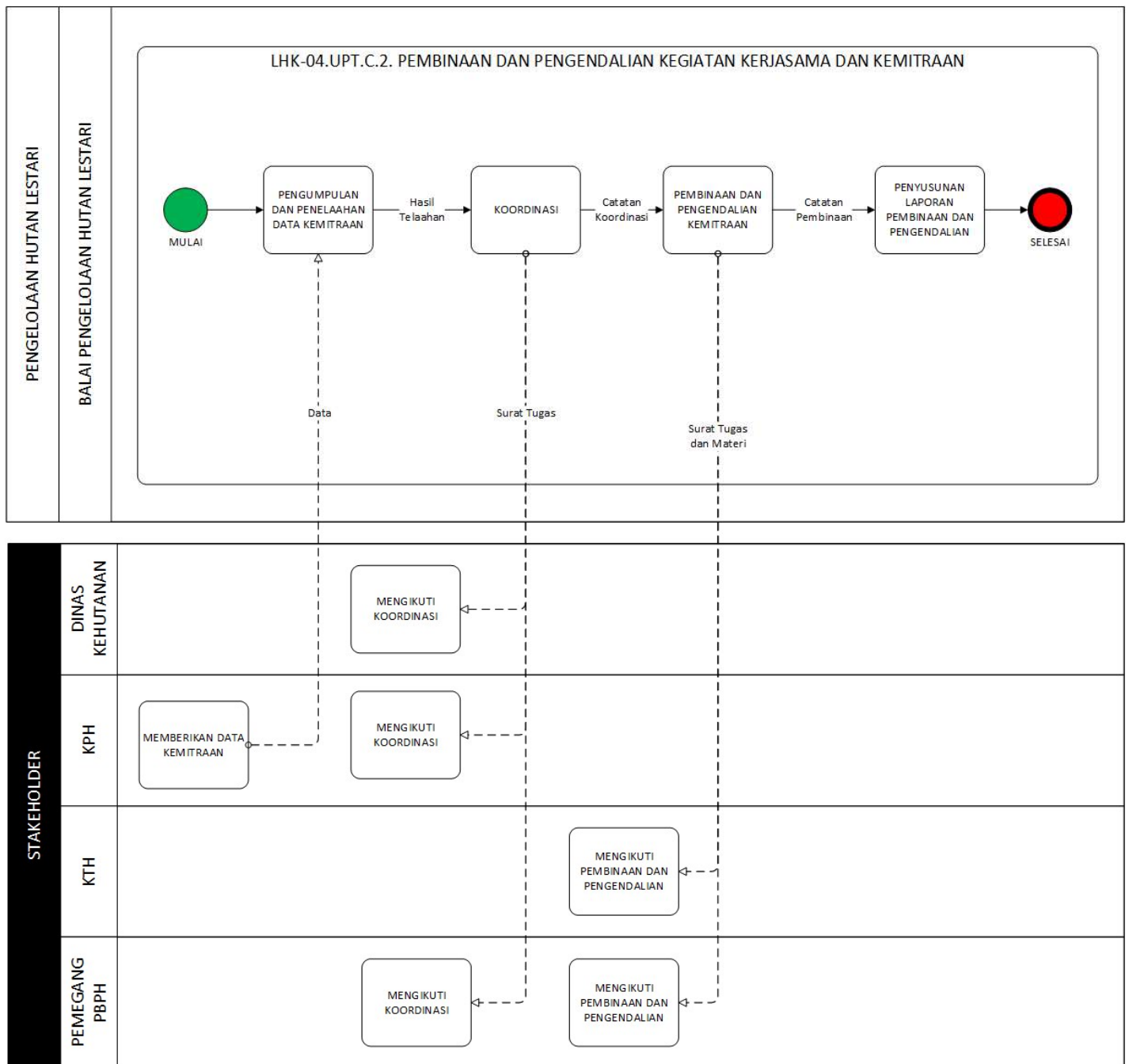
6.3.1 LHK-04.UPT.C.1.INVENTARISASI DAN VERIFIKASI KEMITRAAN KEHUTANAN PADA PBPH

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.C.1.INVENTARISASI DAN VERIFIKASI KEMITRAAN KEHUTANAN PADA PBPH



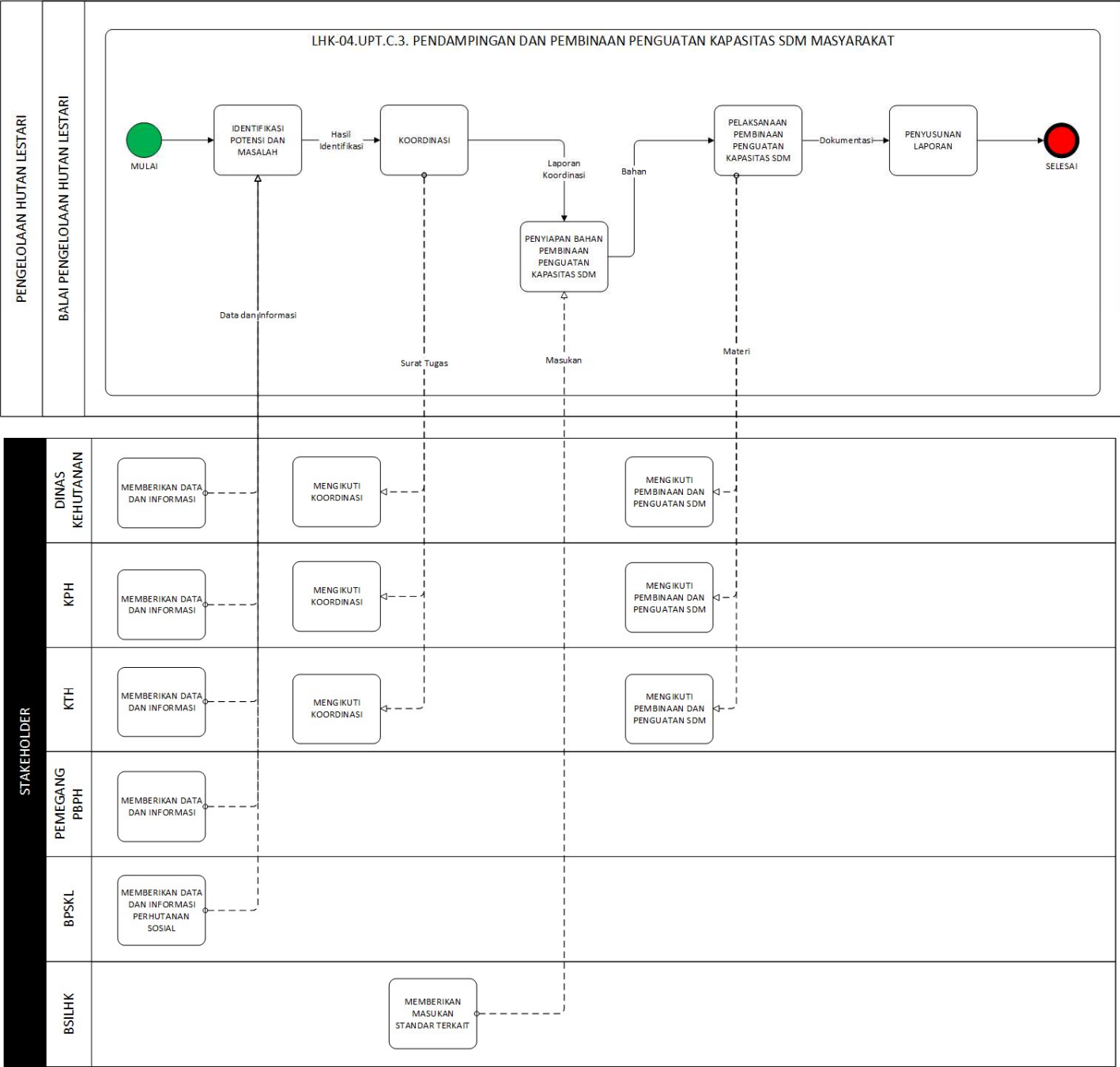
6.3.2 LHK-04.UPT.C.2. PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN KERJASAMA DAN KEMITRAAN

PROSES BISNIS LEVEL 4 LHK-04.UPT.C.2. PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN KERJASAMA DAN KEMITRAAN



6.3.3 LHK-04.UPT.C.3. PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN PENGUATAN KAPASITAS SDM MASYARAKAT

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.C.3. PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN PENGUATAN KAPASITAS SDM MASYARAKAT



6.4 LHK-04.UPT.D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI DI BIDANG USAHA PEMANFAATAN HUTAN

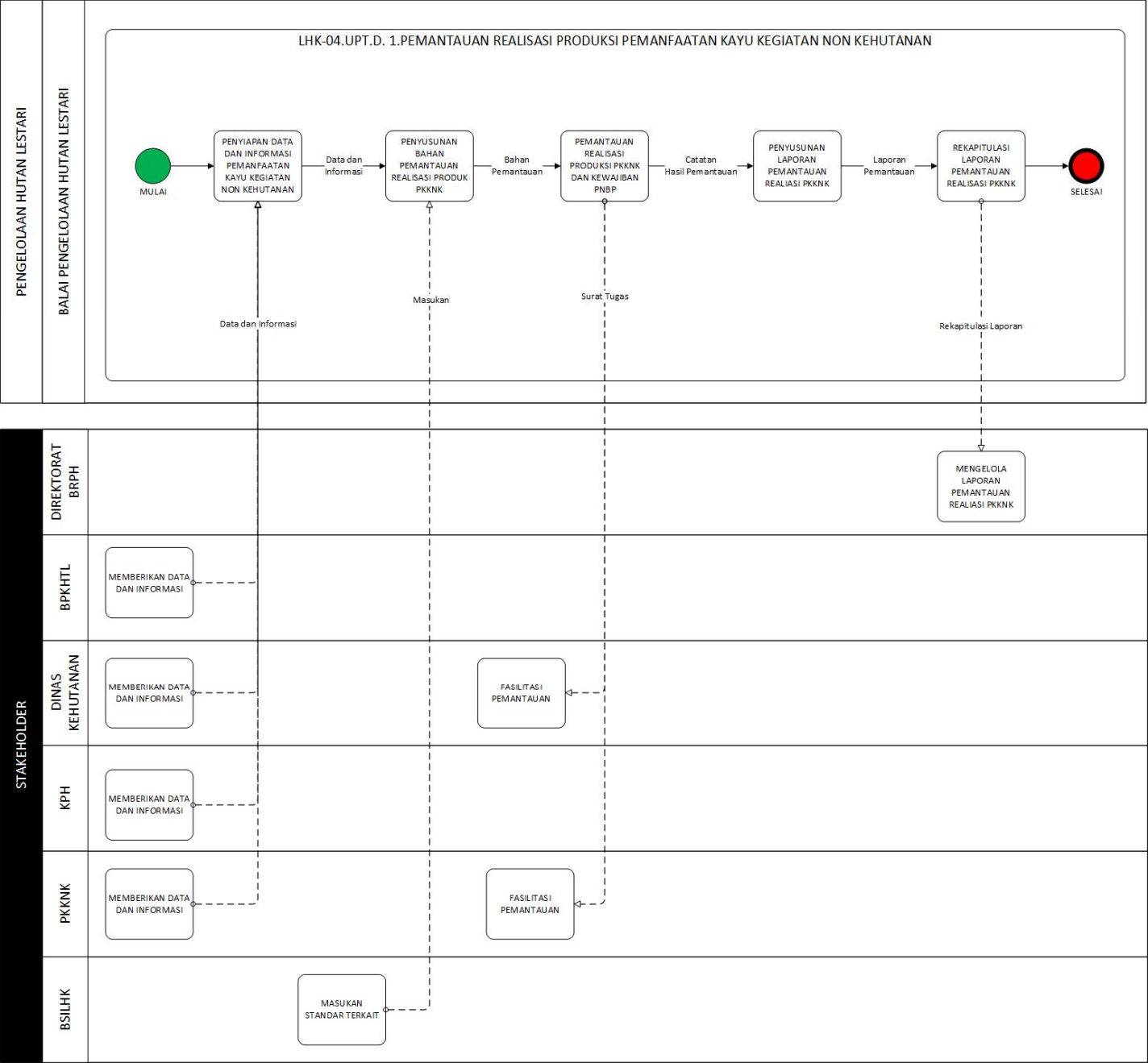
PROSES BISNIS LEVEL 3
LHK-04.UPT.D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI DI BIDANG USAHA PEMANFAATAN HUTAN

BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI	LHK-04. UPT.D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI DI BIDANG USAHA PEMANFAATAN HUTAN	<div>LHK-04.UPT.D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI DI BIDANG USAHA PEMANFAATAN HUTAN</div> <div><div>1. PEMANTAUAN REALISASI PRODUKSI PEMANFAATAN KAYU KEGIATAN NON KEHUTANAN</div><div>2. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PRODUKSI, PEMANFAATAN HUTAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN</div><div>3. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEMITRAAN DI PBPH</div><div>4. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA USAHA PEMANFAATAN HUTAN</div><div>5. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KINERJA MULTIUSAHA PEMANFAATAN HUTAN</div></div>
	FUNGSI LAINNYA	

STAKEHOLDER	INTERNAL	<div>DIREKTORAT BRPH</div> <div>DIREKTORAT PUPH</div>
	EKSTERNAL	<div>BPKHTL</div> <div>DINAS KEHUTANAN</div> <div>KPH</div> <div>PEMEGANG PBPH</div> <div>PKKNK</div>

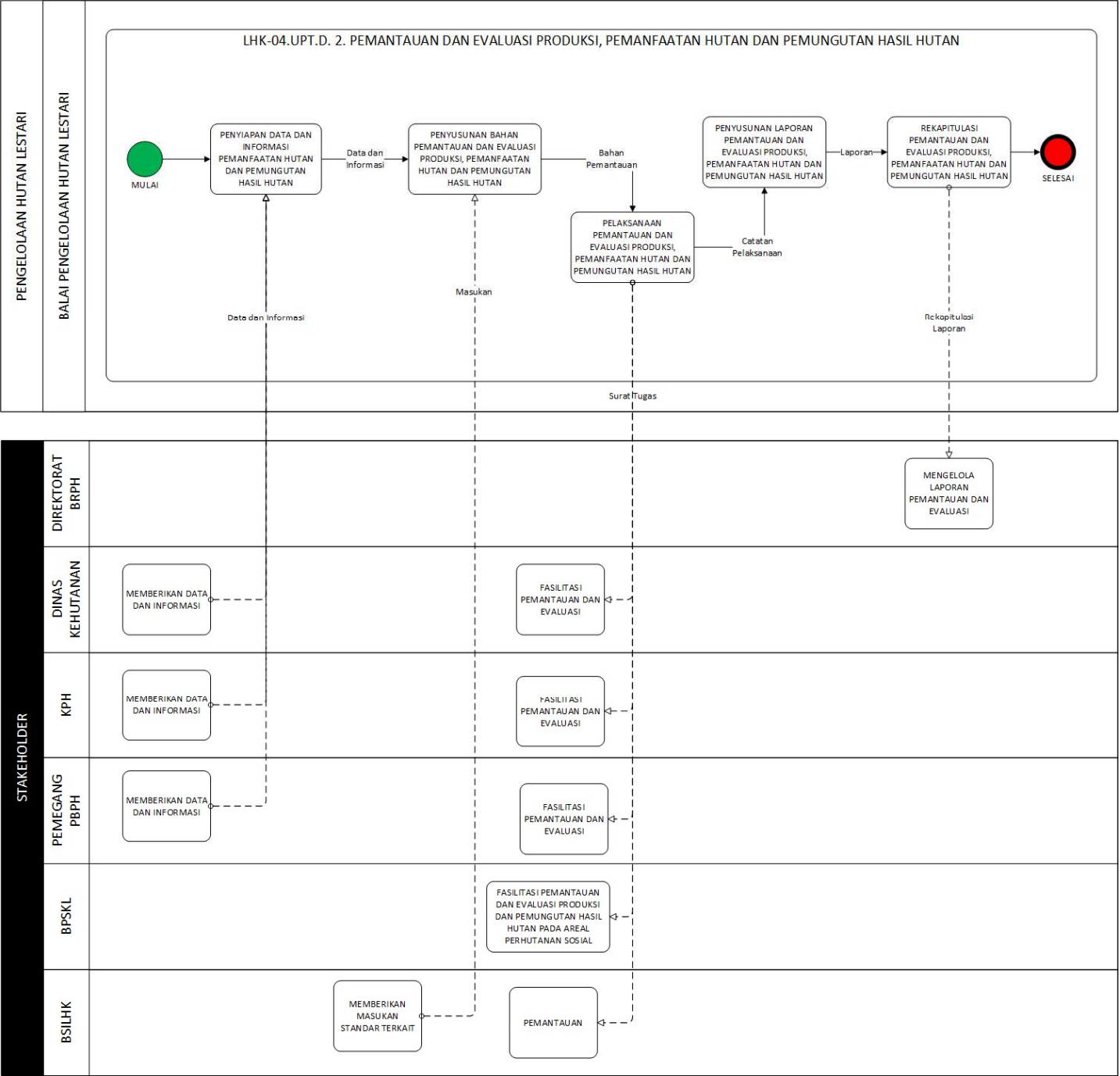
6.4.1 LHK-04.UPT.D.1. PEMANTAUAN REALISASI PRODUKSI PEMANFAATAN KAYU KEGIATAN NON KEHUTANAN

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.D. 1.PEMANTAUAN REALISASI PRODUKSI PEMANFAATAN KAYU KEGIATAN NON KEHUTANAN



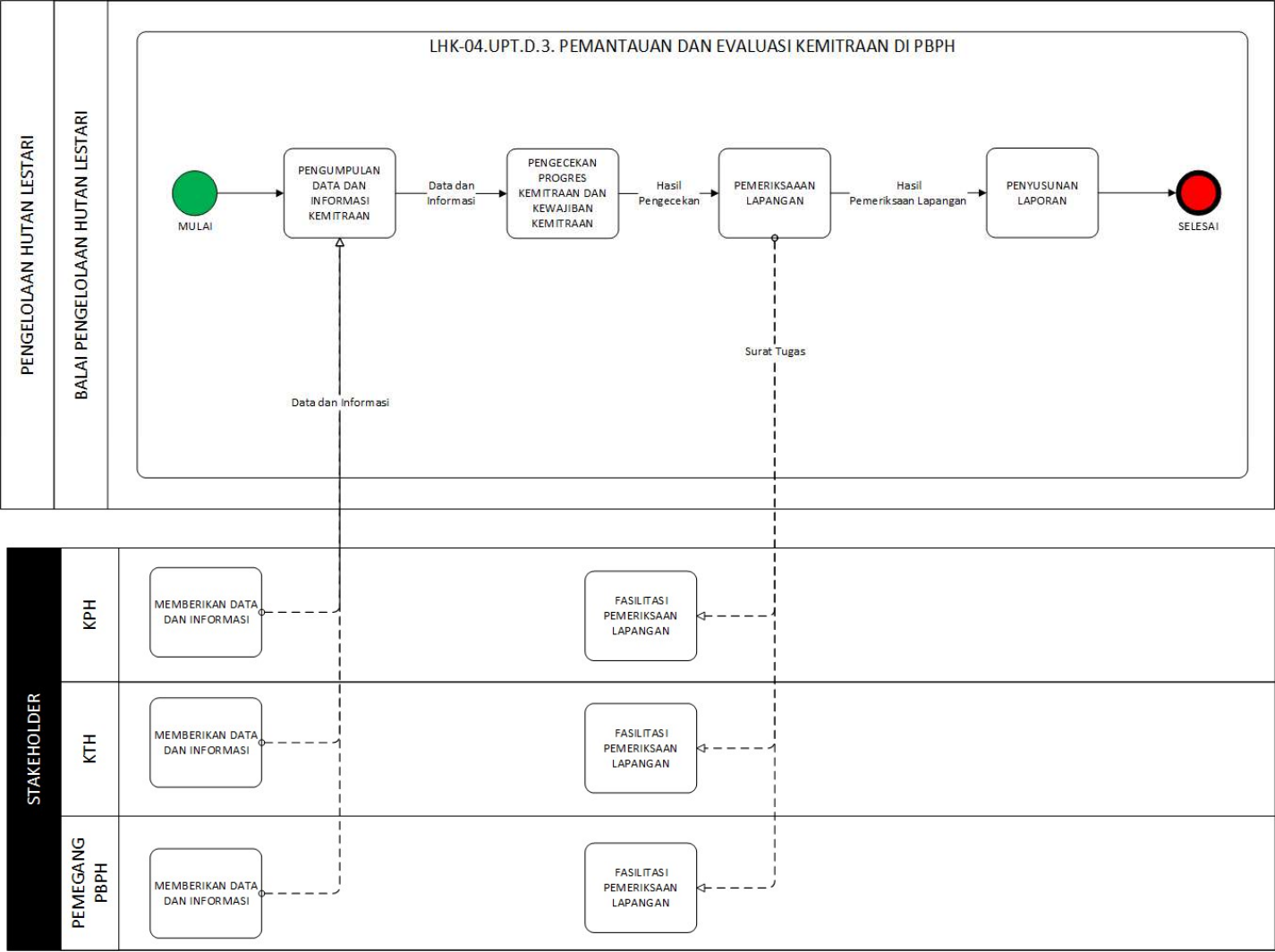
6.4.2 LHK-04.UPT.D.2. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PRODUKSI, PEMANFAATAN HUTAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.D. 2. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PRODUKSI, PEMANFAATAN HUTAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN



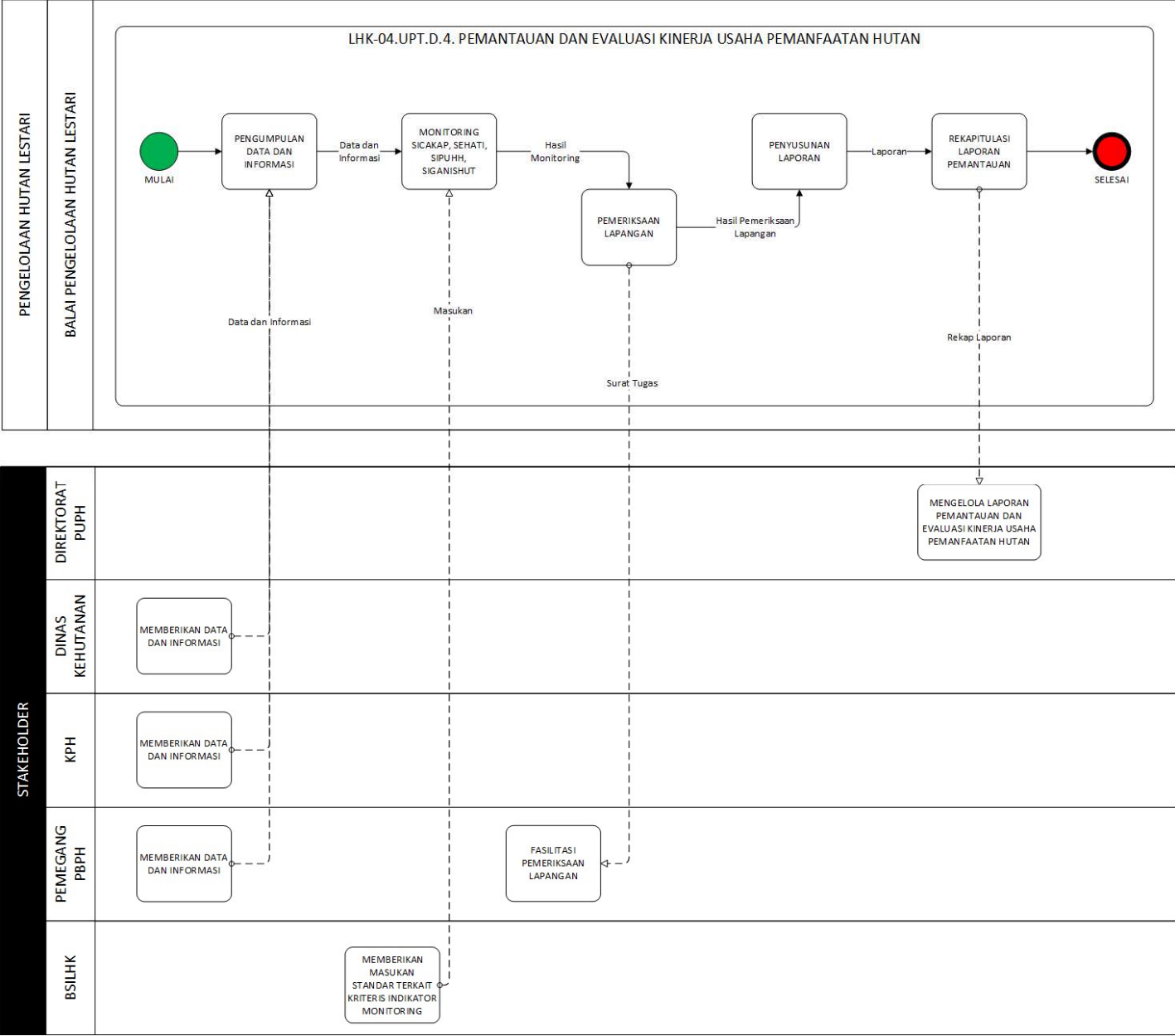
6.4.3 LHK-04.UPT.D.3. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEMITRAAN DI PBPH

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.D.3. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEMITRAAN DI PBPH

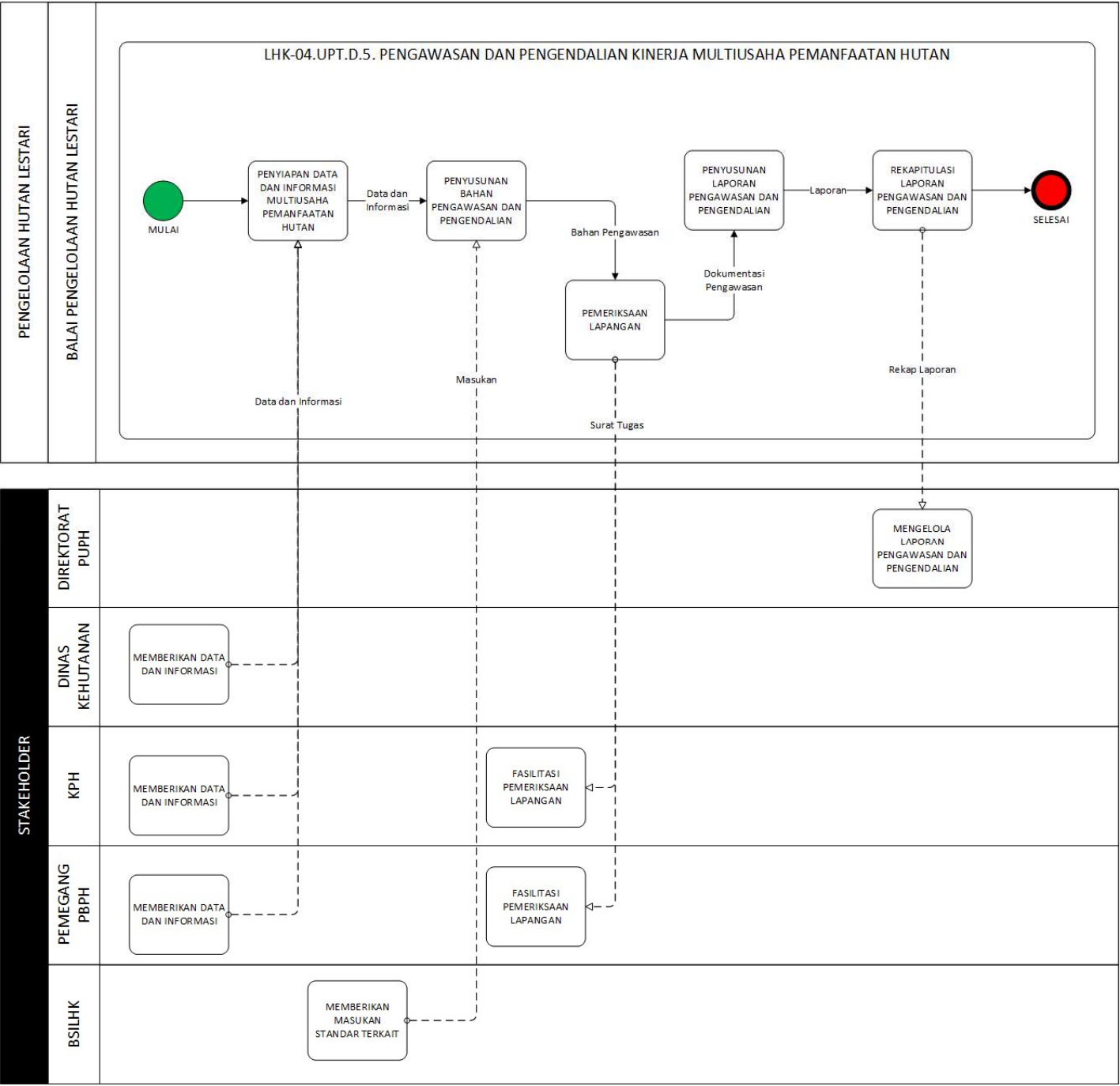


6.4.4 LHK-04.UPT.D.4. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA USAHA PEMANFAATAN HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.D.4. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA USAHA PEMANFAATAN HUTAN

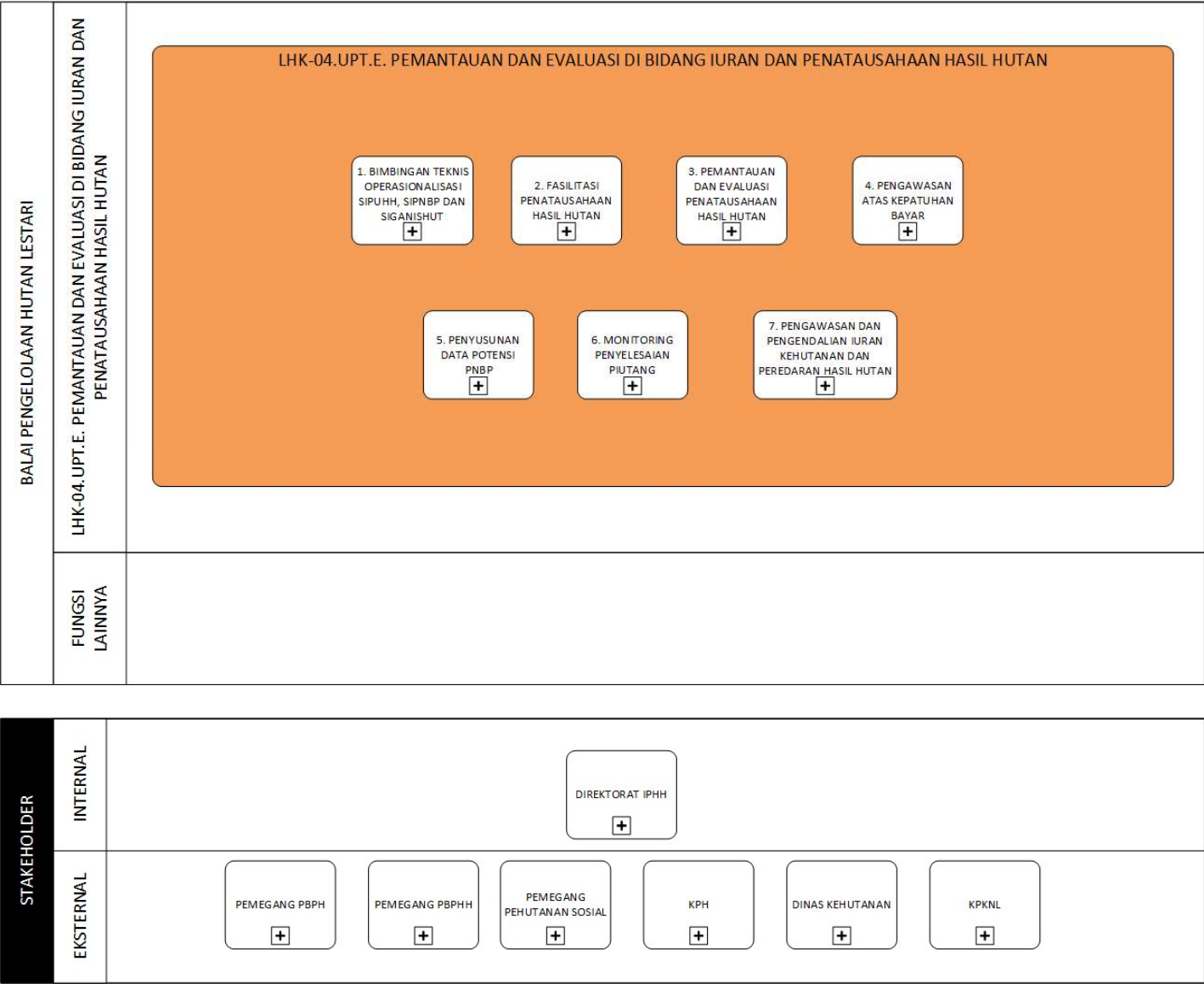


6.4.5 LHK-04.UPT.D.5. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN USAHA PEMANFAATAN HUTAN



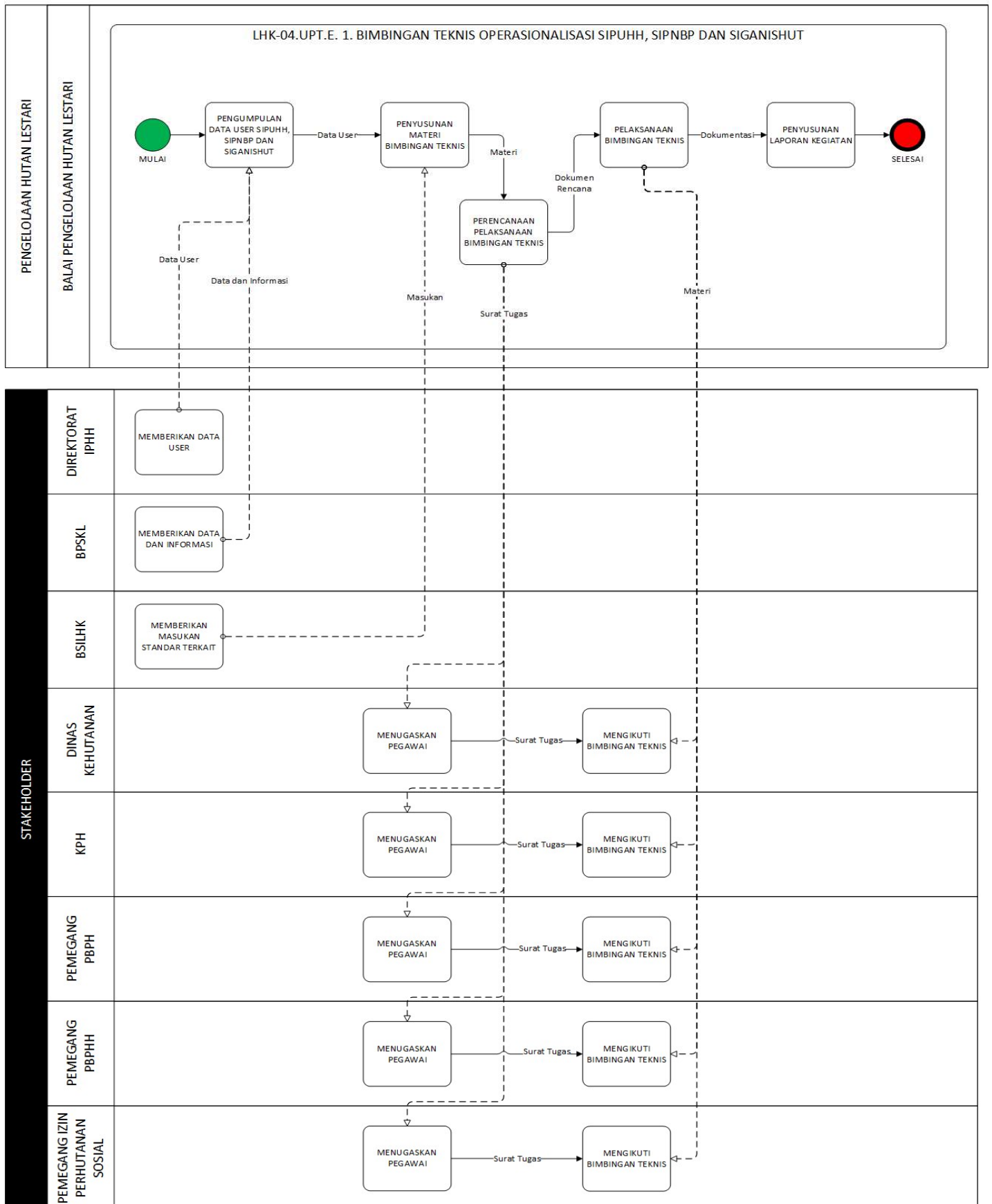
6.5 LHK-04.UPT.E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI DI BIDANG IURAN DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 3
LHK-04.UPT.E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI DI BIDANG IURAN DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN



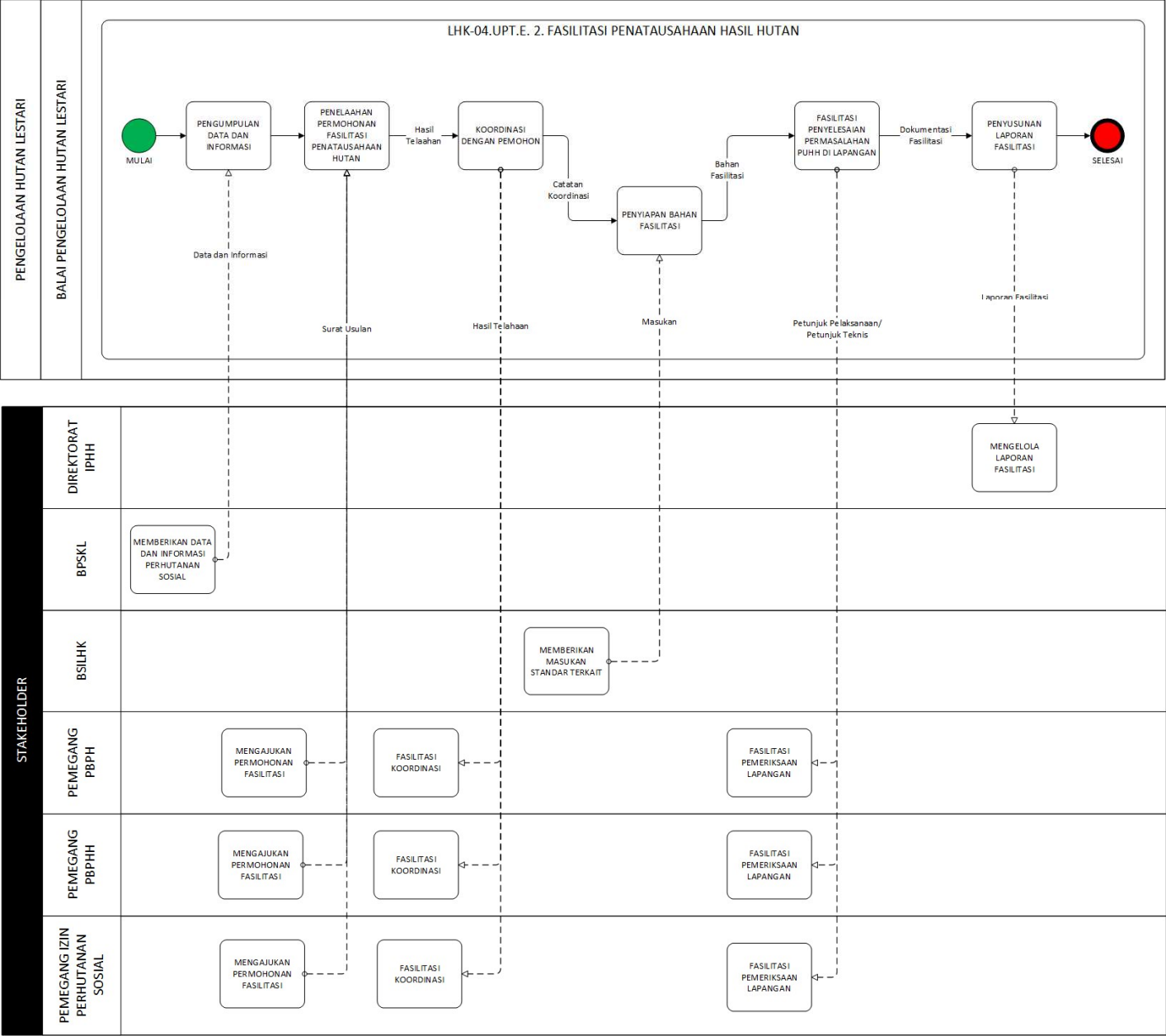
6.5.1 LHK-04.UPT.E.1. BIMBINGAN TEKNIS TATA CARA OPERASIONALISASI SIPUHH, SIPNBP DAN SIGANISHUT

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.E. 1. BIMBINGAN TEKNIS OPERASIONALISASI SIPUHH, SIPNBP DAN SIGANISHUT



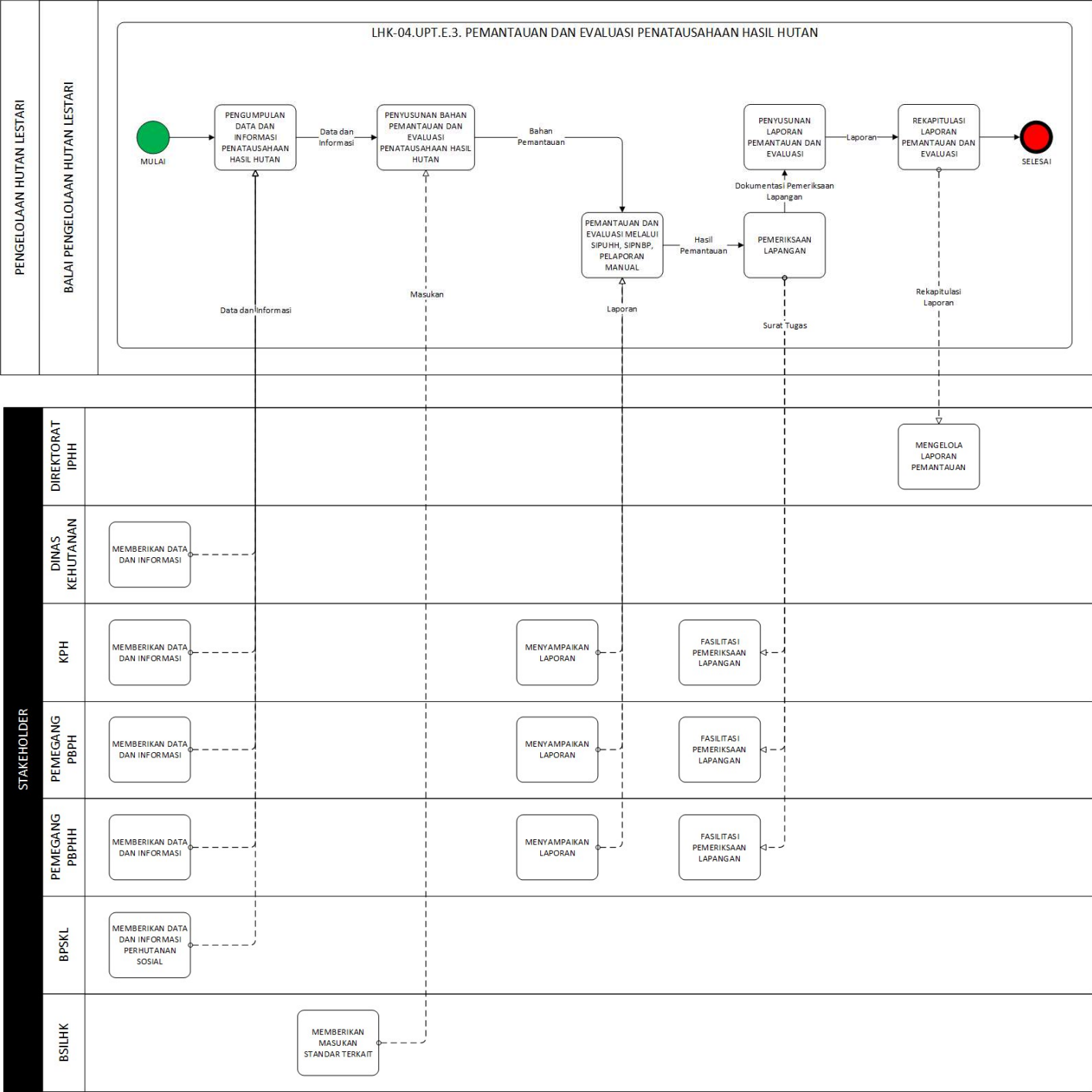
6.5.2 LHK-04.UPT.E.2. FASILITASI PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.E. 2. FASILITASI PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN



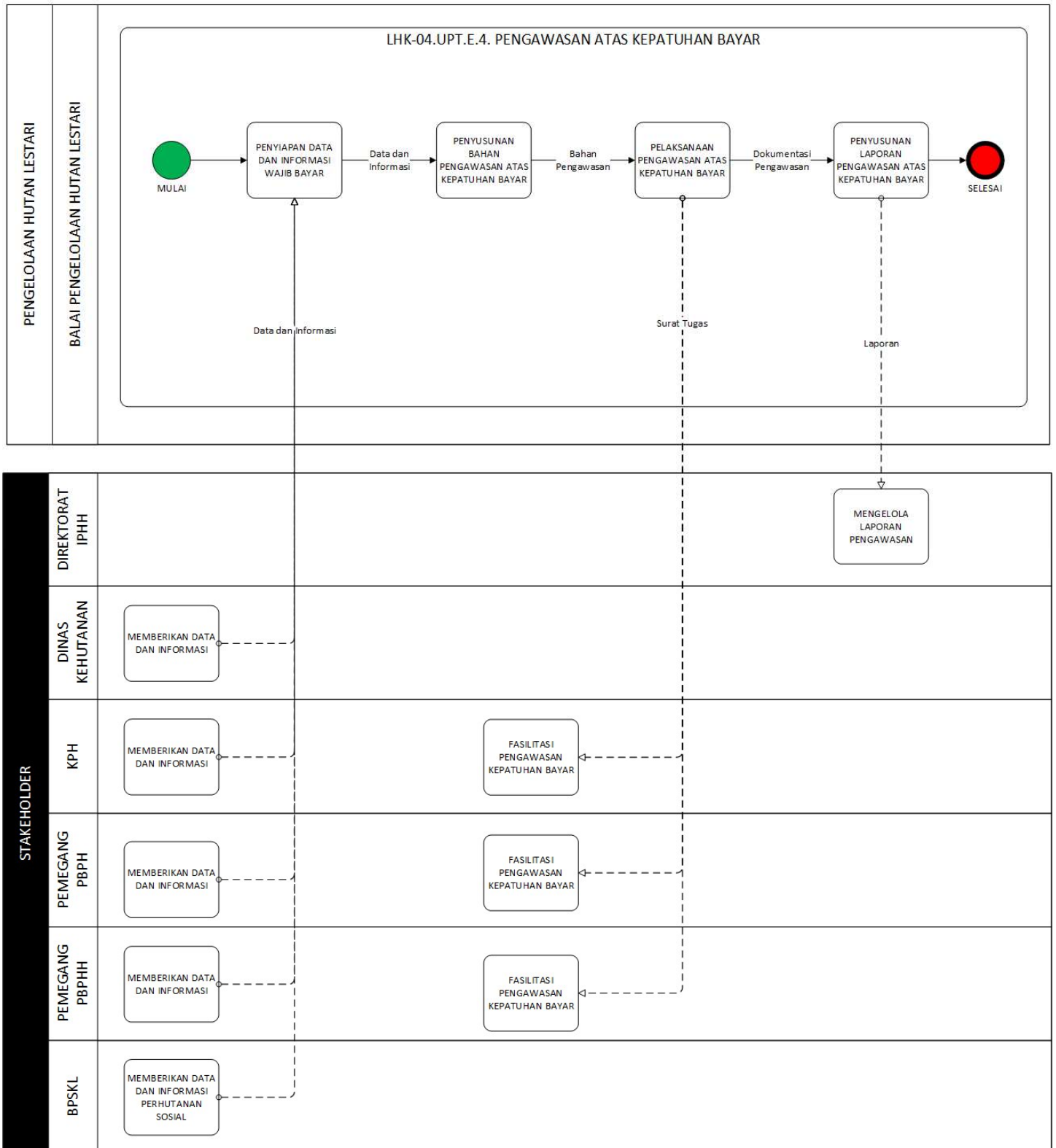
6.5.3 LHK-04.UPT.E.3. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.E.3. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN



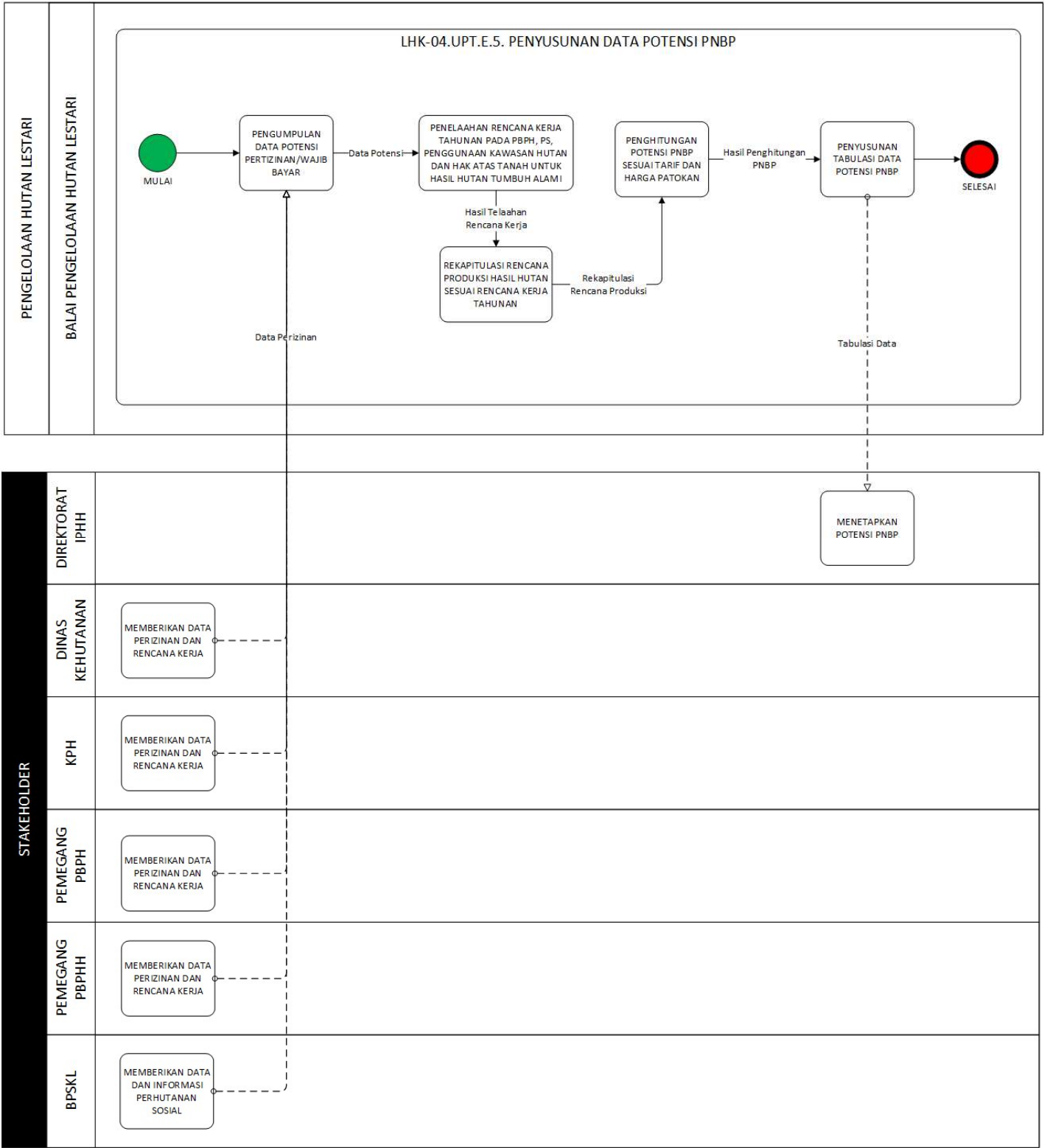
6.5.4 LHK-04.UPT.E.4. PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN BAYAR

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.E.4. PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN BAYAR



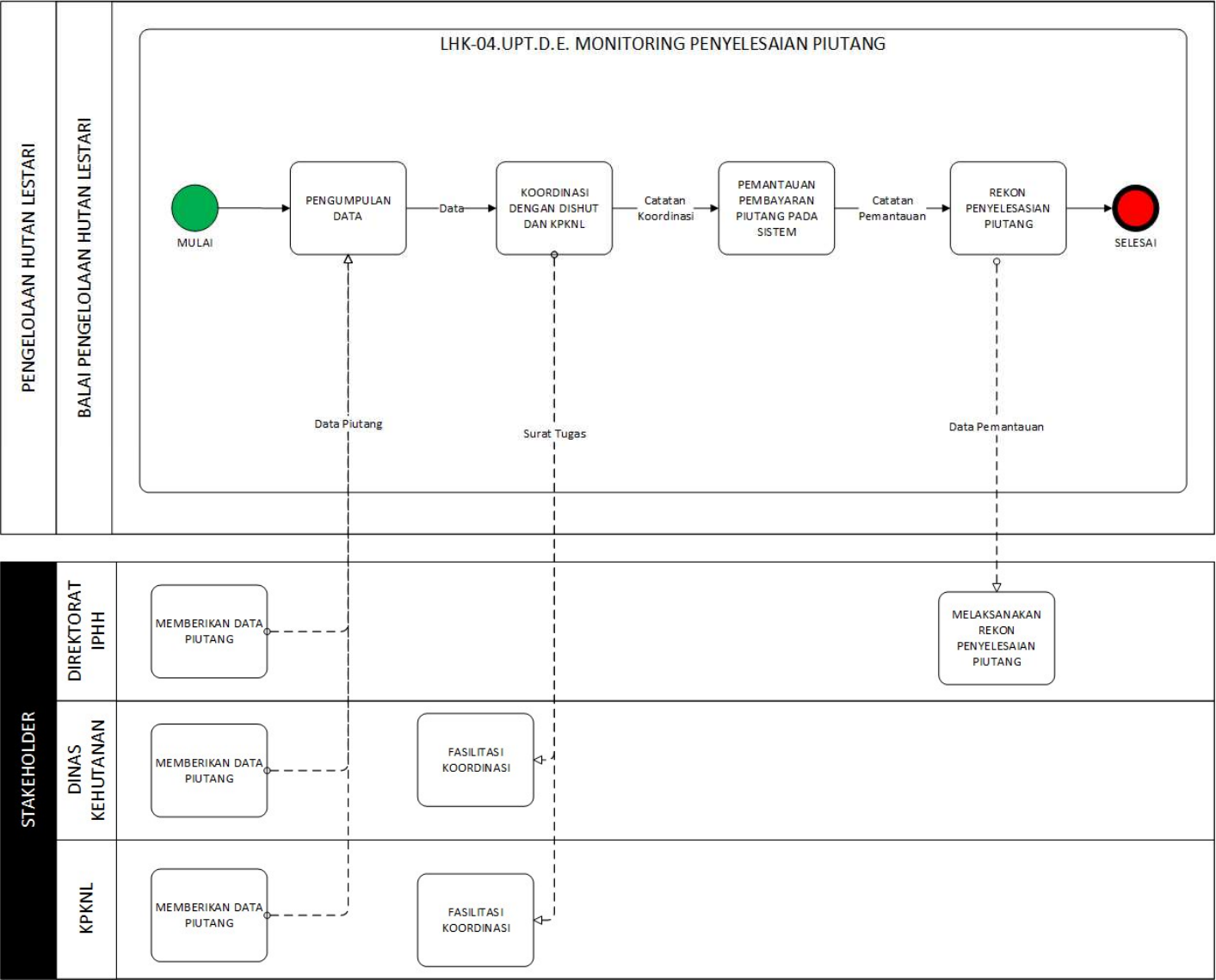
6.5.5 LHK-04.UPT.E.5. PENYUSUNAN DATA POTENSI PNB

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.E.5. PENYUSUNAN DATA POTENSI PNBP



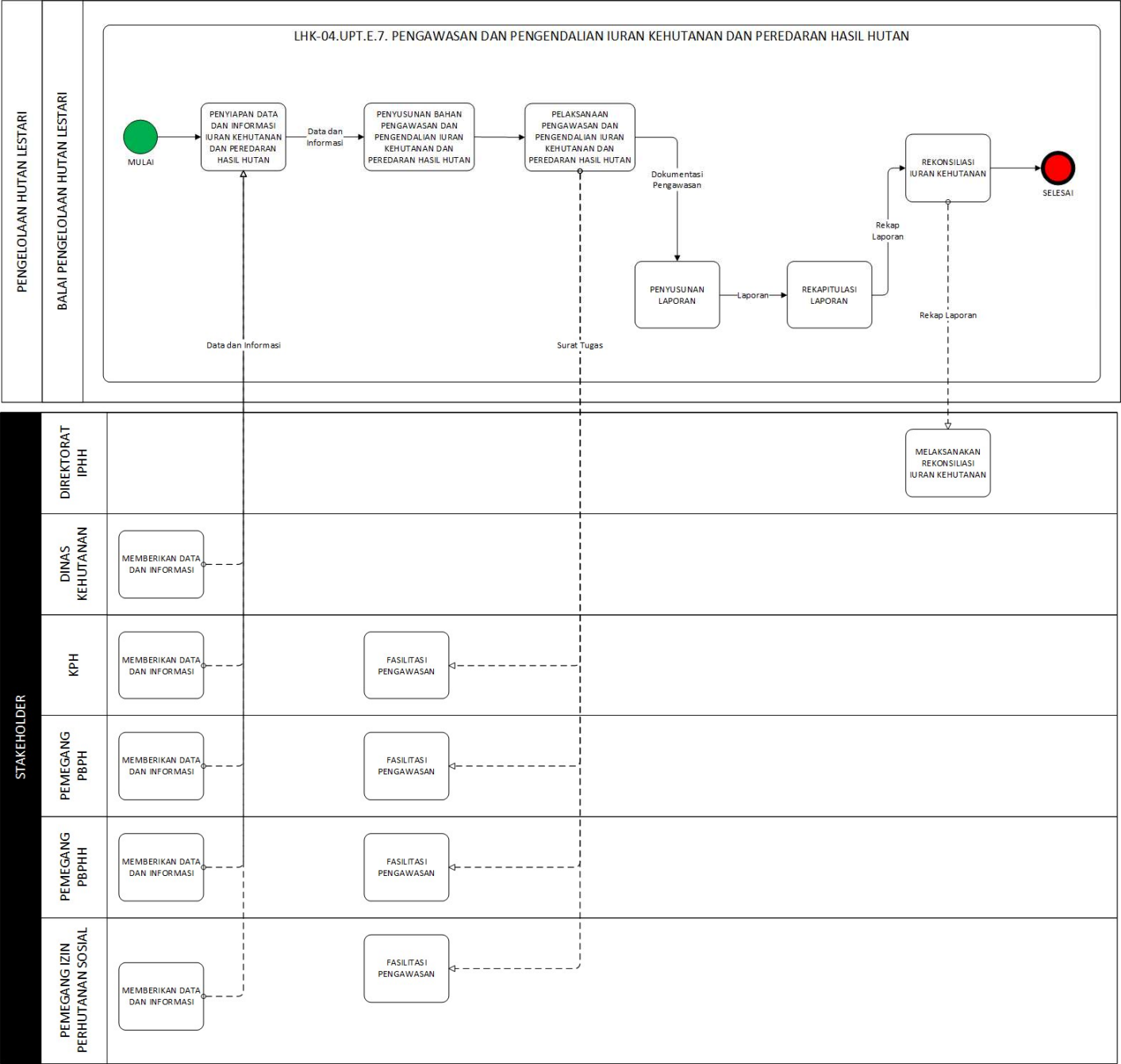
6.5.6 LHK-04.UPT.E.6. MONITORING PENYELESAIAN PIUTANG

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.D.E. MONITORING PENYELESAIAN PIUTANG



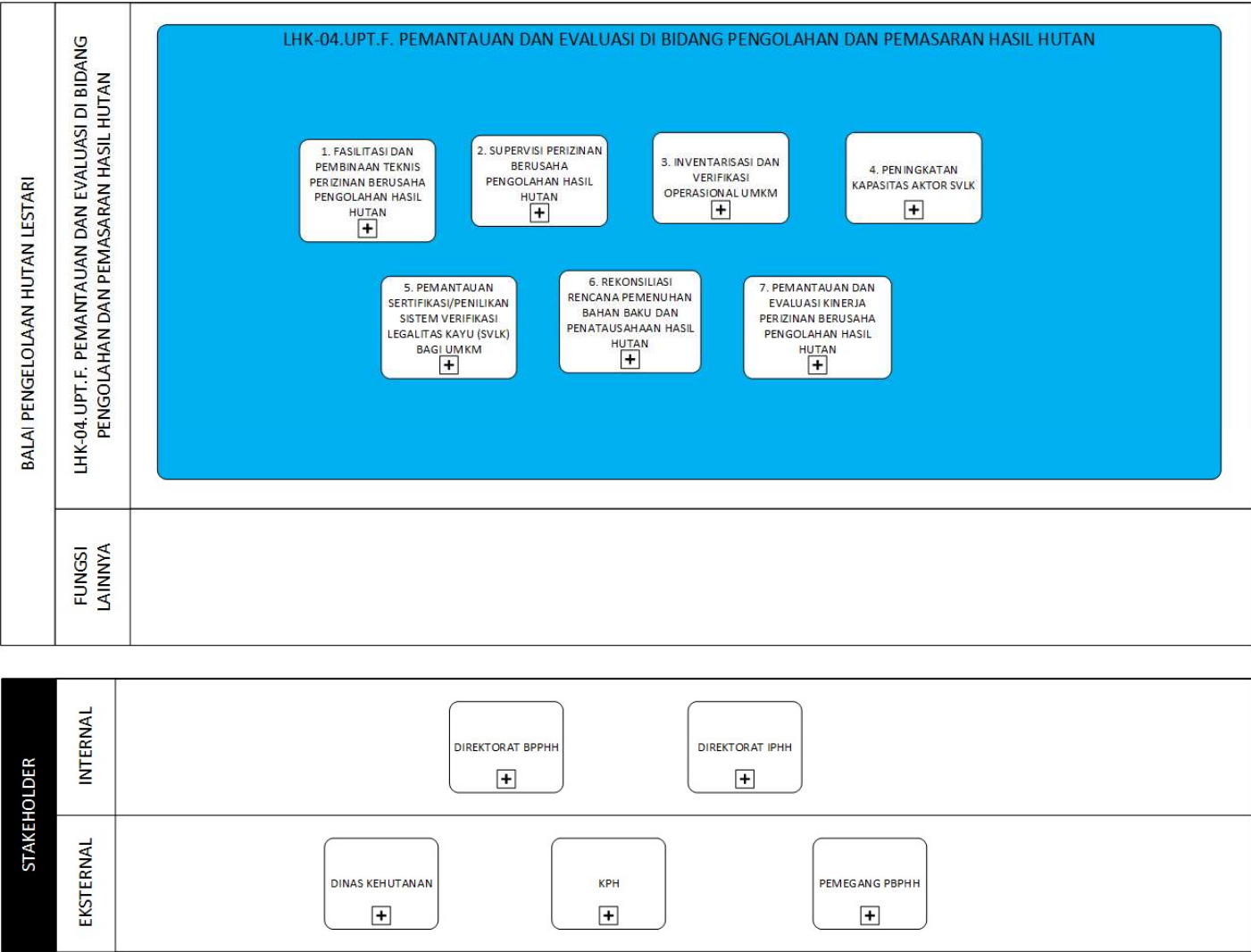
6.5.7 LHK-04.UPT.E.7. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IURAN KEHUTANAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.E.7. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IURAN KEHUTANAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN



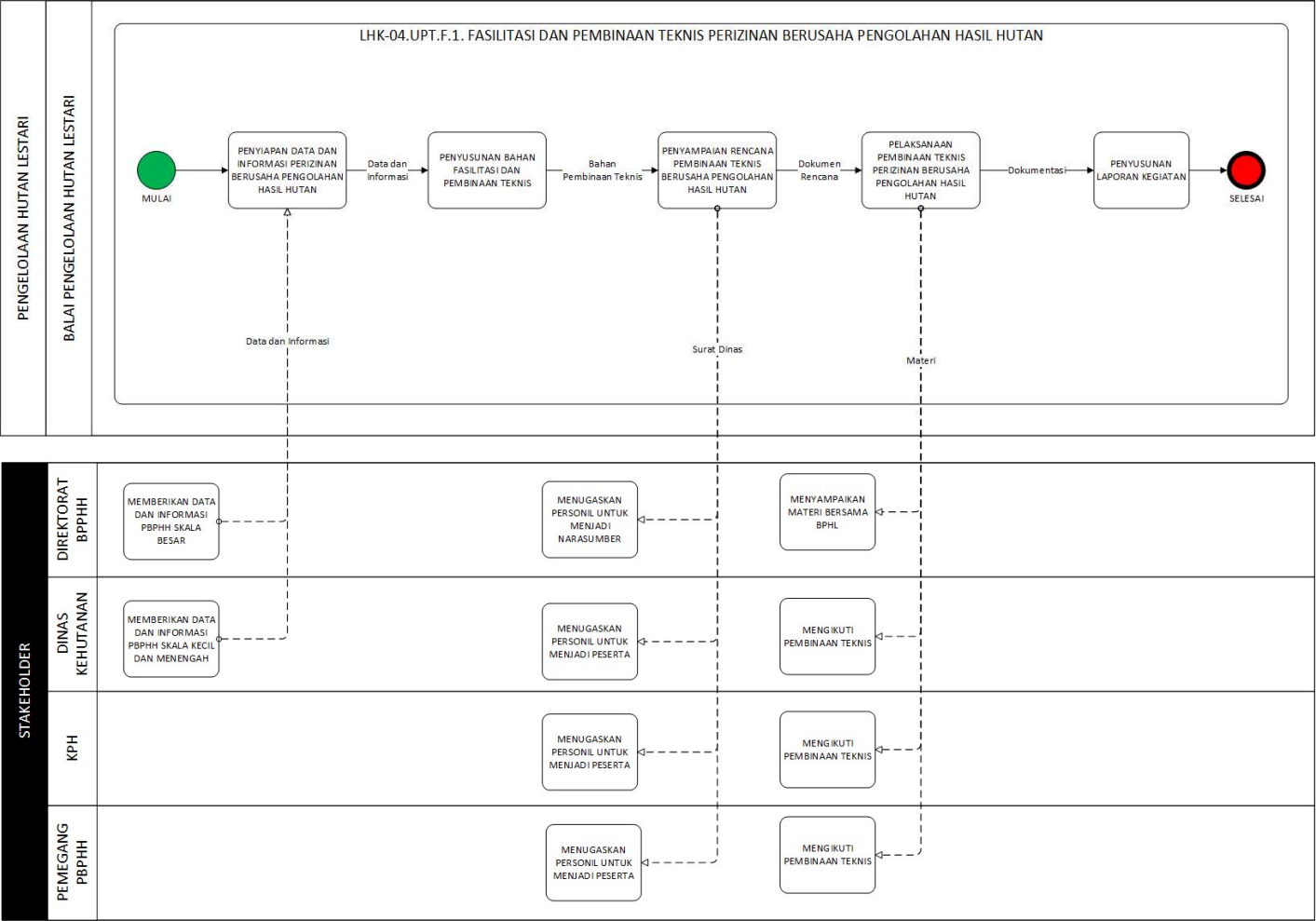
6.6 LHK-04.UPT.F. PEMANTAUAN DAN EVALUASI DI BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 3
LHK-04.UPT.F. PEMANTAUAN DAN EVALUASI DI BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN



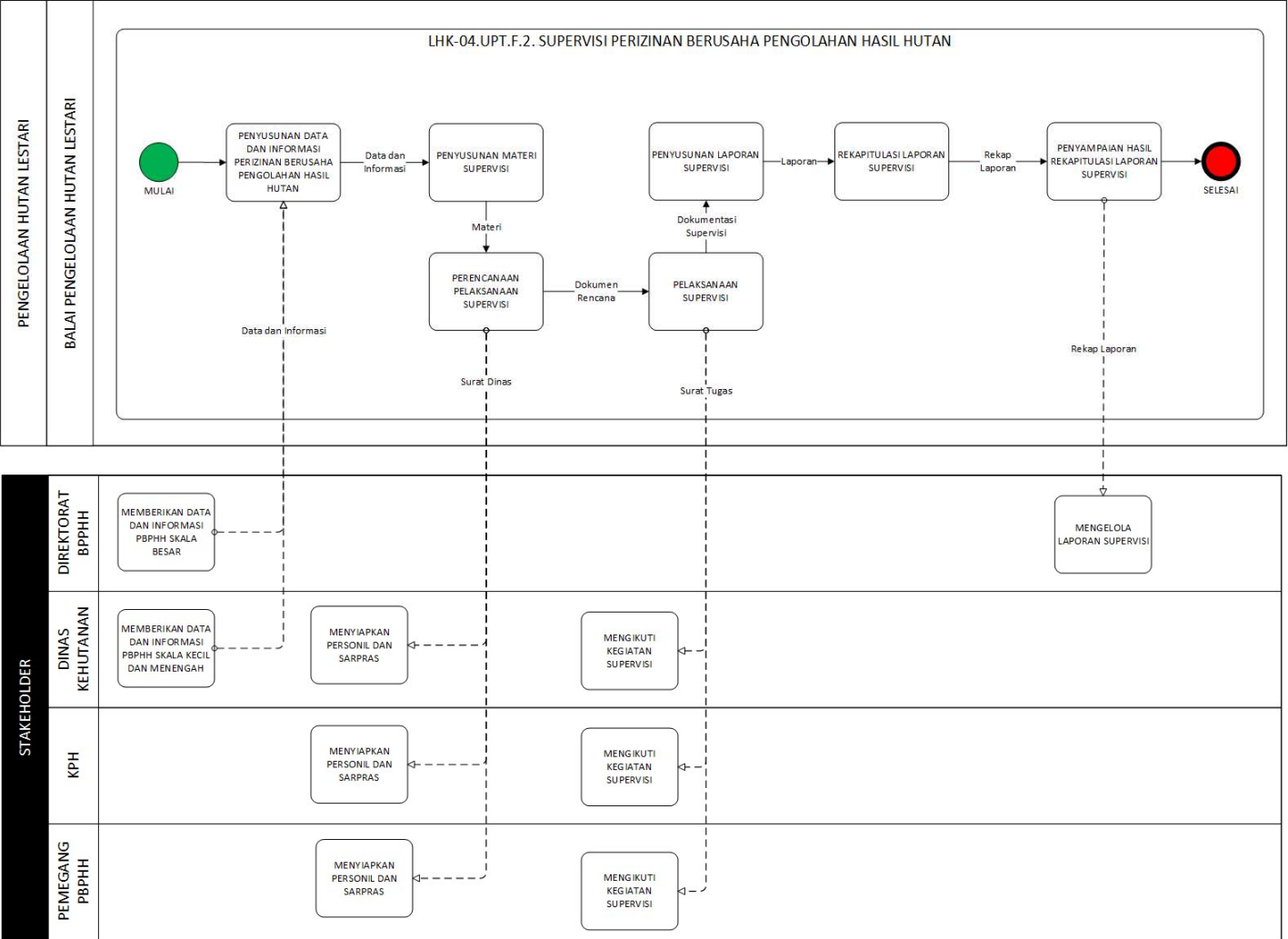
6.6.1 LHK-04.UPT.F.1. FASILITASI DAN PEMBINAAN TEKNIS PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.F.1. FASILITASI DAN PEMBINAAN TEKNIS PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN



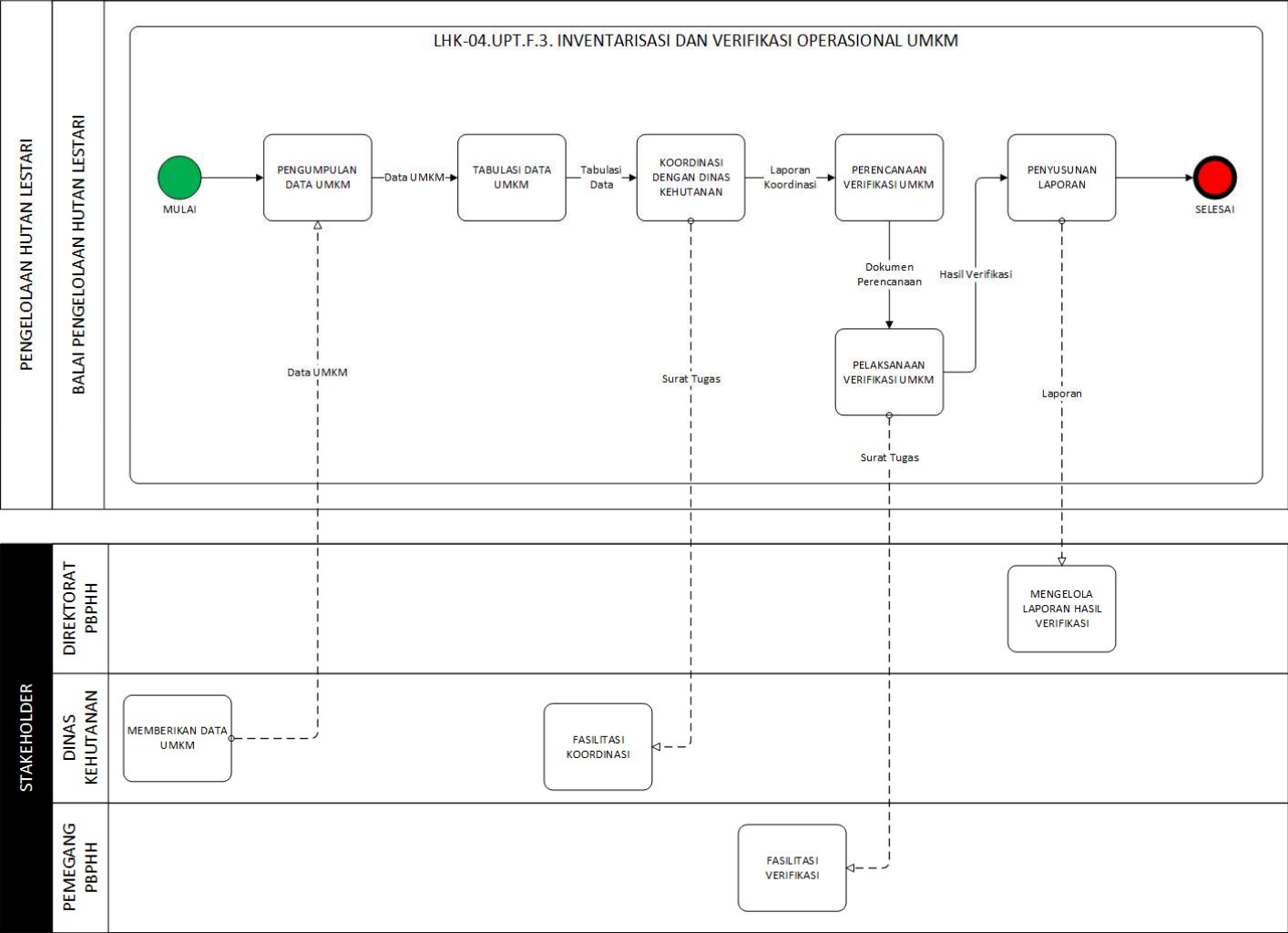
6.6.2 LHK-04.UPT.F.2. SUPERVISI PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.F.2. SUPERVISI PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN



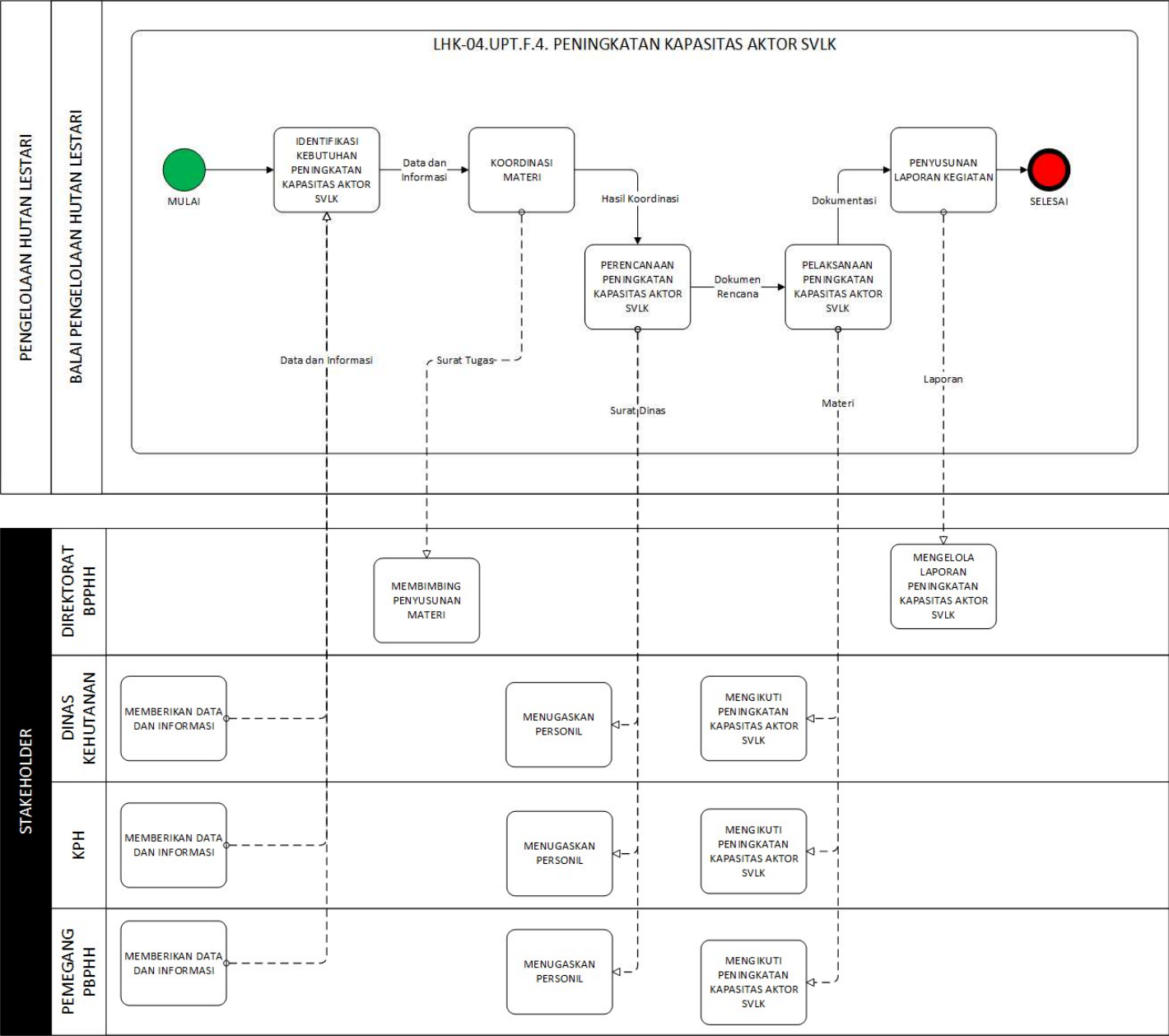
6.6.3 LHK-04.UPT.F.3. INVENTARISASI DAN VERIFIKASI UMKM

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.F.3. INVENTARISASI DAN VERIFIKASI OPERASIONAL UMKM



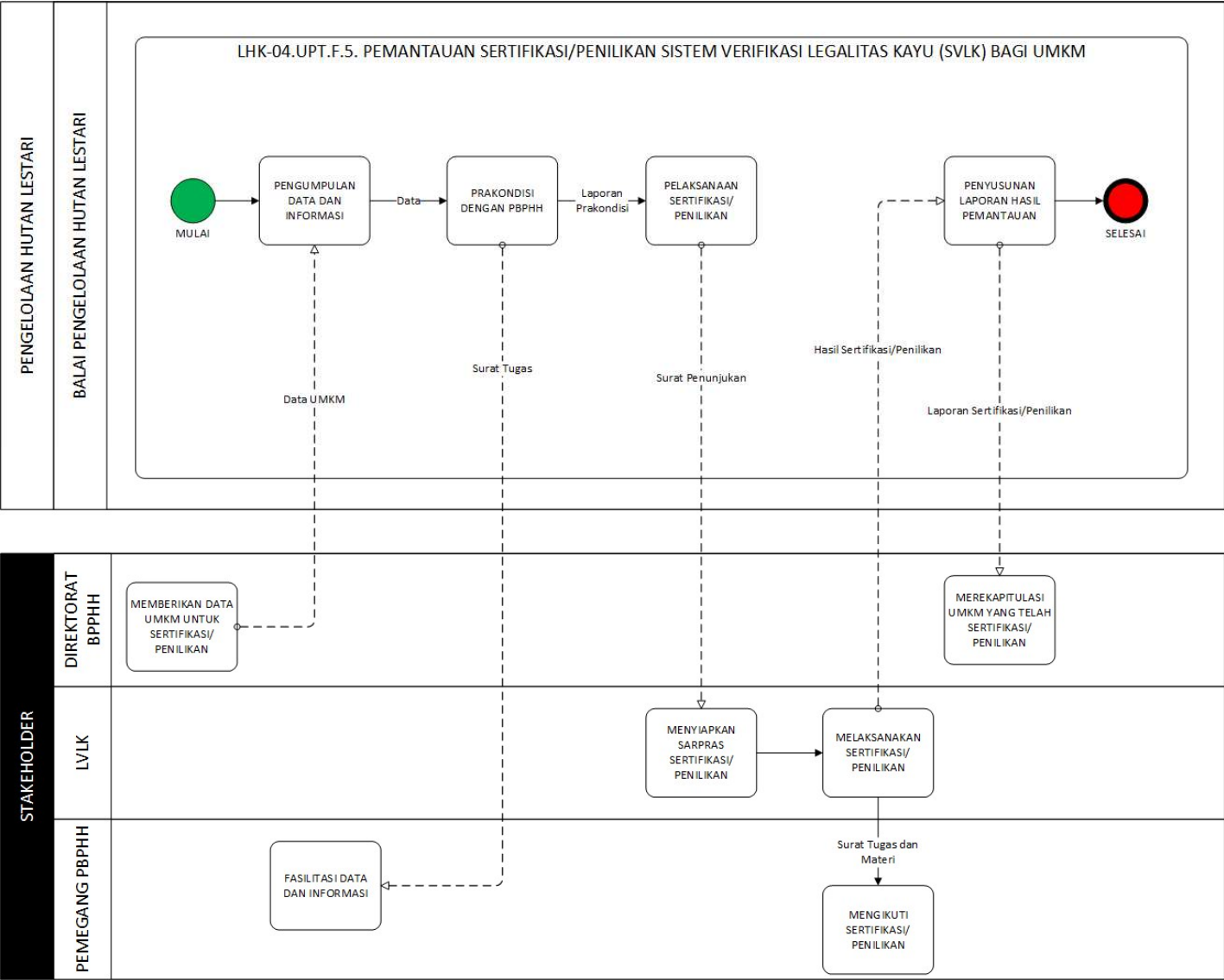
6.6.4 LHK-04.UPT.F.4. PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR SVLK

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.F.4. PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR SVLK



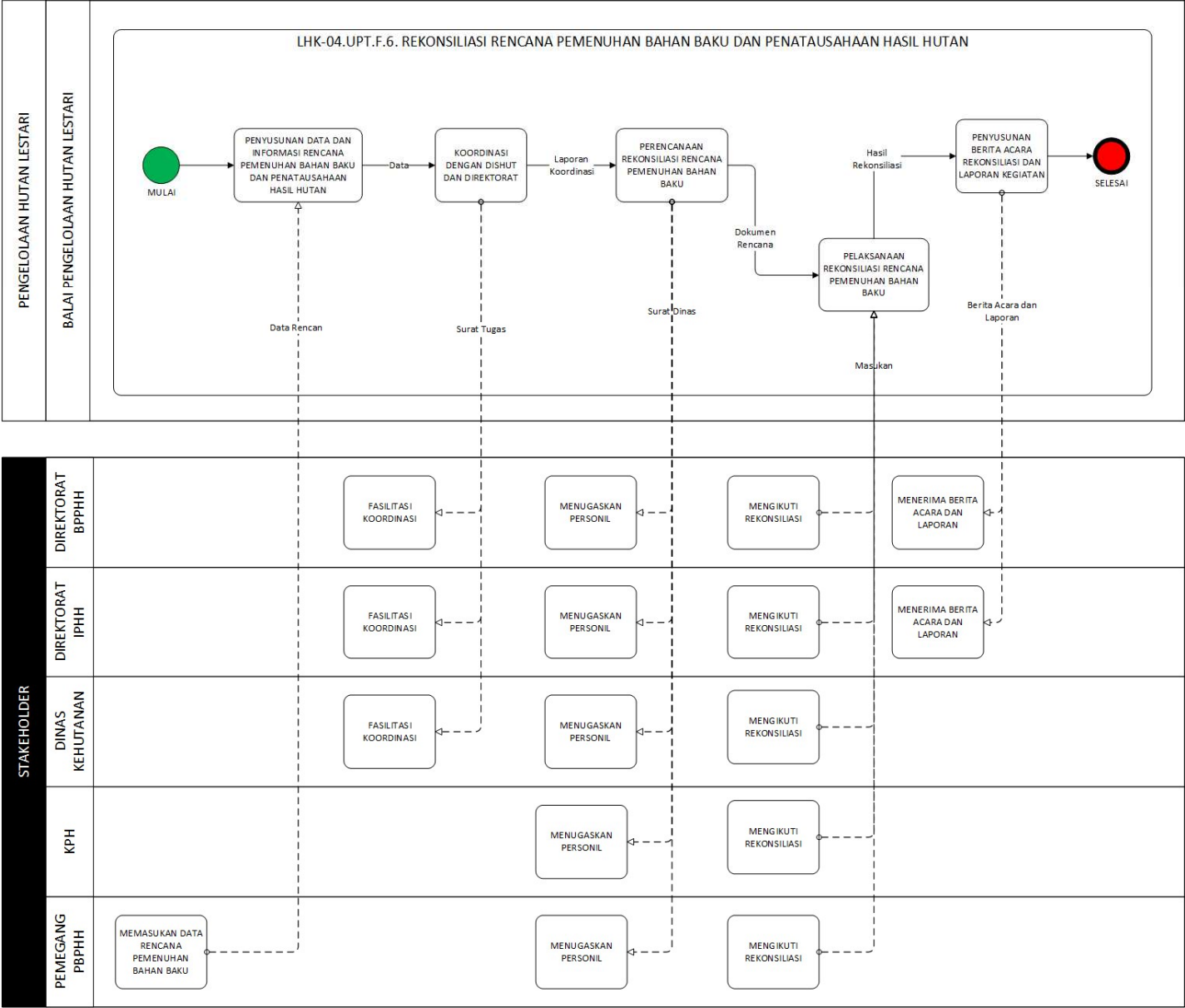
6.6.5 LHK-04.UPT.F.5. PEMANTAUAN SERTTIFIKASI/PENILIKAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) BAGI UMKM

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.F.5. PEMANTAUAN SERTTIFIKASI/PENILIKAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) BAGI UMKM



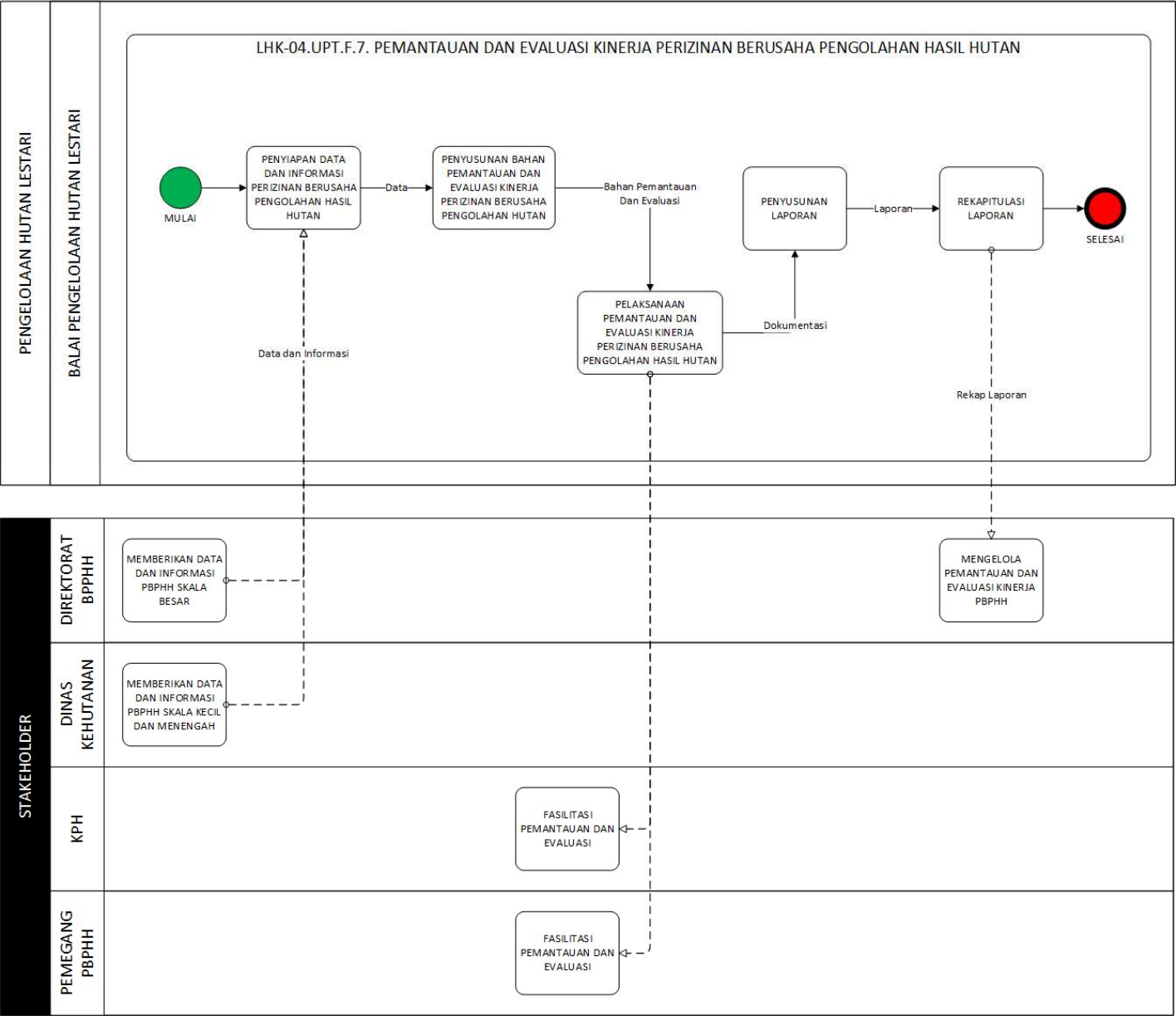
6.6.6 LHK-04.UPT.F.6. REKONSILIASI RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU DAN PENATAUSAHAN HASIL HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.F.6. REKONSILIASI RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU DAN PENATAUSAHAN HASIL HUTAN



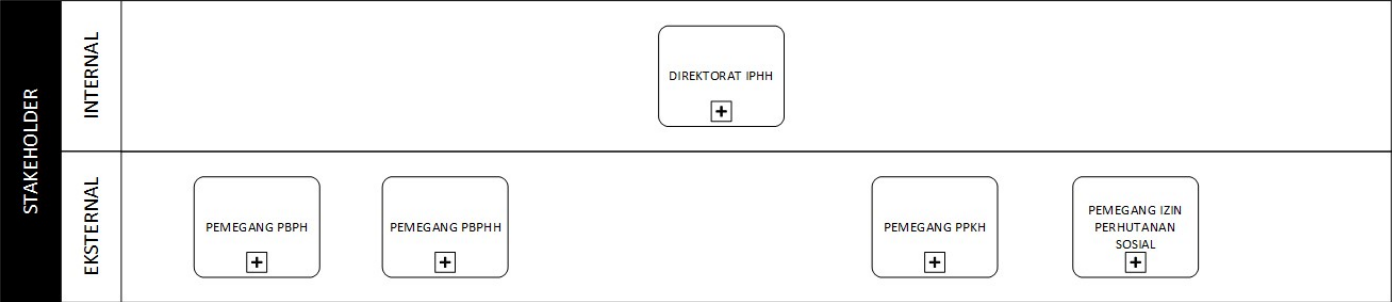
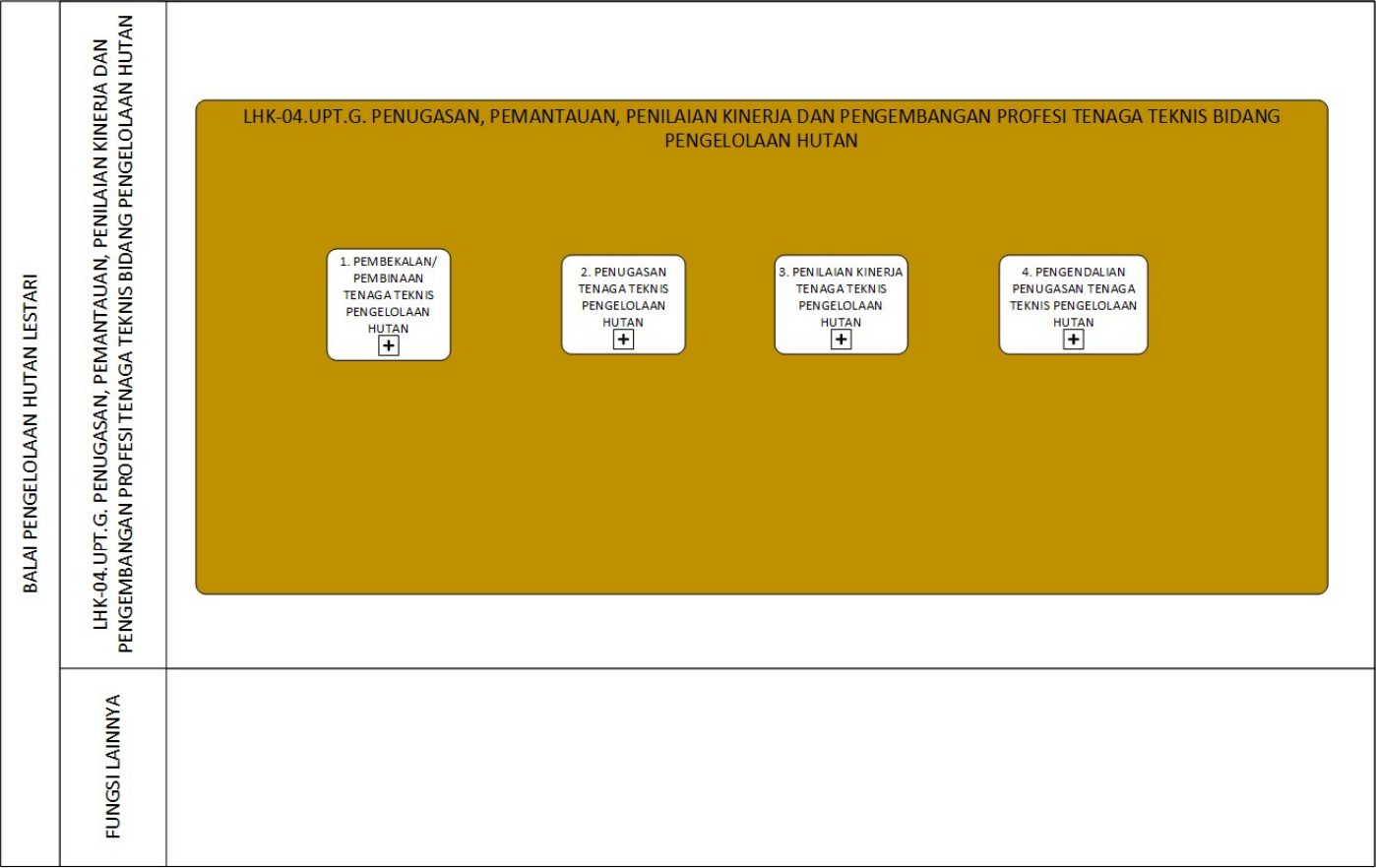
6.6.7 LHK-04.UPT.F.7. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.F.7. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN



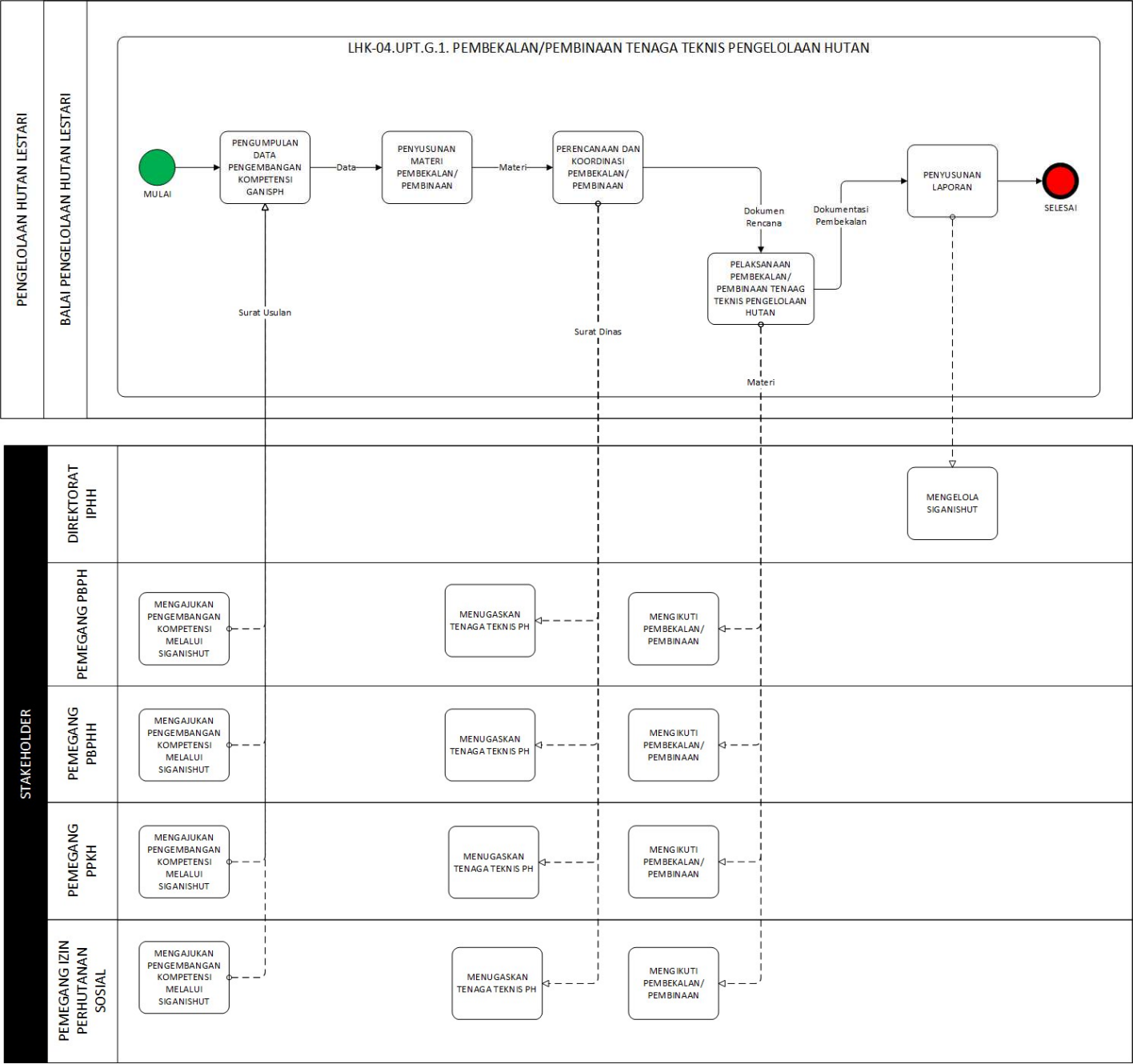
6.7 LHK-04.UPT.G. PENUGASAN, PEMANTAUAN, PENILAIAN KINERJA DAN PENGEMBANGAN PROFESI TENAGA TEKNIS BIDANG PENGELOLAAN HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 3
LHK-04.UPT.G. PENUGASAN, PEMANTAUAN, PENILAIAN KINERJA DAN PENGEMBANGAN PROFESI TENAGA TEKNIS BIDANG PENGELOLAAN HUTAN



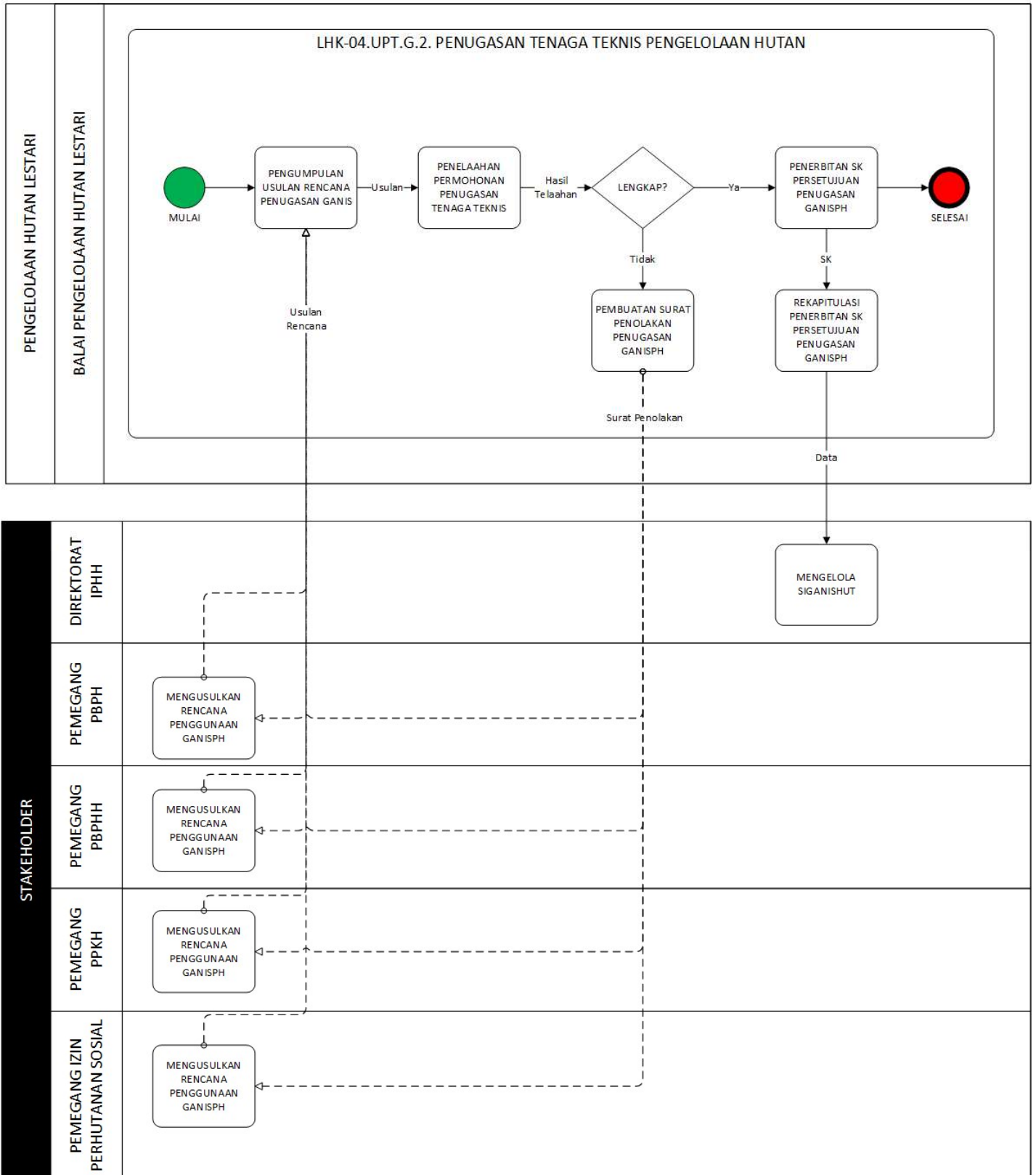
6.7.1 LHK-04.UPT.G.1. PEMBEKALAN/PEMBINAAN TEKNIS TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.G.1. PEMBEKALAN/PEMBINAAN TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN



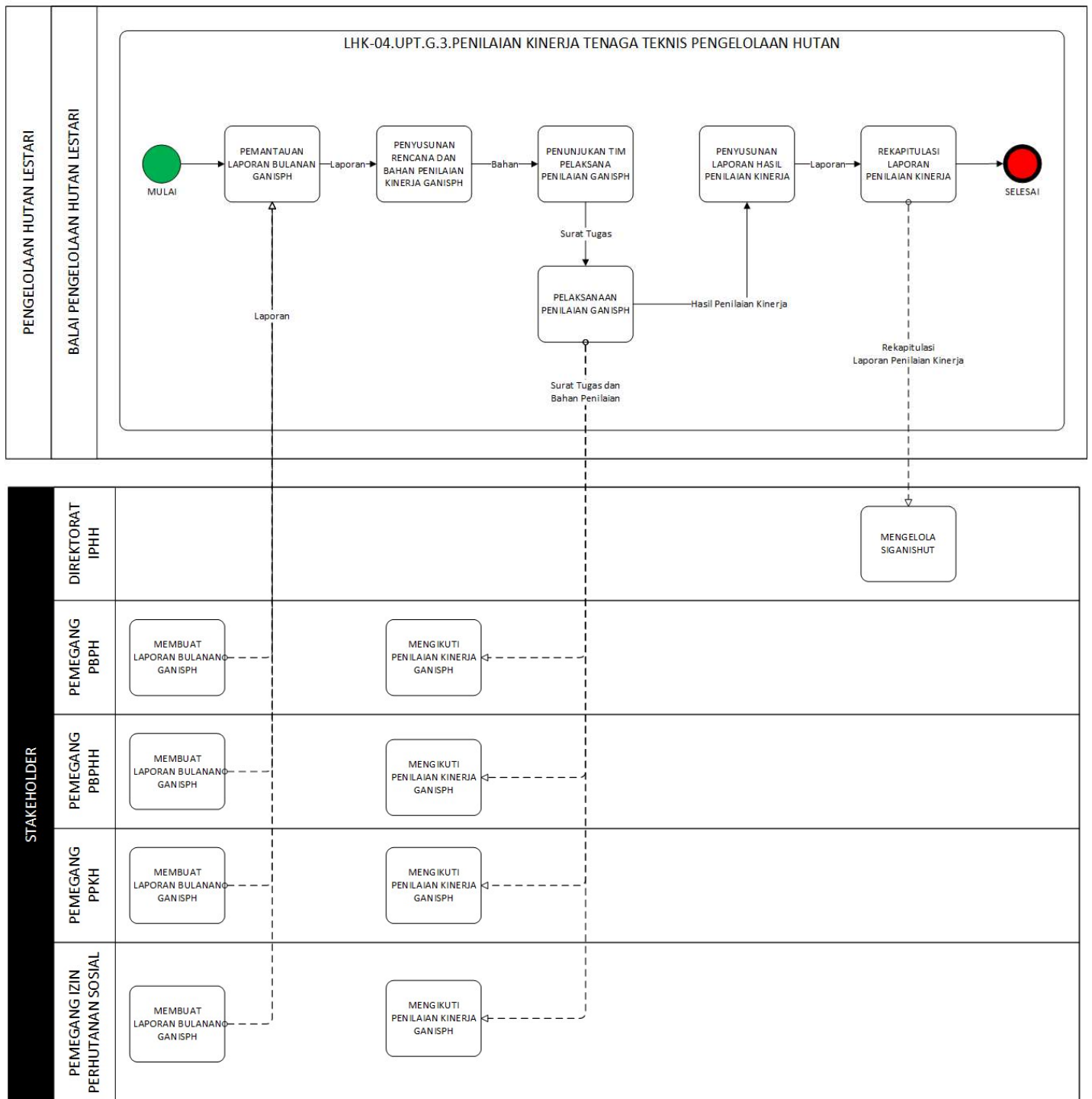
6.7.2 LHK-04.UPT.G.2. PENUGASAN TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.G.2. PENUGASAN TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN



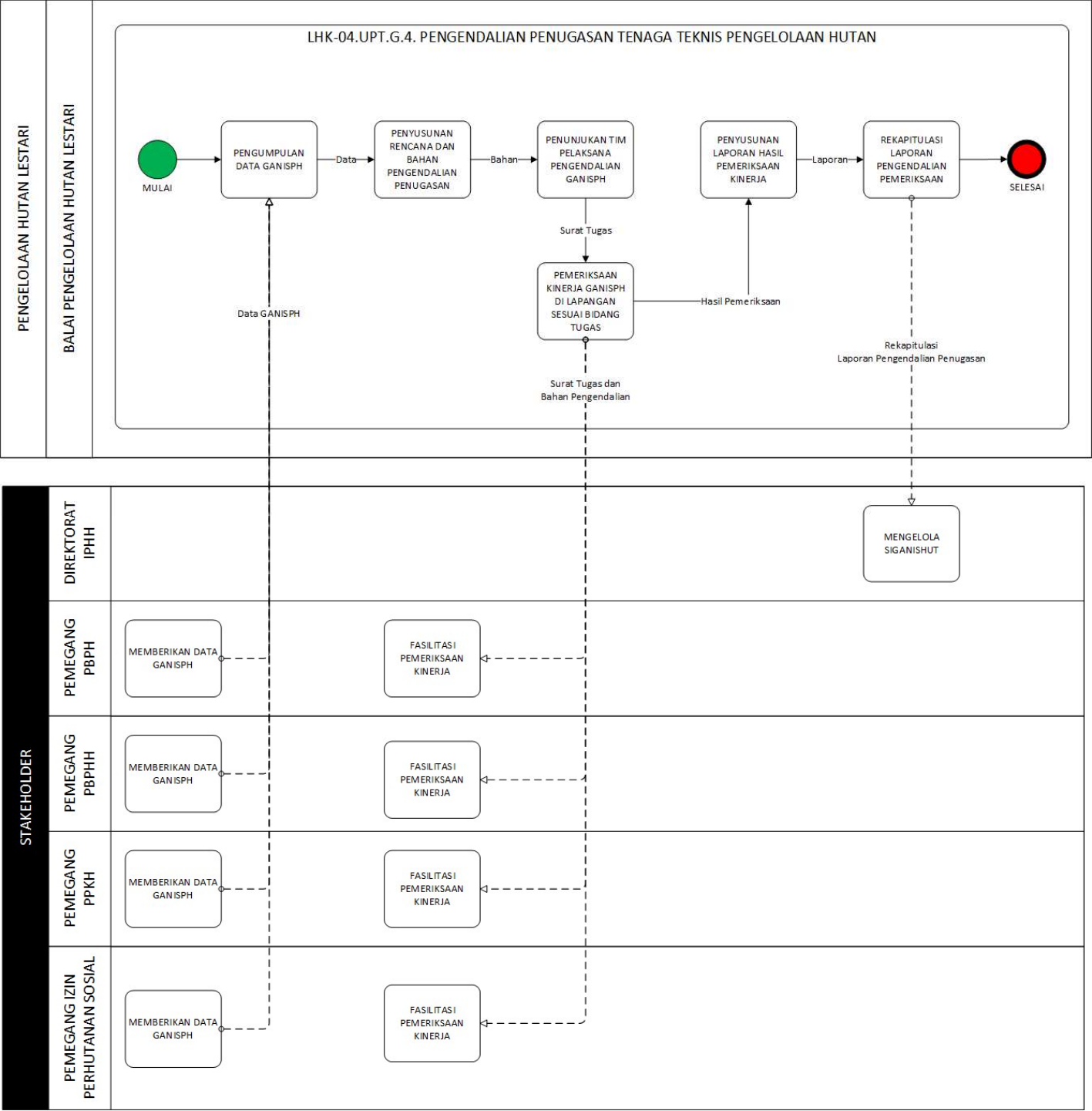
6.7.3 LHK-04.UPT.G.3. PENILAIAN KINERJA TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 4 LHK-04.UPT.G.3.PENILAIAN KINERJA TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN

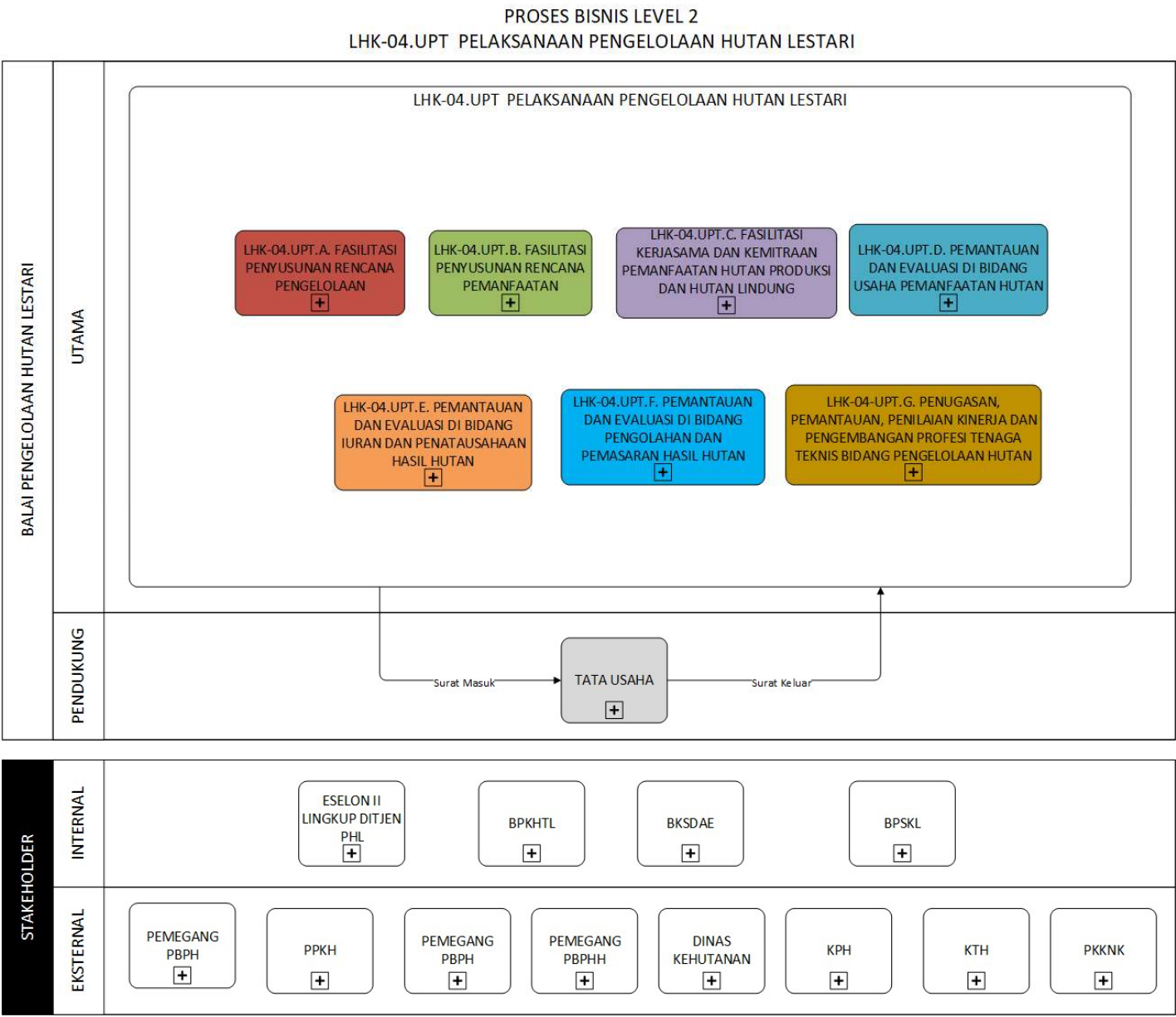


6.7.4 LHK-04.UPT.G.4. PENGENDALIAN PENUGASAN TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.G.4. PENGENDALIAN PENUGASAN TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN

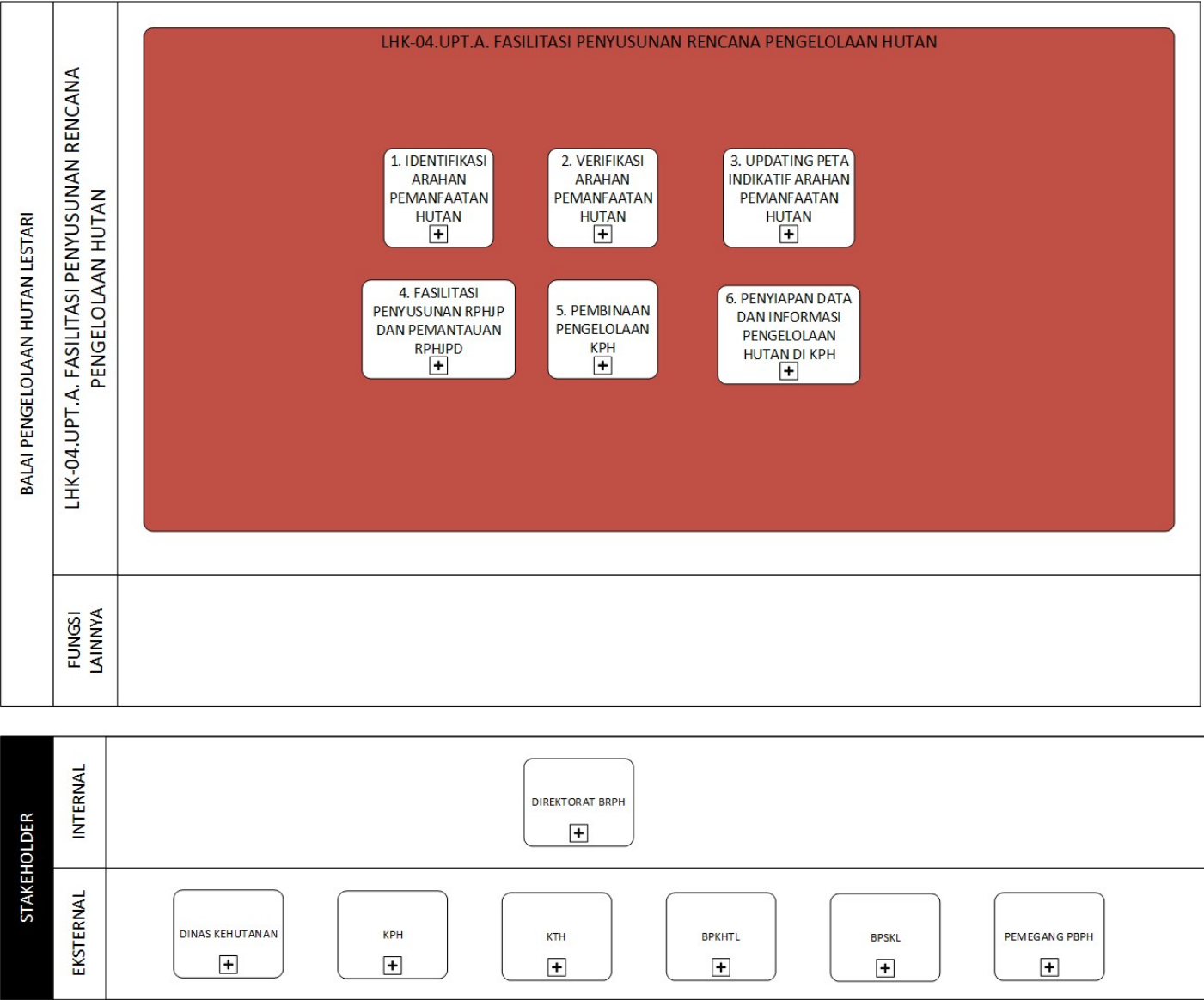


7 LHK-04.UPT. PELAKSANAAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI



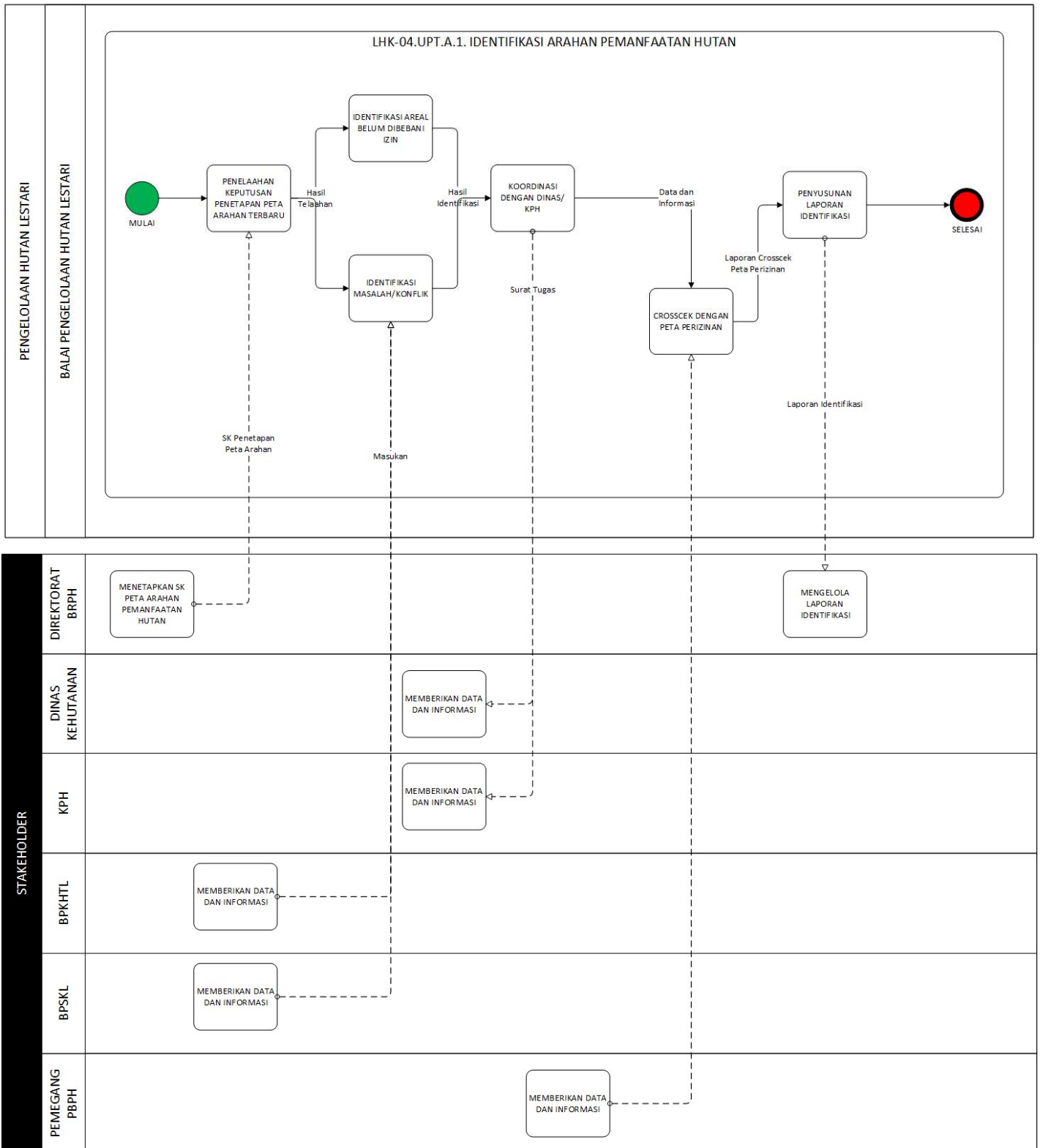
7.1 LHK-04.UPT.A. FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 3
LHK-04.UPT.A. FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN



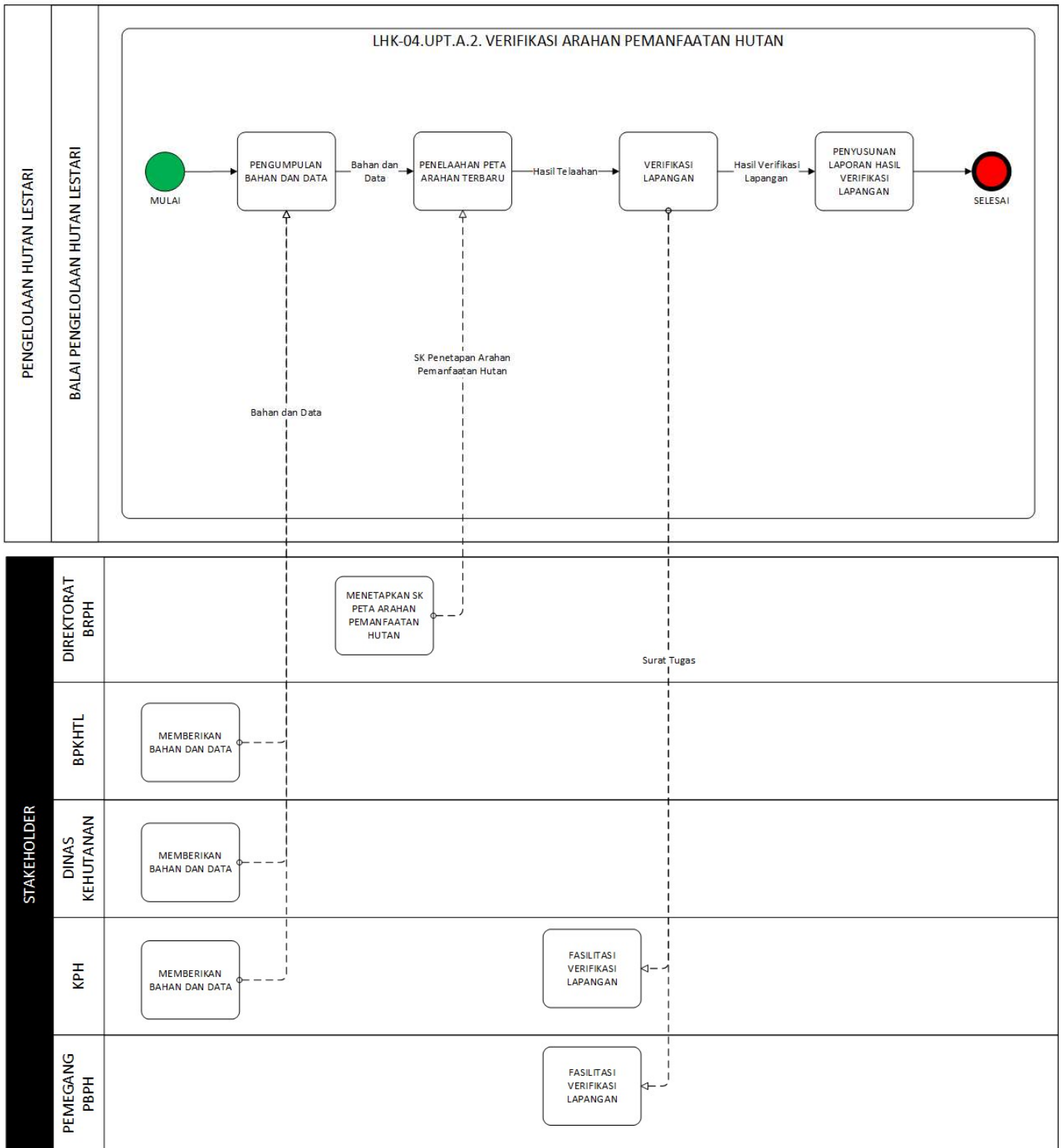
7.1.1 LHK-04.UPT.A.1. IDENTIFIKASI ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.A.1. IDENTIFIKASI ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN



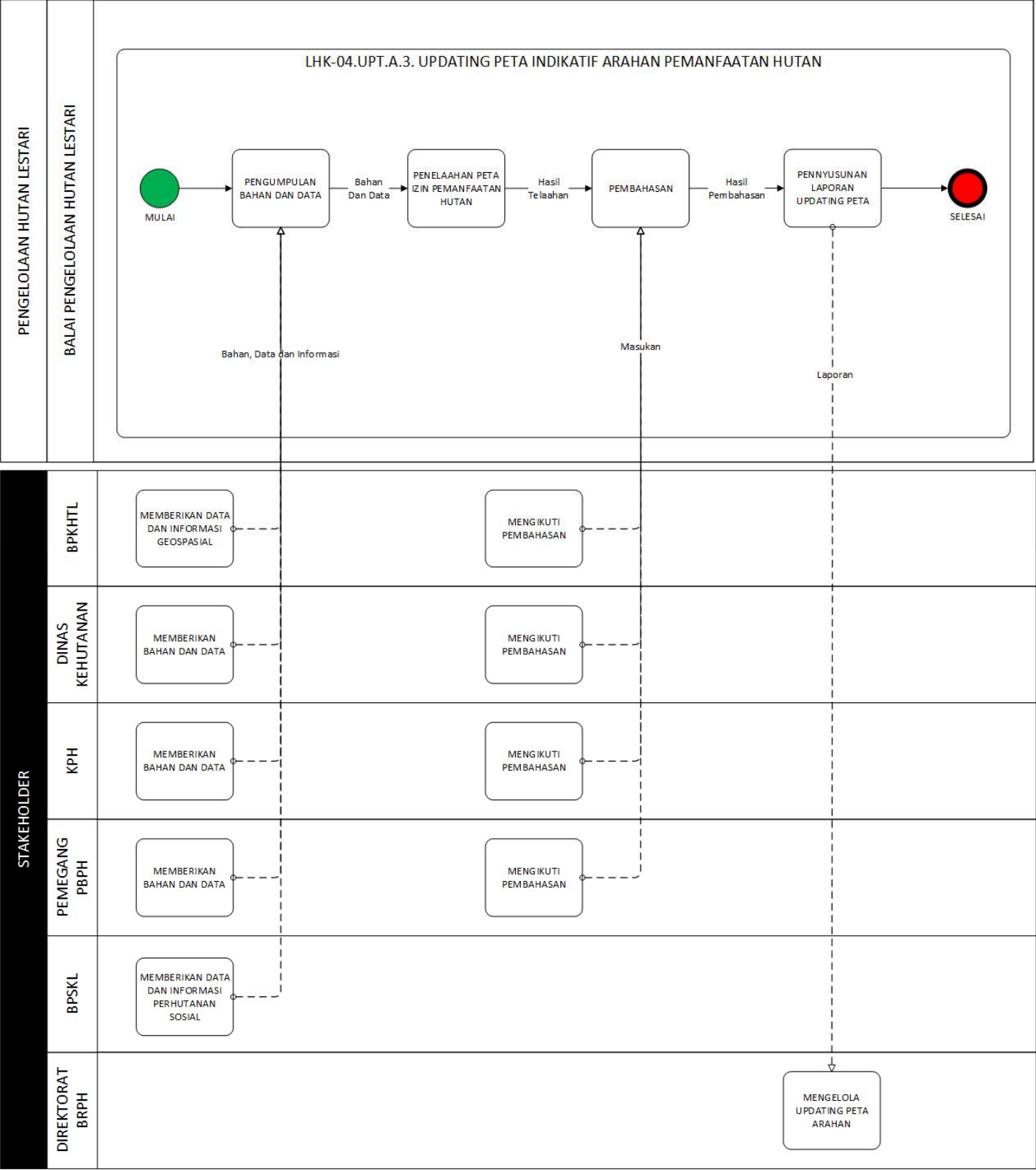
7.1.2 LHK-04.UPT.A.2. VERIFIKASI ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.A.2. VERIFIKASI ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN



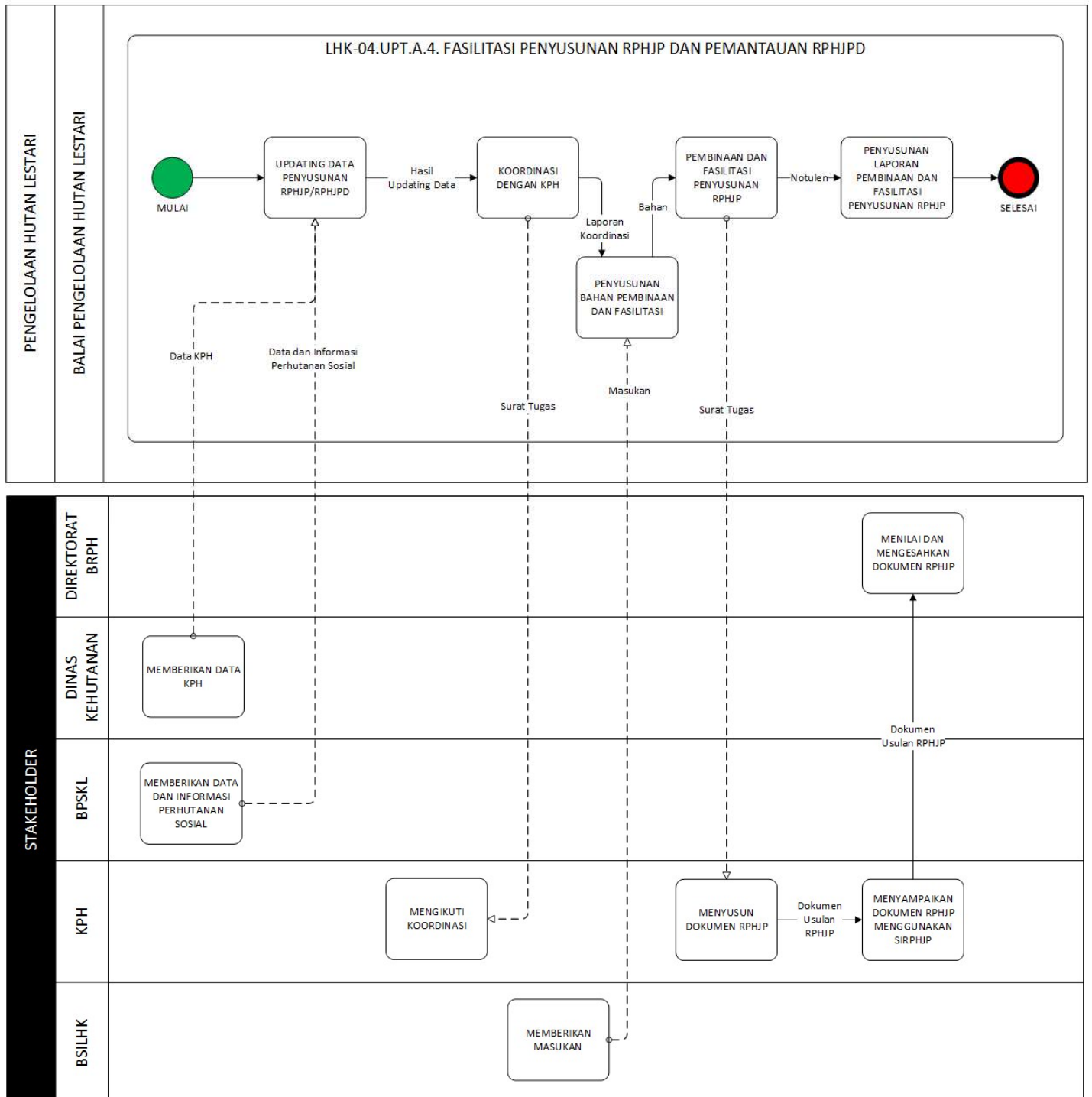
7.1.3 LHK-04.UPT.A.3. UPDATING PETA INDIKATIF ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.A.3. UPDATING PETA INDIKATIF ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN



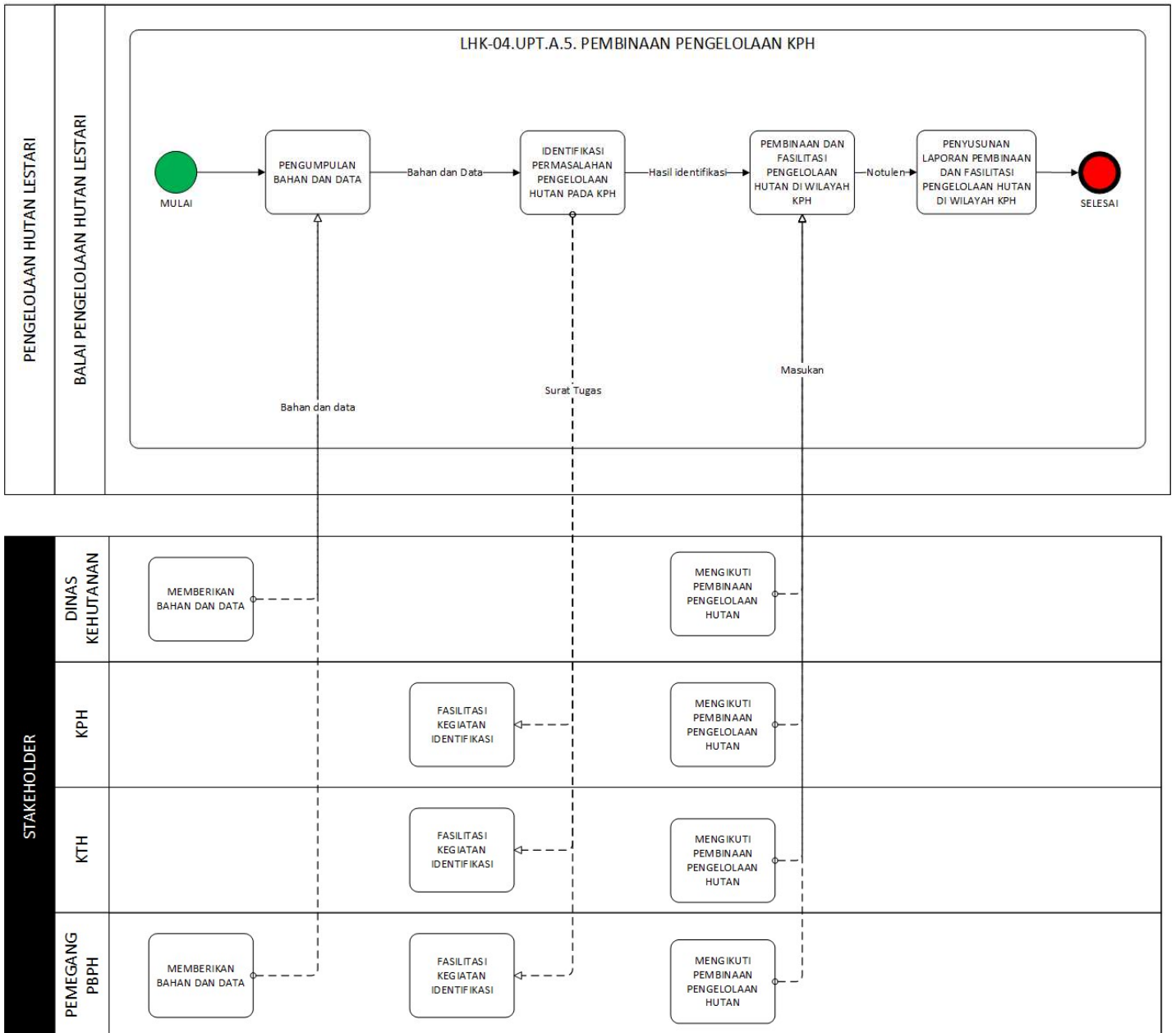
7.1.4 LHK-04.UPT.A.4. FASILITASI PENYUSUNAN RPHJP DAN PEMANTAUAN RPHJPD

PROSES BISNIS LEVEL 4 LHK-04.UPT.A.4. FASILITASI PENYUSUNAN RPHJP DAN PEMANTAUAN RPHJPD



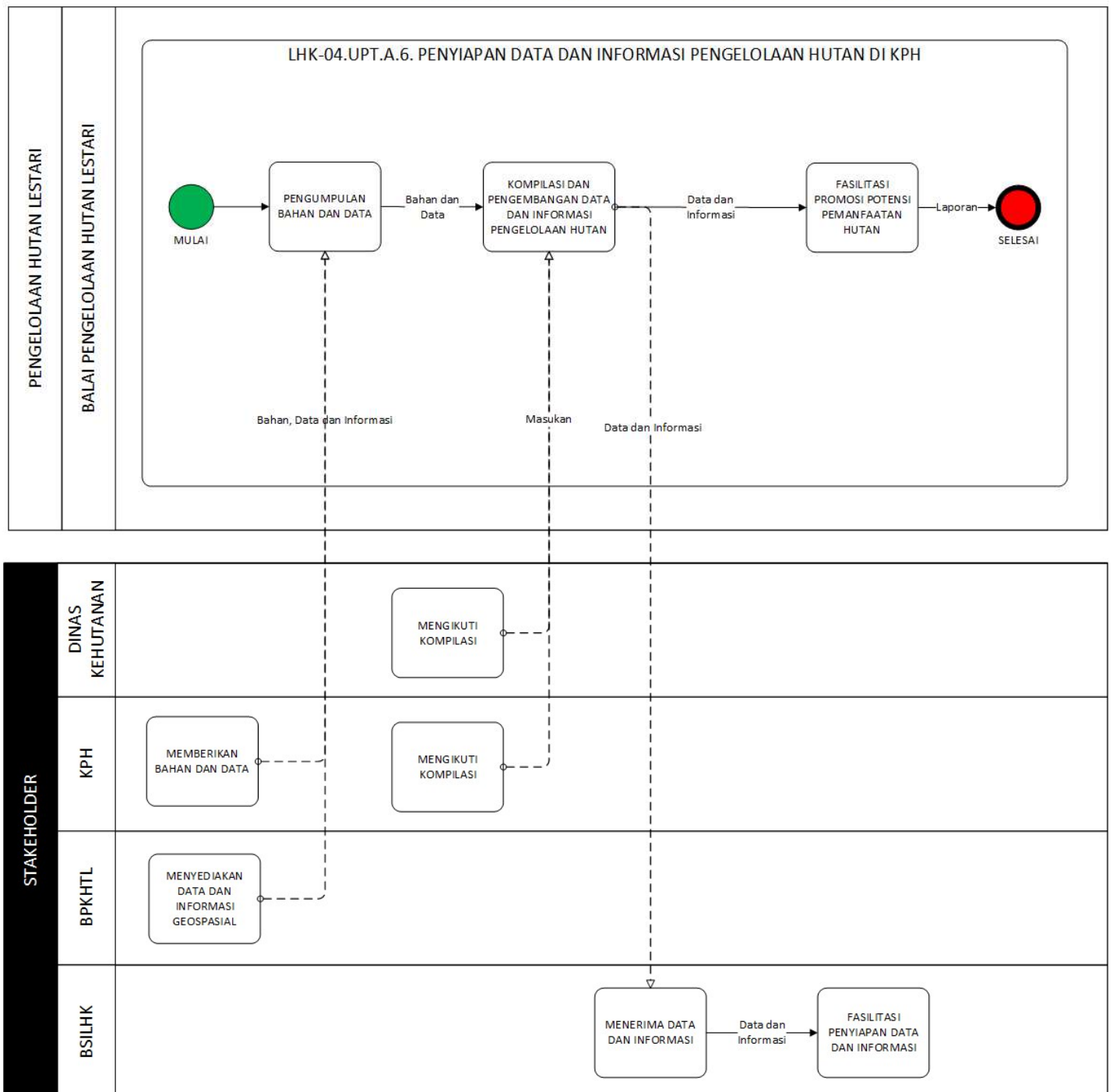
7.1.5 LHK-04.UPT.A.5. PEMBINAAN PENGELOLAAN KPH

PROSES BISNIS LEVEL 4 LHK-04.UPT.A.5. PEMBINAAN PENGELOLAAN KPH



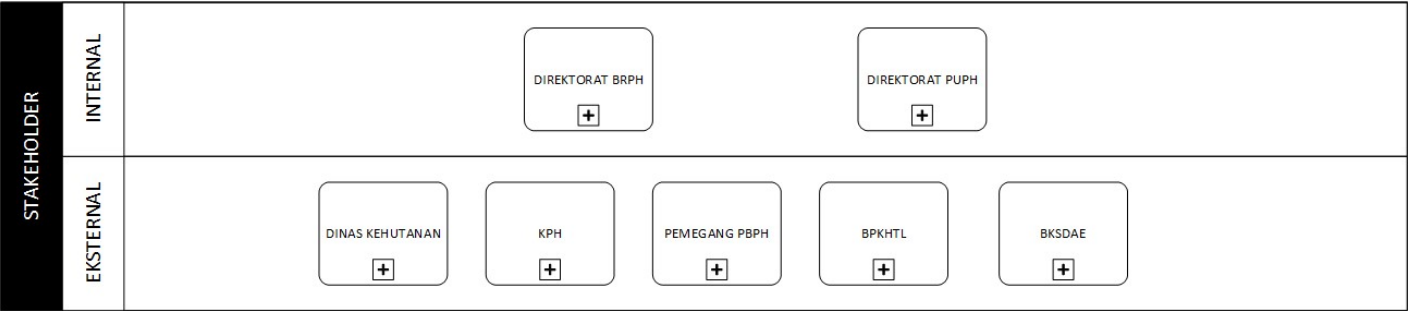
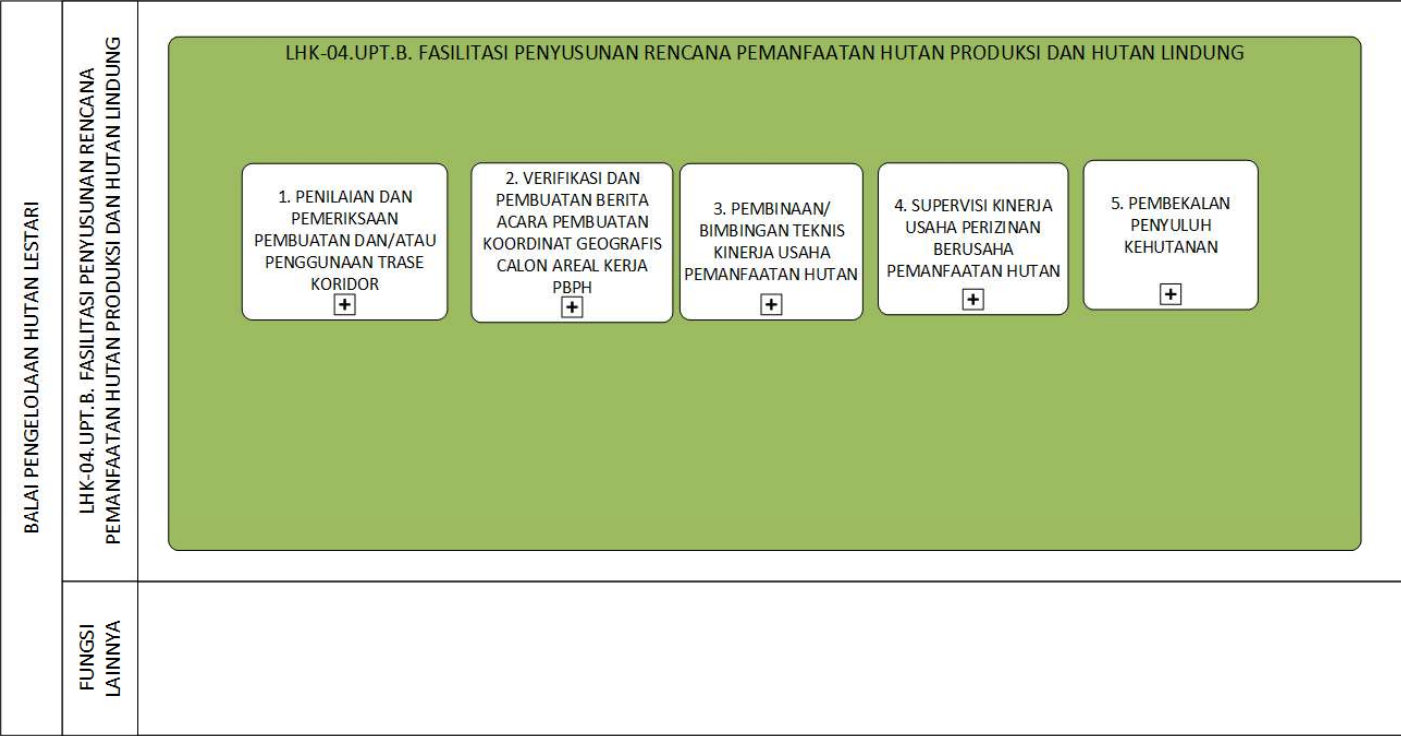
7.1.6 LHK-04.UPT.A.6. PENYIAPAN DATA DAN INFORMASI PENGELOLAAN HUTAN DI KPH

PROSES BISNIS LEVEL 4 LHK-04.UPT.A.6. PENYIAPAN DATA DAN INFORMASI PENGELOLAAN HUTAN DI KPH



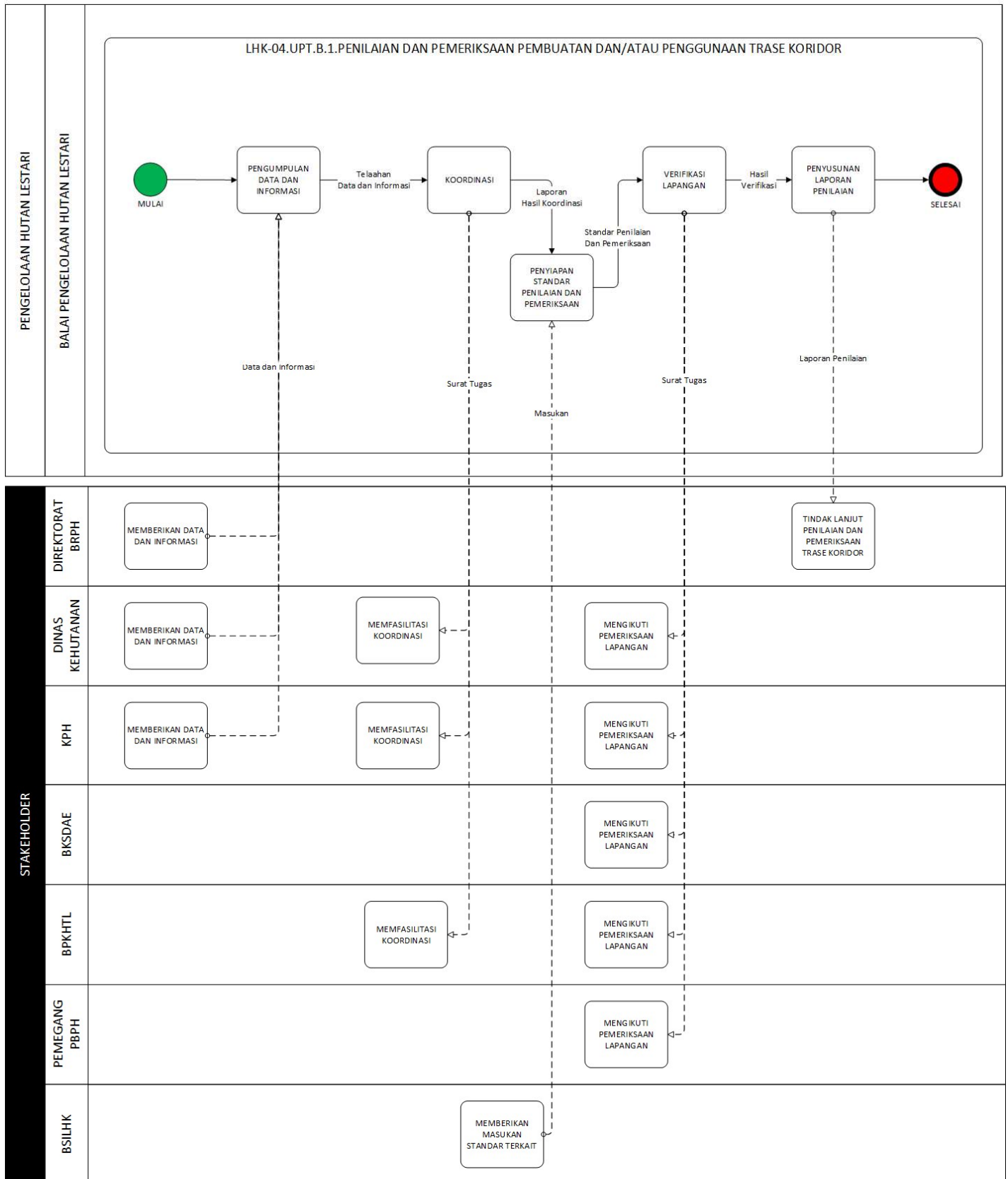
7.2 LHK-04.UPT.B. FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG

PROSES BISNIS LEVEL 3
LHK-04.UPT.B. FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG



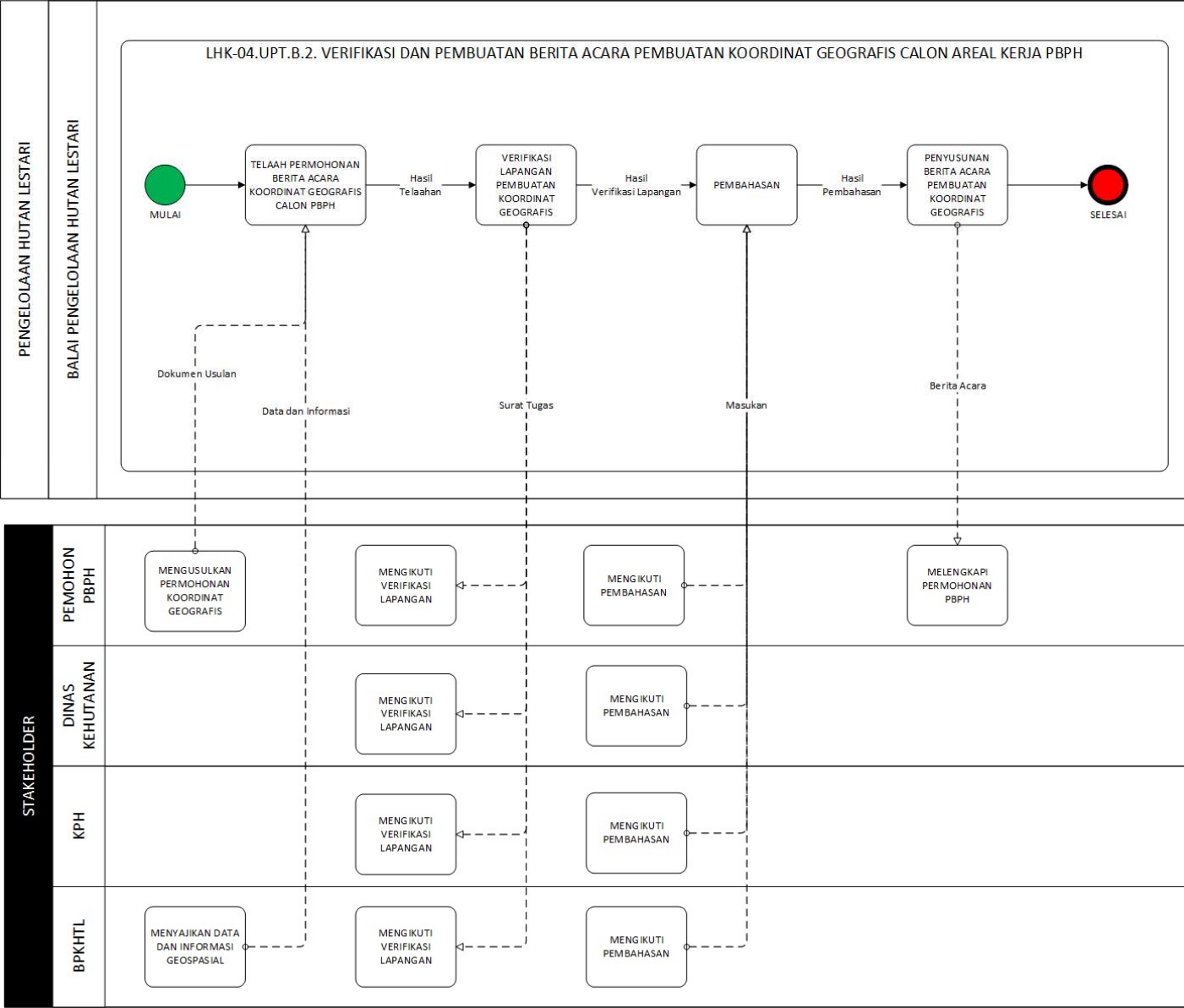
7.2.1 LHK-04.UPT.B.1. PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN PEMBUATAN DAN/ATAU PENGGUNAAN TRASE KORIDOR

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.B.1.PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN PEMBUATAN DAN/ATAU PENGGUNAAN TRASE KORIDOR



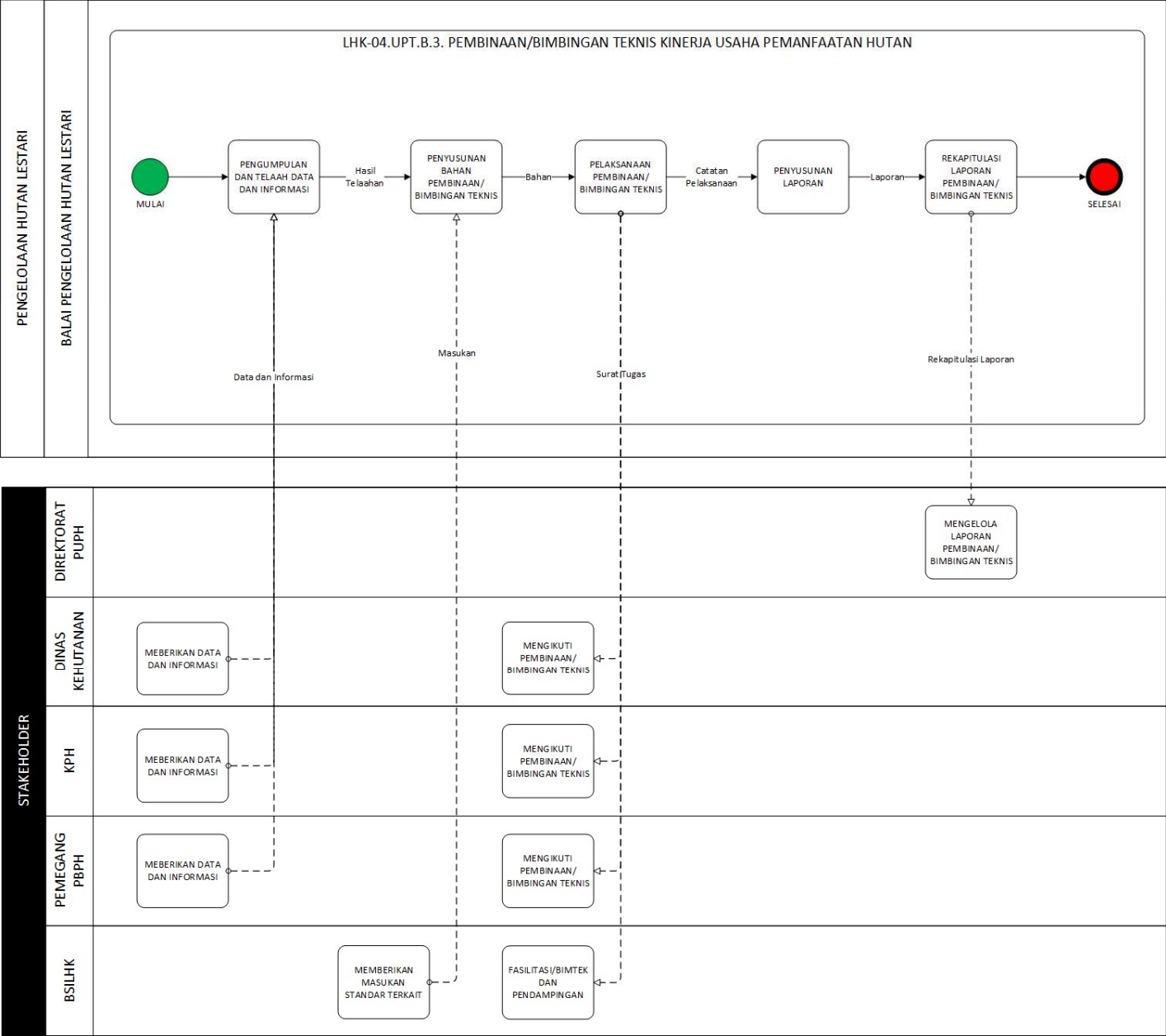
7.2.2 LHK.04.UPT.B.2. VERIFIKASI DAN PEMBUATAN BERITA ACARA PEMBUATAN KOORDINAT GEOGRAFIS CALON AREAL KERJA PBPH

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.B.2. VERIFIKASI DAN PEMBUATAN BERITA ACARA PEMBUATAN KOORDINAT GEOGRAFIS CALON AREAL KERJA PBPH



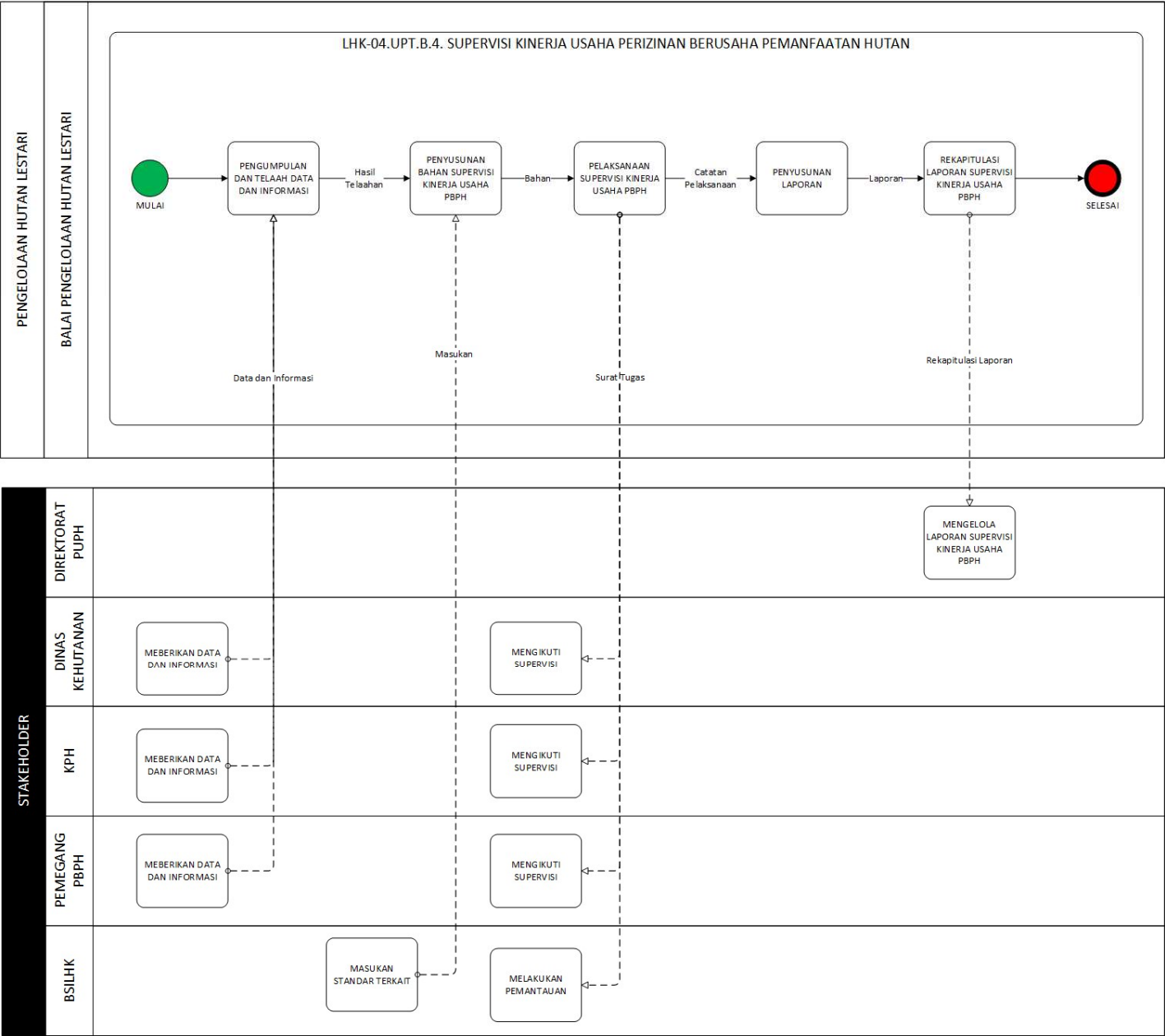
7.2.3 LHK-04.UPT.B.3. PEMBINAAN/BIMBINGAN TEKNIS KINERJA USAHA PEMANFAATAN HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.B.3. PEMBINAAN/BIMBINGAN TEKNIS KINERJA USAHA PEMANFAATAN HUTAN



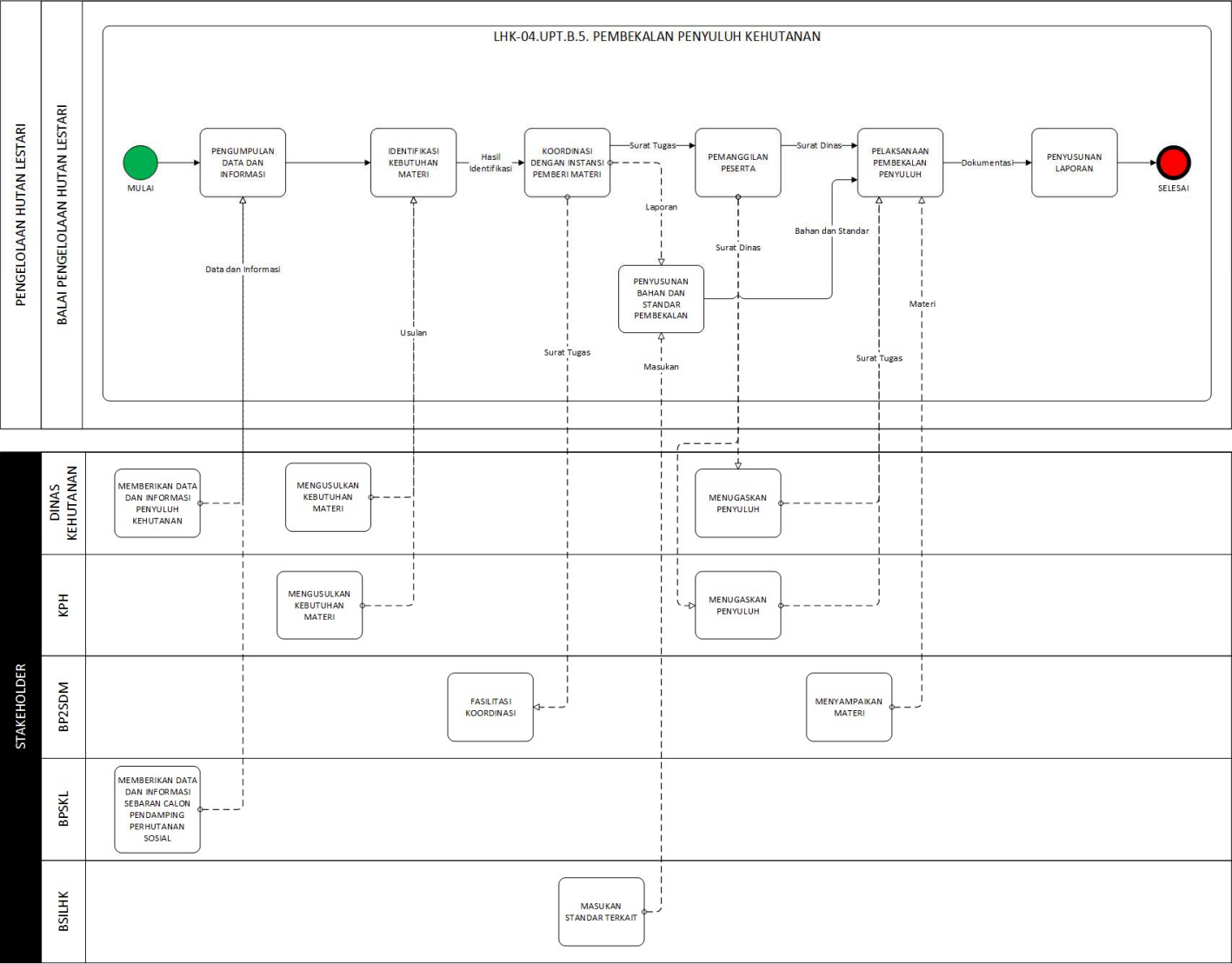
7.2.4 LHK-04.UPT.B.4. SUPERVISI KINERJA USAHA PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.B.4. SUPERVISI KINERJA USAHA PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN



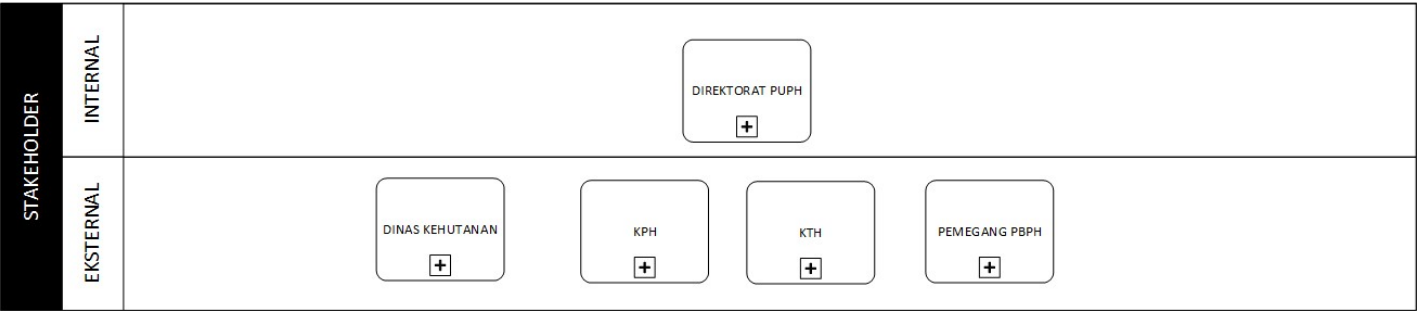
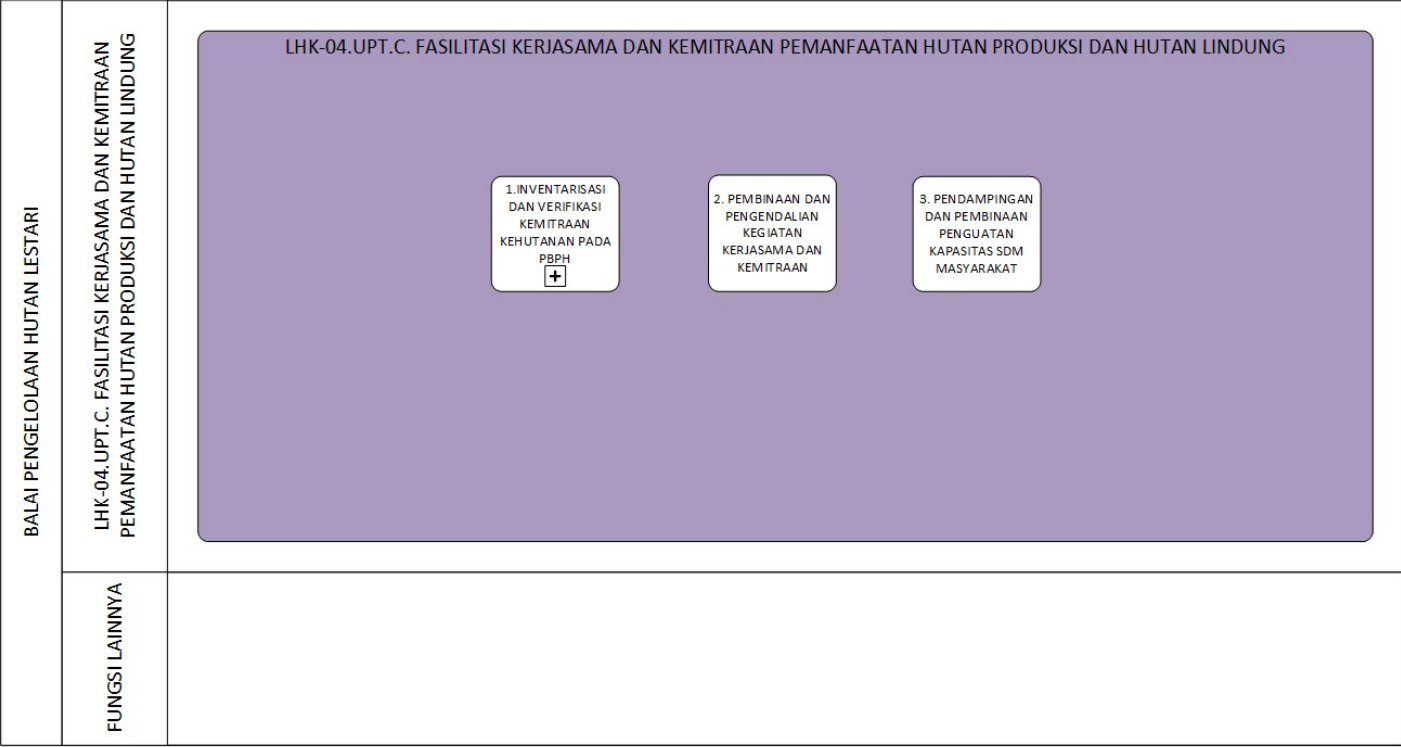
7.2.5 LHK-04.UPT.B.5. PEMBEKALAN PENYULUH KEHUTANAN

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.B.5. PEMBEKALAN PENYULUH KEHUTANAN



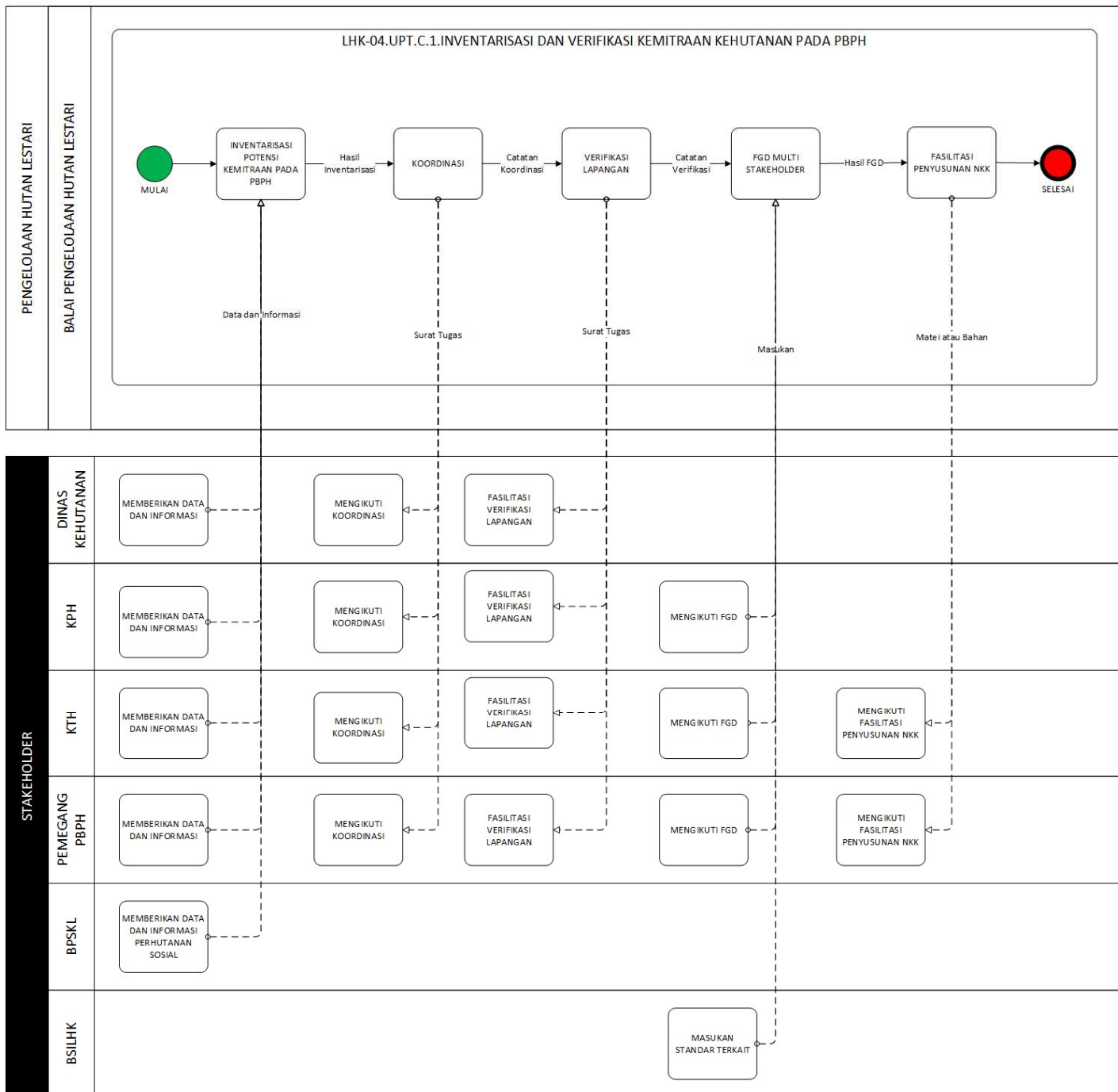
7.3 LHK-04.UPT.C. FASILITASI KERJASAMA DAN KEMITRAAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG

PROSES BISNIS LEVEL 3
LHK-04.UPT.C. FASILITASI KERJASAMA DAN KEMITRAAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG



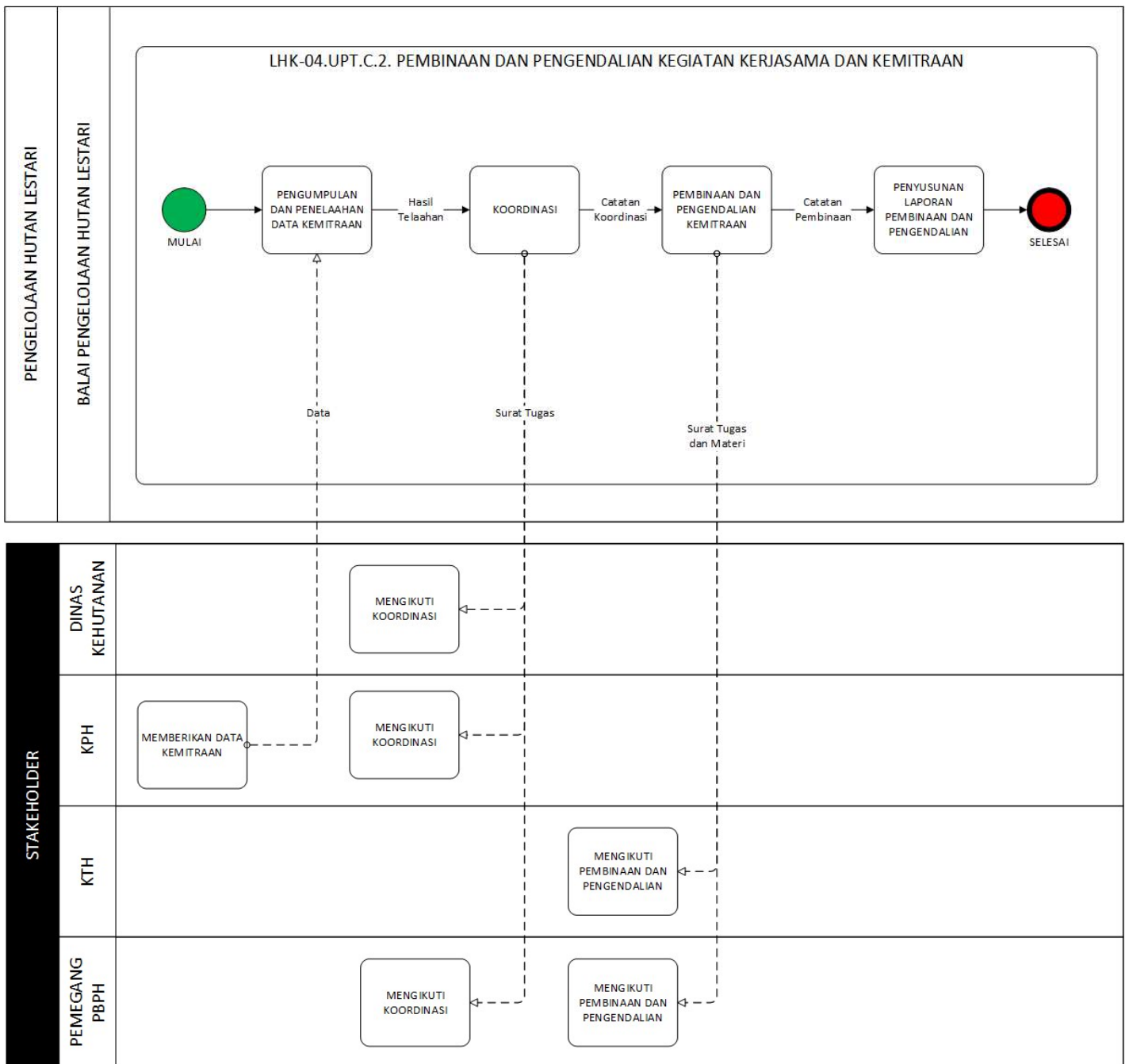
7.3.1 LHK-04.UPT.C.1.INVENTARISASI DAN VERIFIKASI KEMITRAAN KEHUTANAN PADA PBPH

PROSES BISNIS LEVEL 4 LHK-04.UPT.C.1.INVENTARISASI DAN VERIFIKASI KEMITRAAN KEHUTANAN PADA PBPH



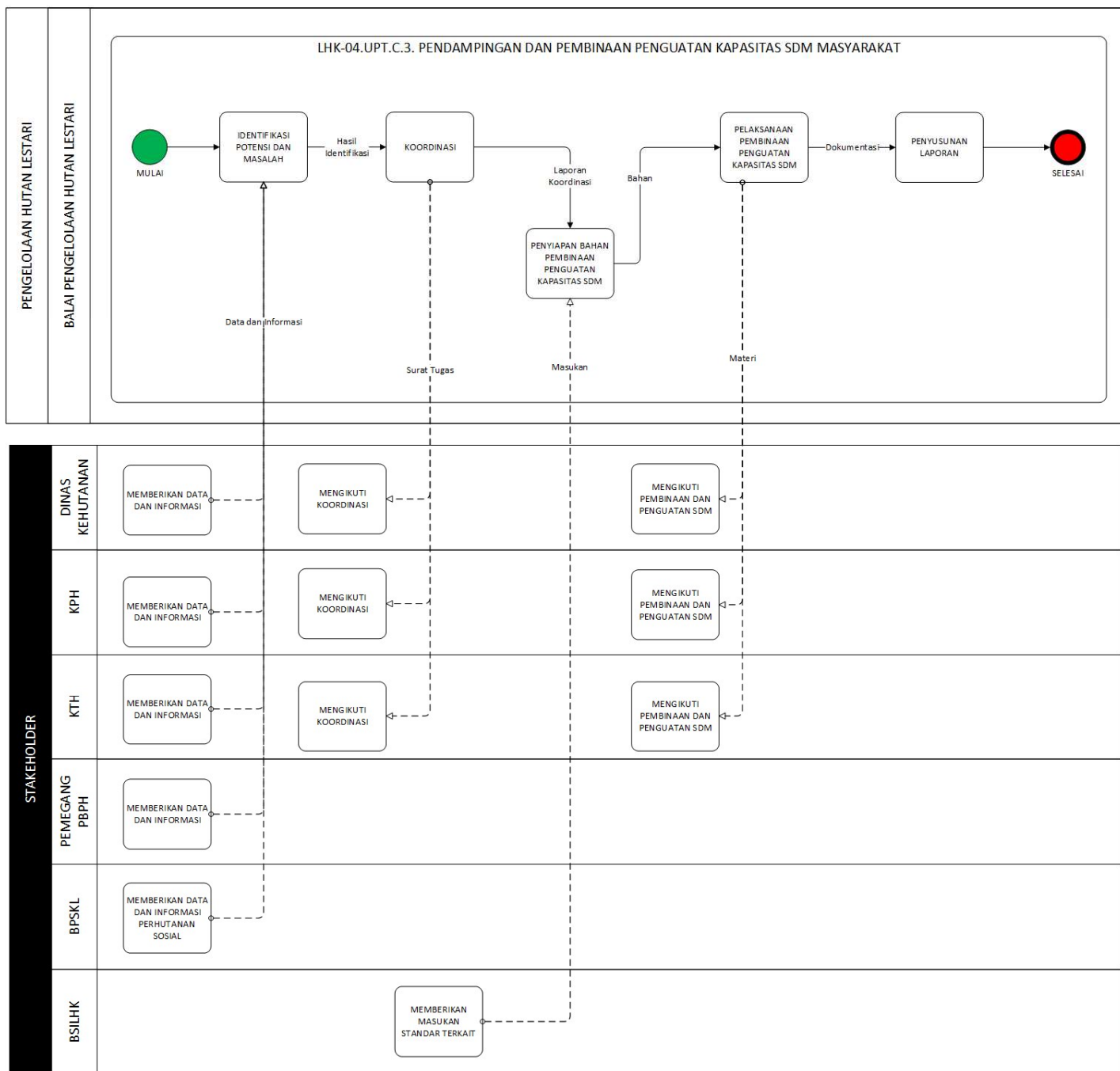
7.3.2 LHK-04.UPT.C.2. PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN KERJASAMA DAN KEMITRAAN

PROSES BISNIS LEVEL 4 LHK-04.UPT.C.2. PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN KERJASAMA DAN KEMITRAAN



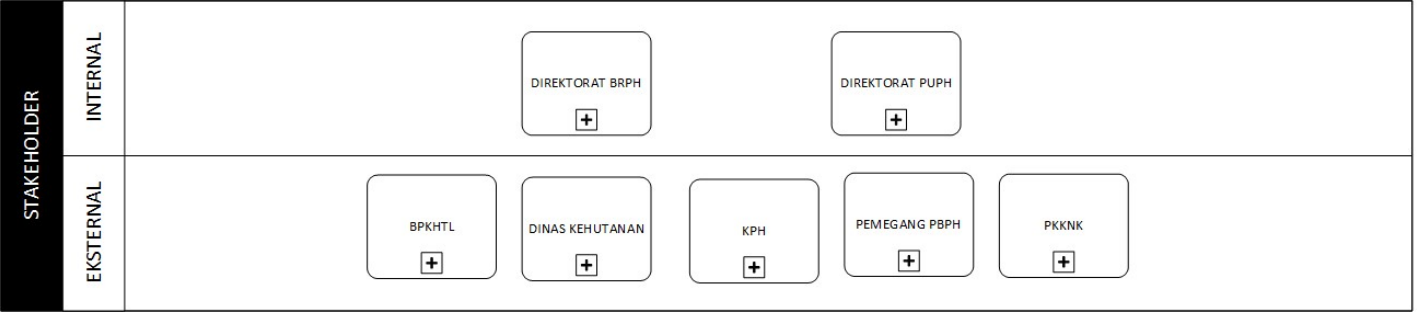
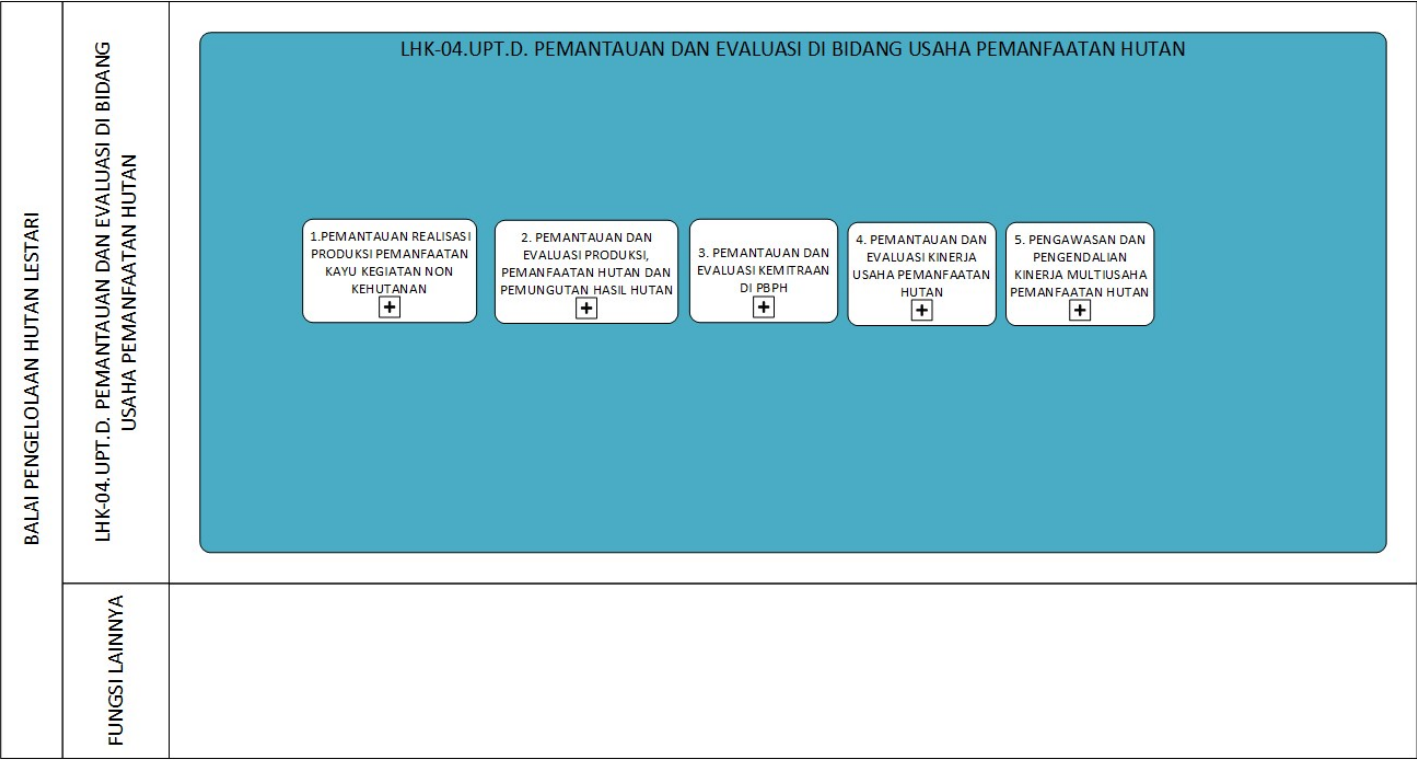
7.3.3 LHK-04.UPT.C.3. PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN PENGUATAN KAPASITAS SDM MASYARAKAT

PROSES BISNIS LEVEL 4 LHK-04.UPT.C.3. PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN PENGUATAN KAPASITAS SDM MASYARAKAT



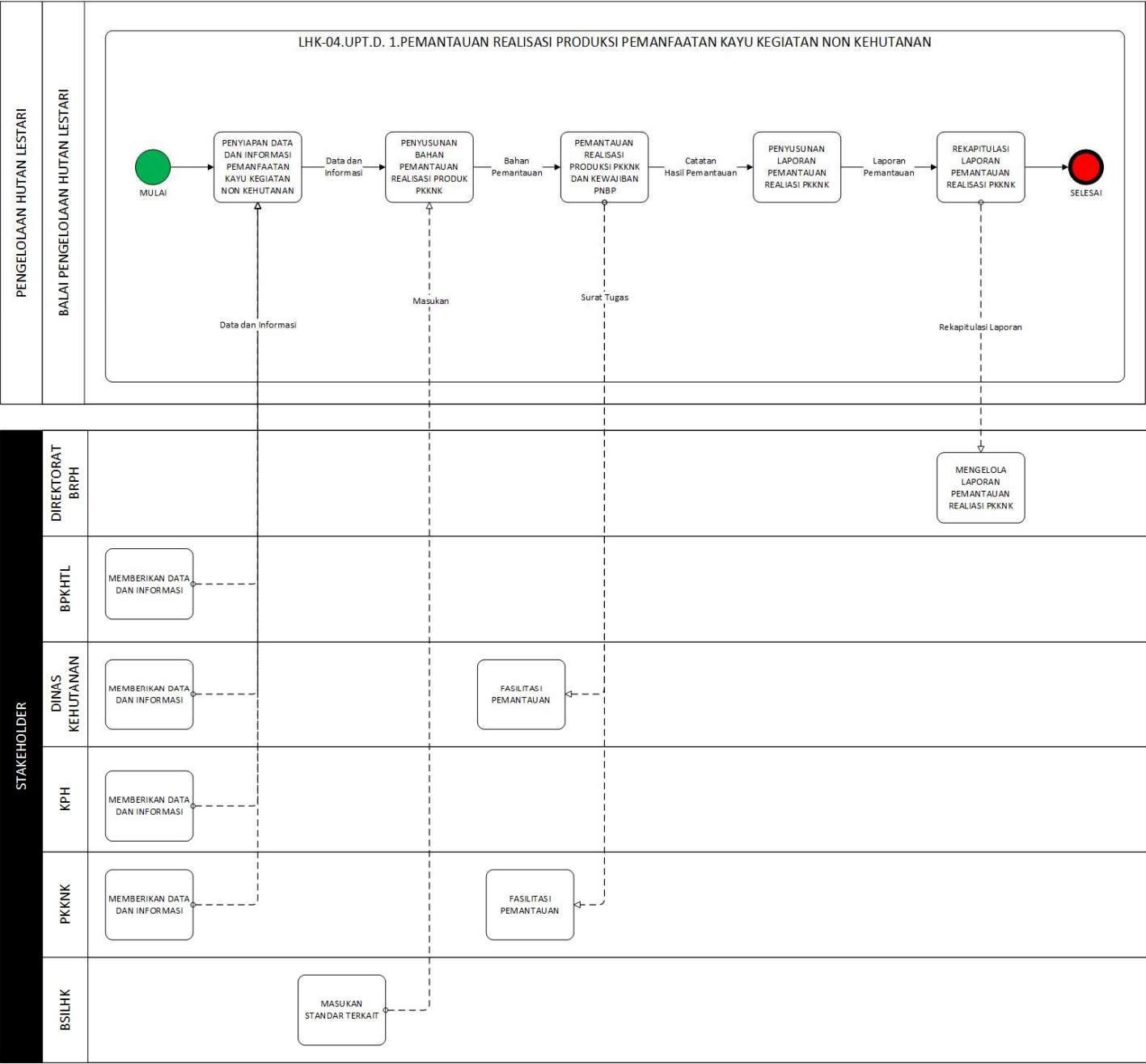
7.4 LHK-04.UPT.D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI DI BIDANG USAHA PEMANFAATAN HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 3
LHK-04.UPT.D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI DI BIDANG USAHA PEMANFAATAN HUTAN



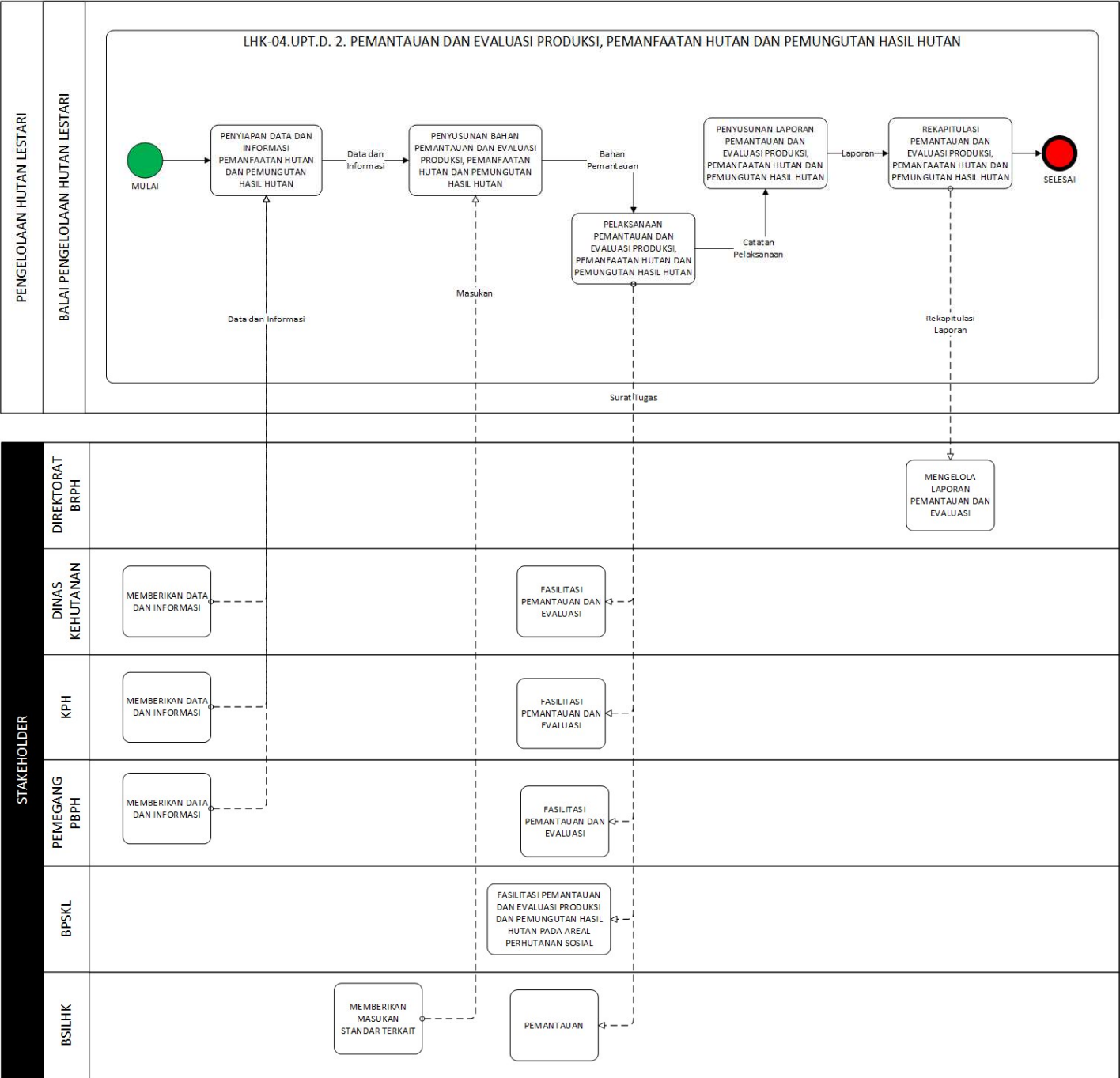
7.4.1 LHK-04.UPT.D.1. PEMANTAUAN REALISASI PRODUKSI PEMANFAATAN KAYU KEGIATAN NON KEHUTANAN

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.D. 1.PEMANTAUAN REALISASI PRODUKSI PEMANFAATAN KAYU KEGIATAN NON KEHUTANAN



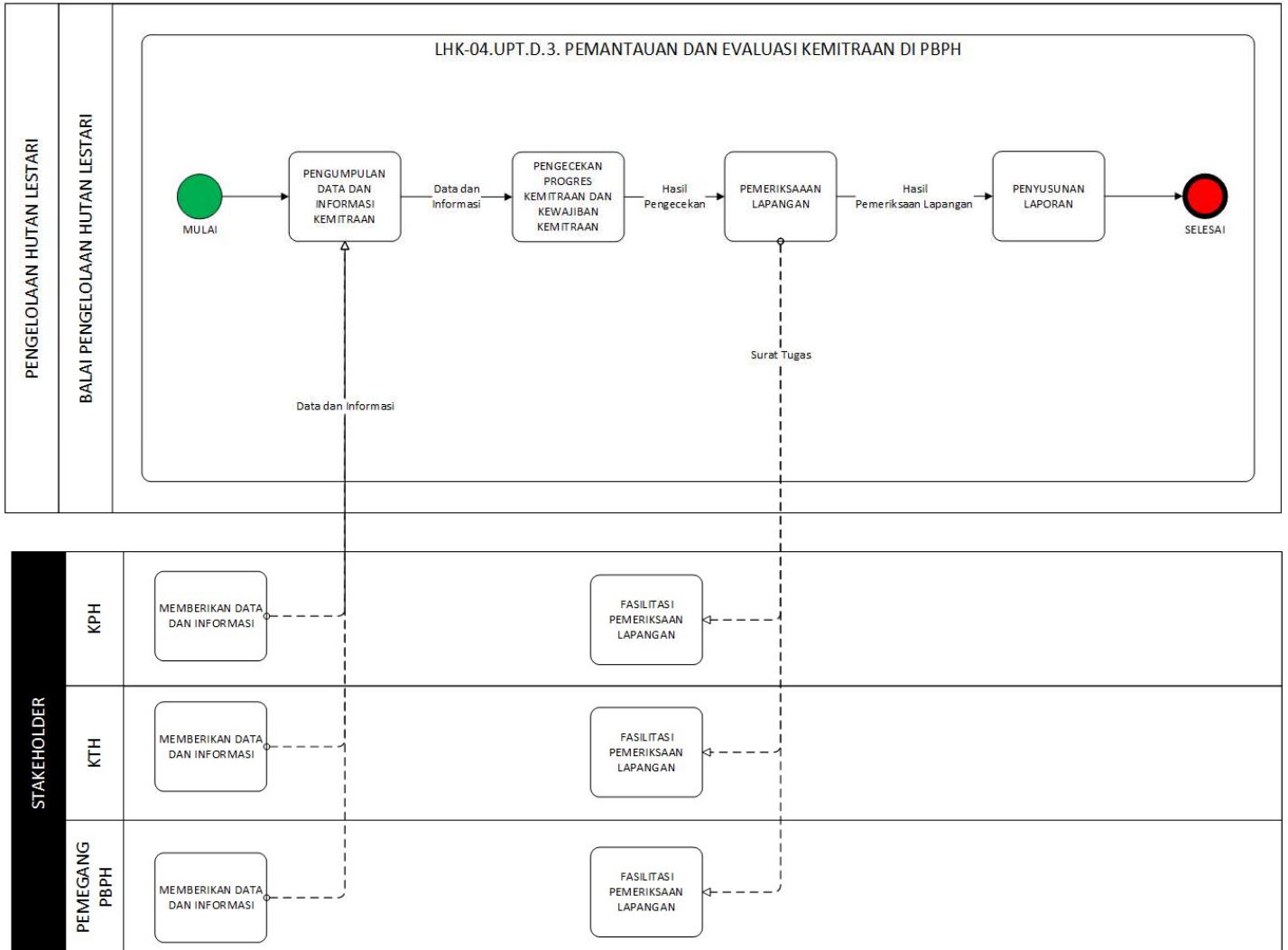
7.4.2 LHK-04.UPT.D.2. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PRODUKSI, PEMANFAATAN HUTAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.D. 2. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PRODUKSI, PEMANFAATAN HUTAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN



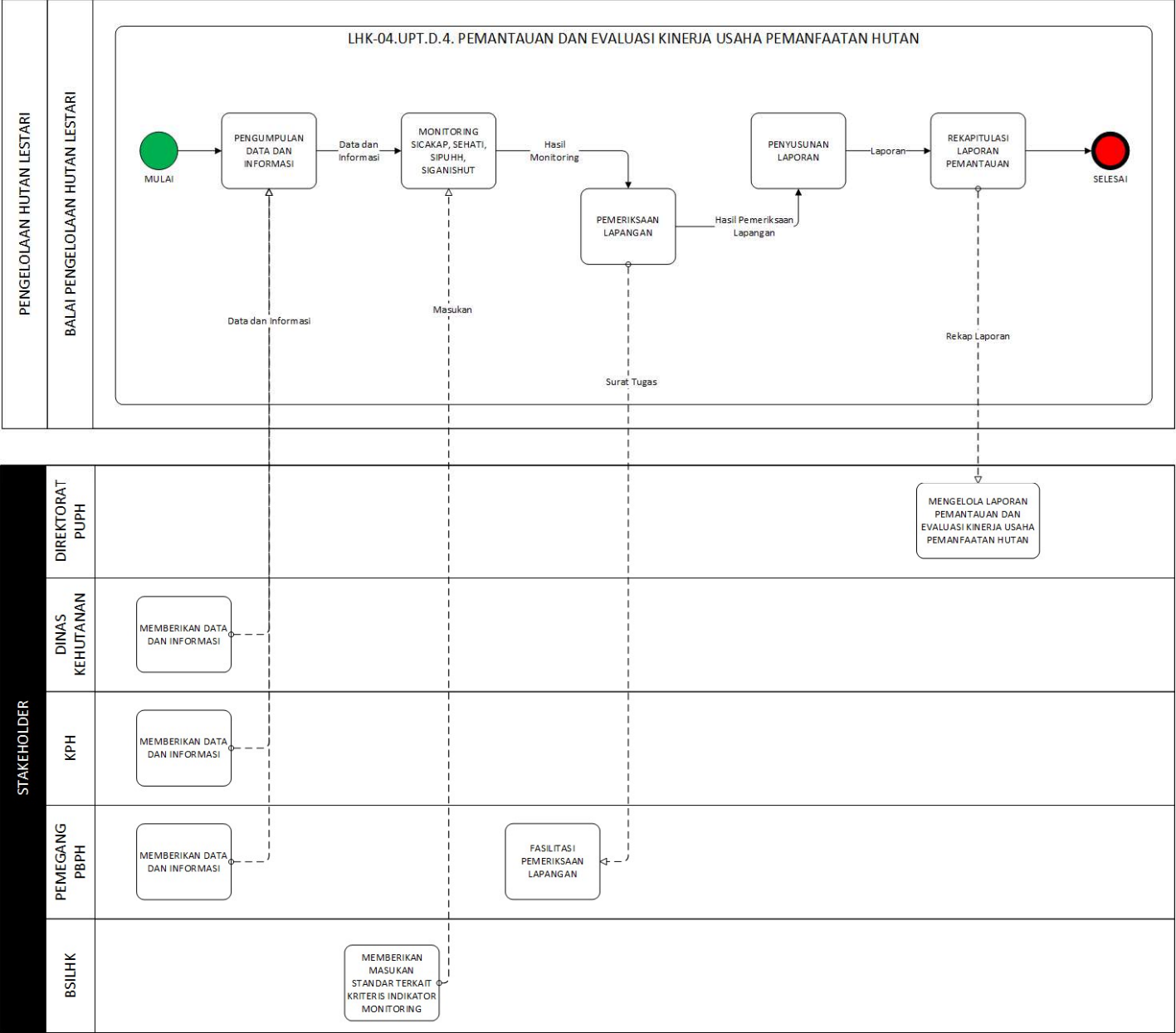
7.4.3 LHK-04.UPT.D.3. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEMITRAAN DI PBPH

PROSES BISNIS LEVEL 4 LHK-04.UPT.D.3. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEMITRAAN DI PBPH

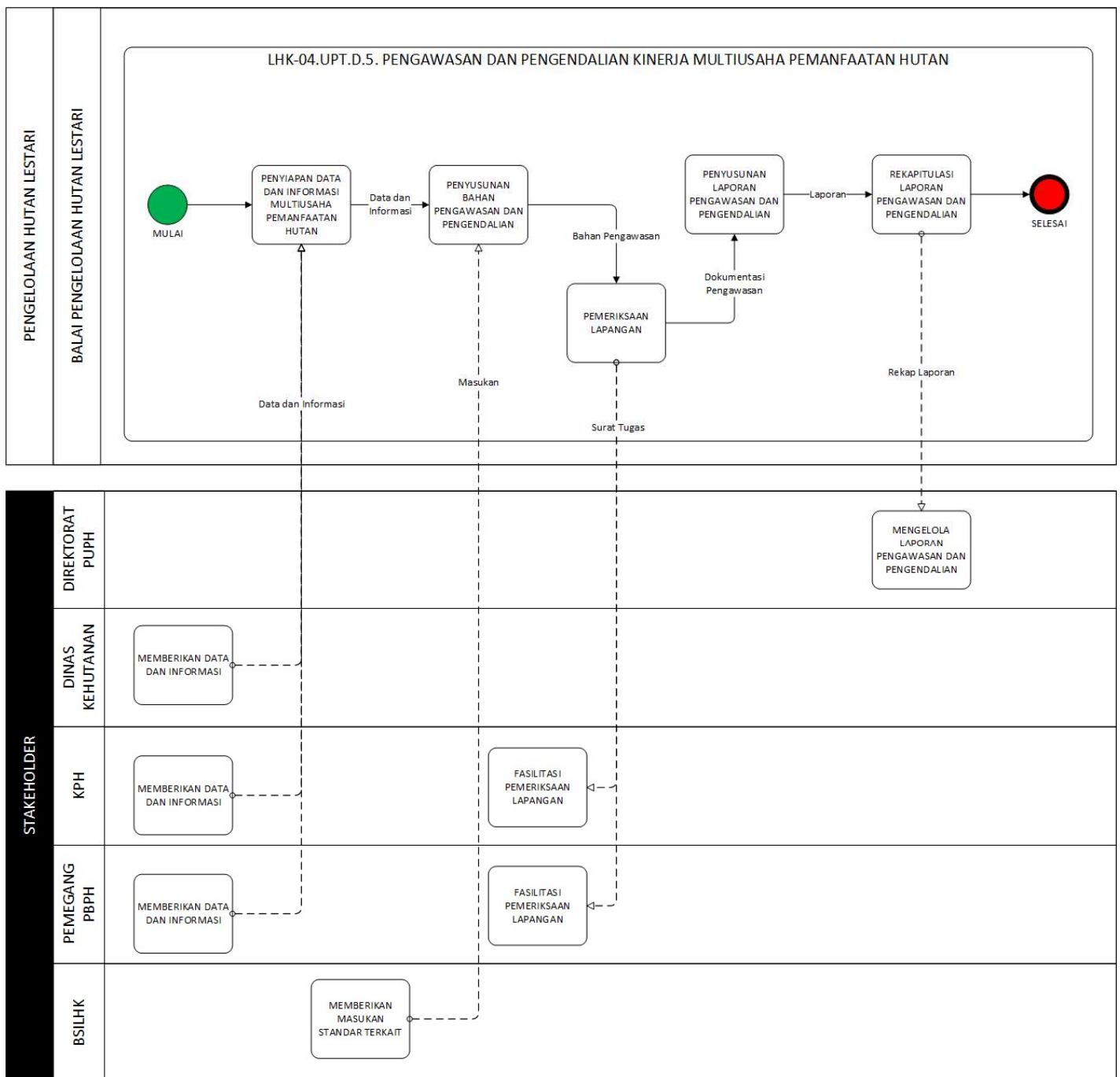


7.4.4 LHK-04.UPT.D.4. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA USAHA PEMANFAATAN HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.D.4. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA USAHA PEMANFAATAN HUTAN

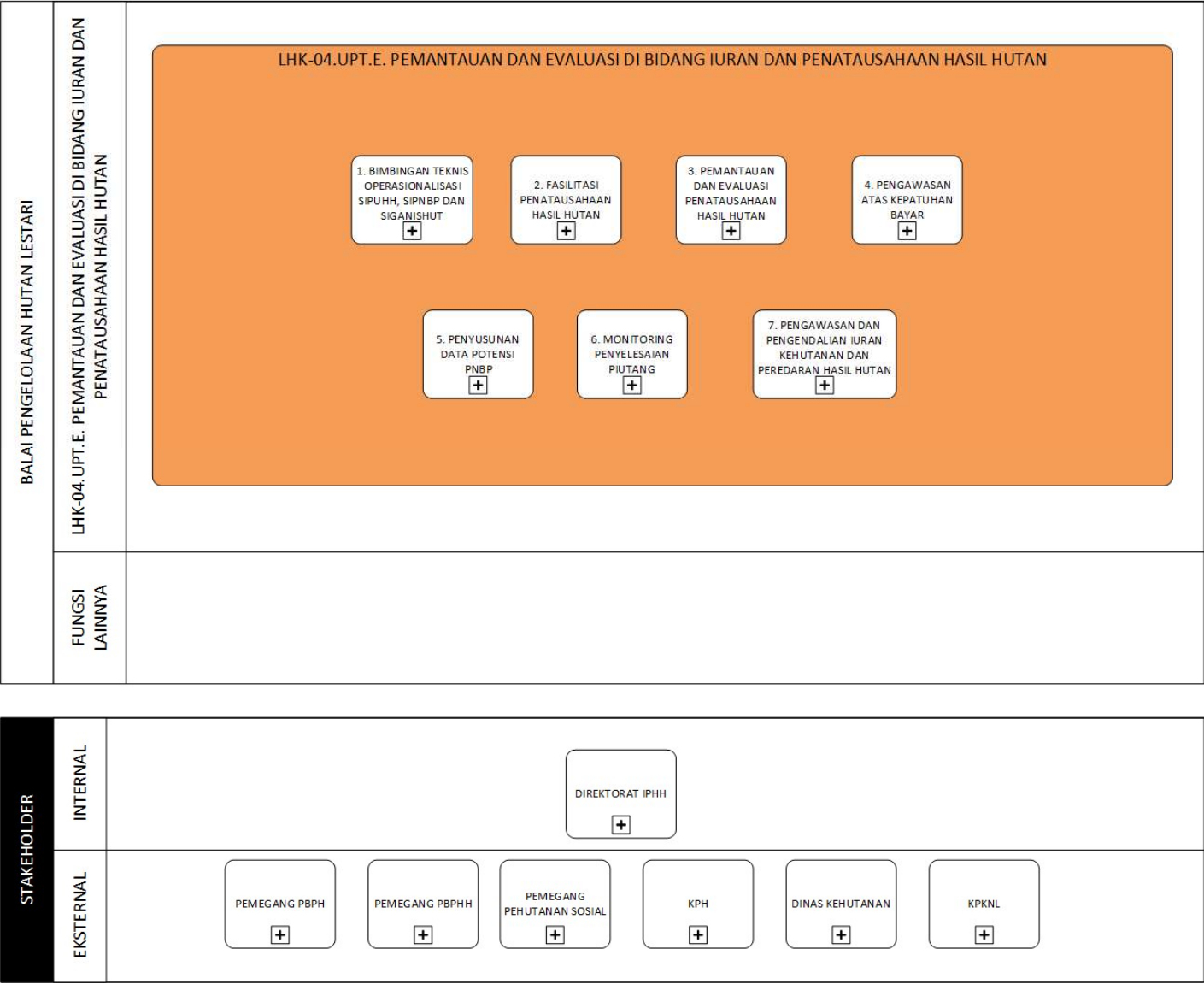


7.4.5 LHK-04.UPT.D.5. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN USAHA PEMANFAATAN HUTAN



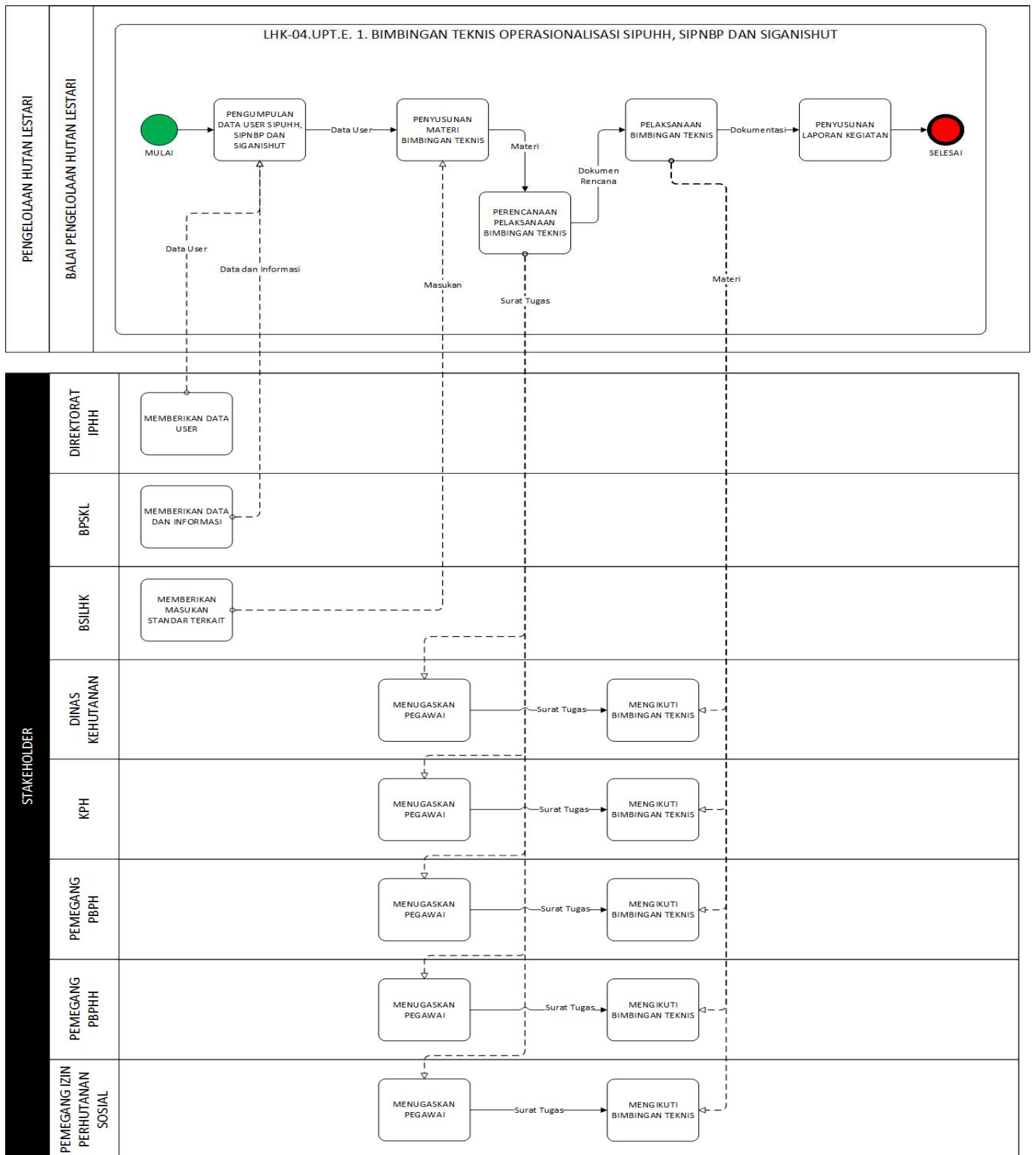
7.5 LHK-04.UPT.E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI DI BIDANG IURAN DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 3
LHK-04.UPT.E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI DI BIDANG IURAN DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN



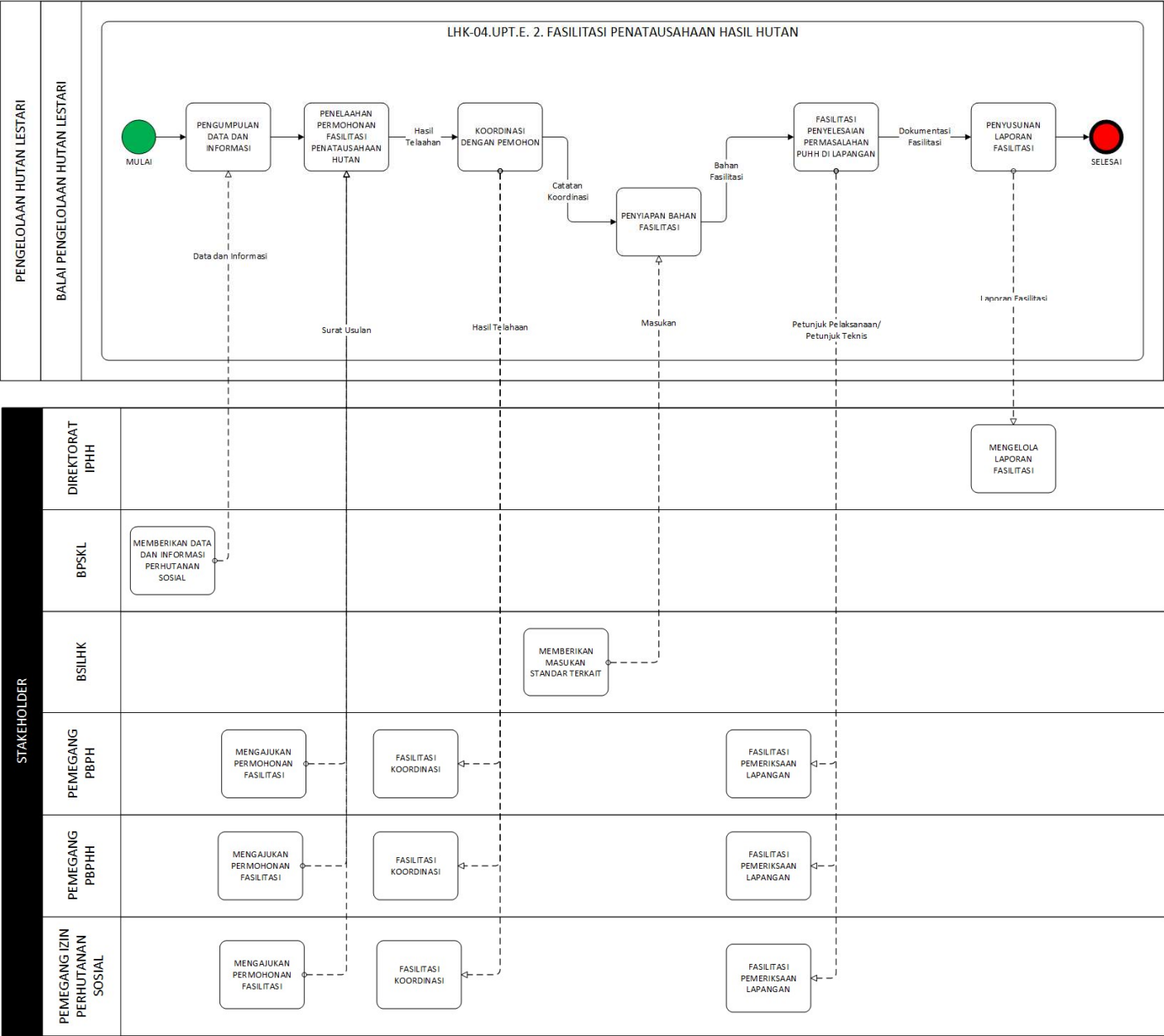
7.5.1 LHK-04.UPT.E.1. BIMBINGAN TEKNIS TATA CARA OPERASIONALISASI SIPUHH, SIPNBP DAN SIGANISHUT

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.E. 1. BIMBINGAN TEKNIS OPERASIONALISASI SIPUHH, SIPNBP DAN SIGANISHUT



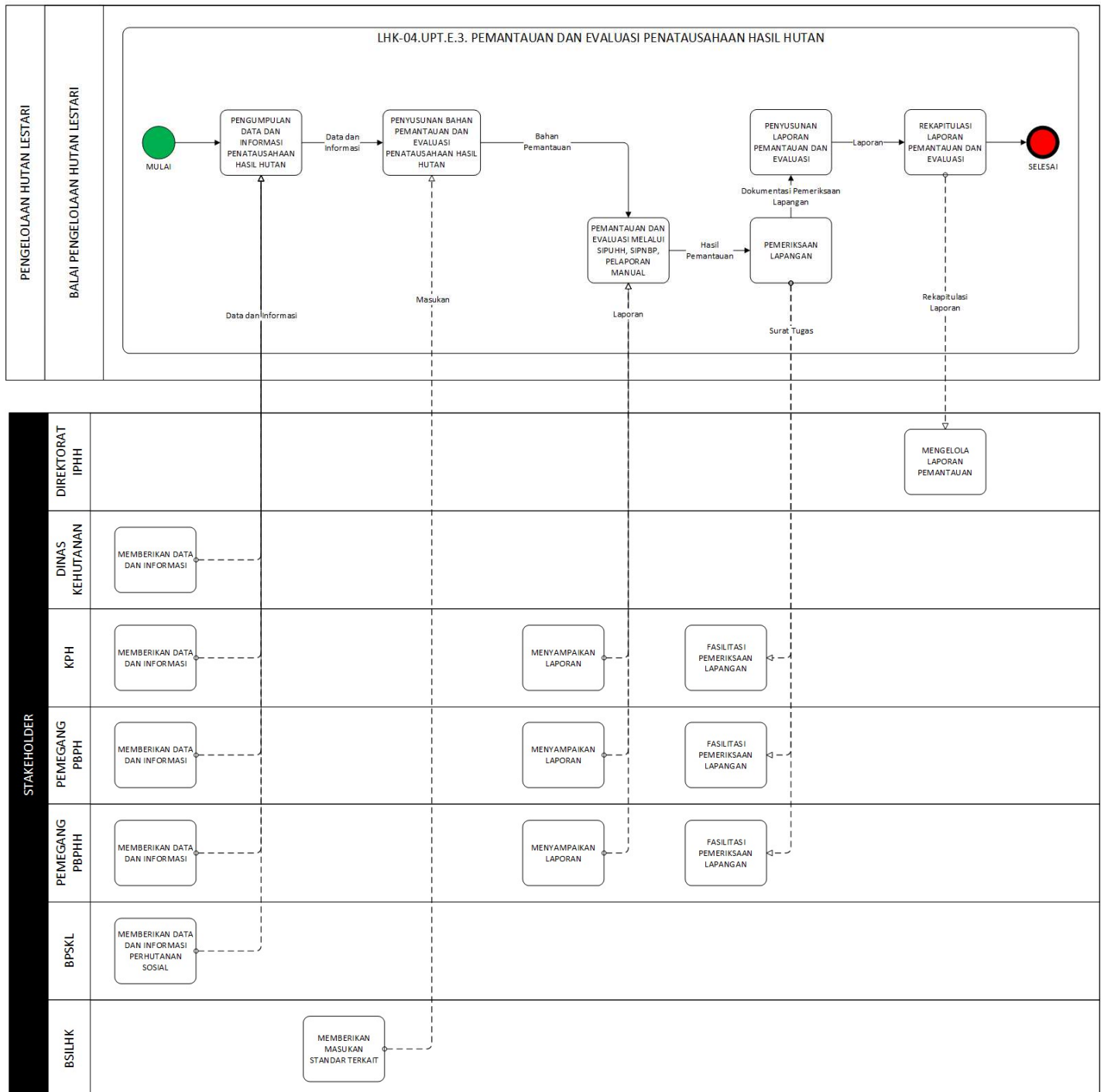
7.5.2 LHK-04.UPT.E.2. FASILITASI PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.E. 2. FASILITASI PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN



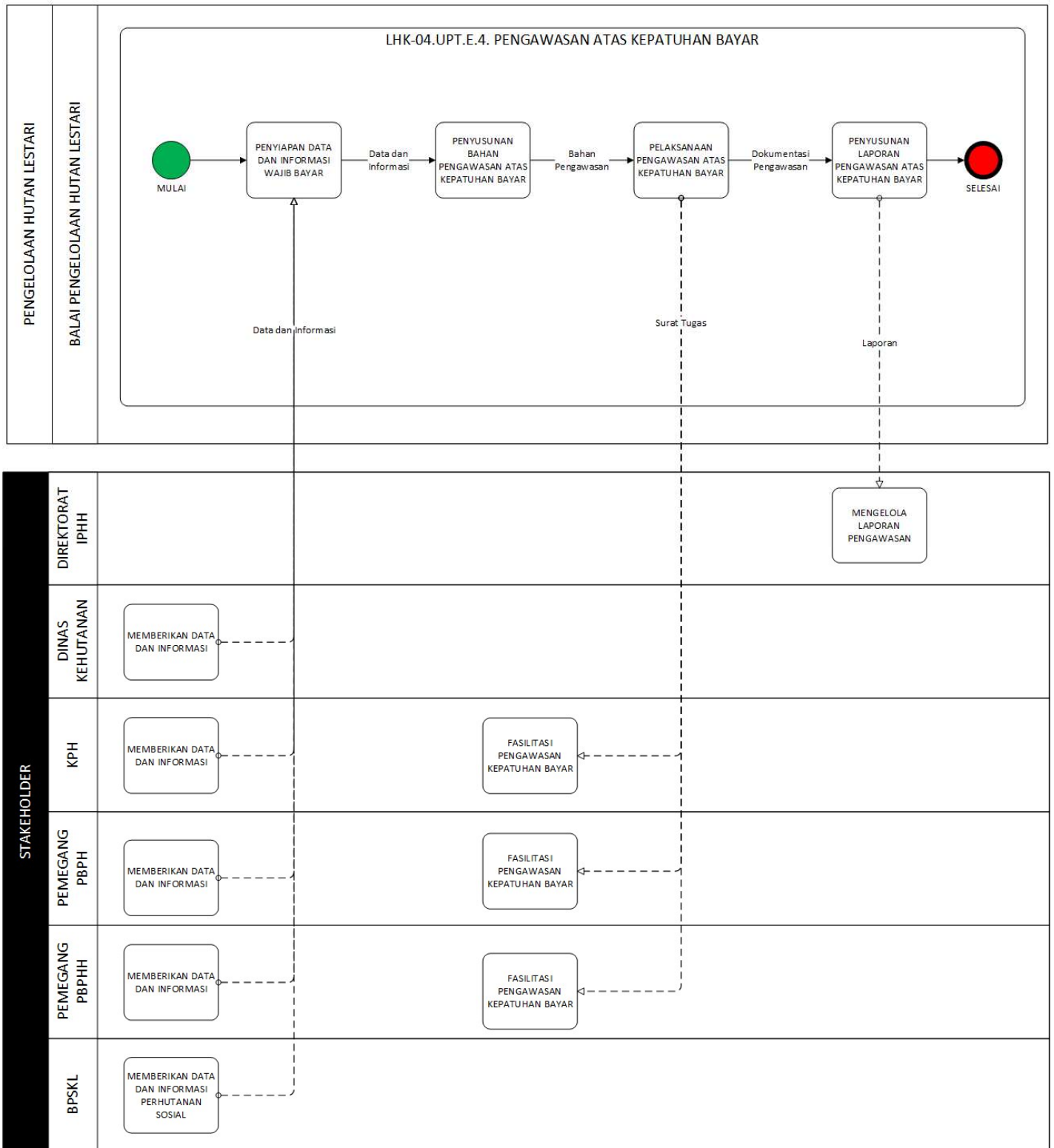
7.5.3 LHK-04.UPT.E.3. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.E.3. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN



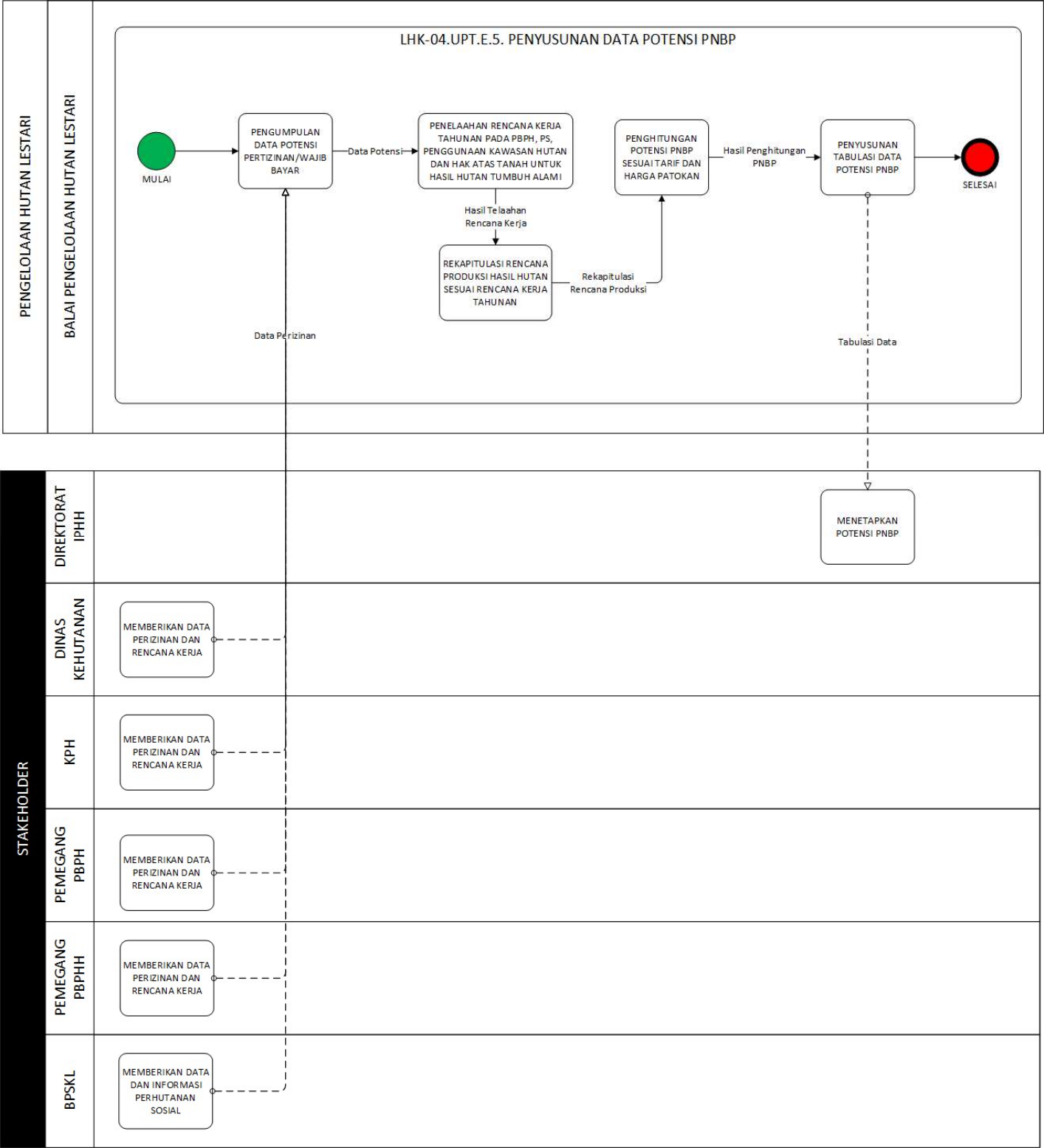
7.5.4 LHK-04.UPT.E.4. PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN BAYAR

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.E.4. PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN BAYAR



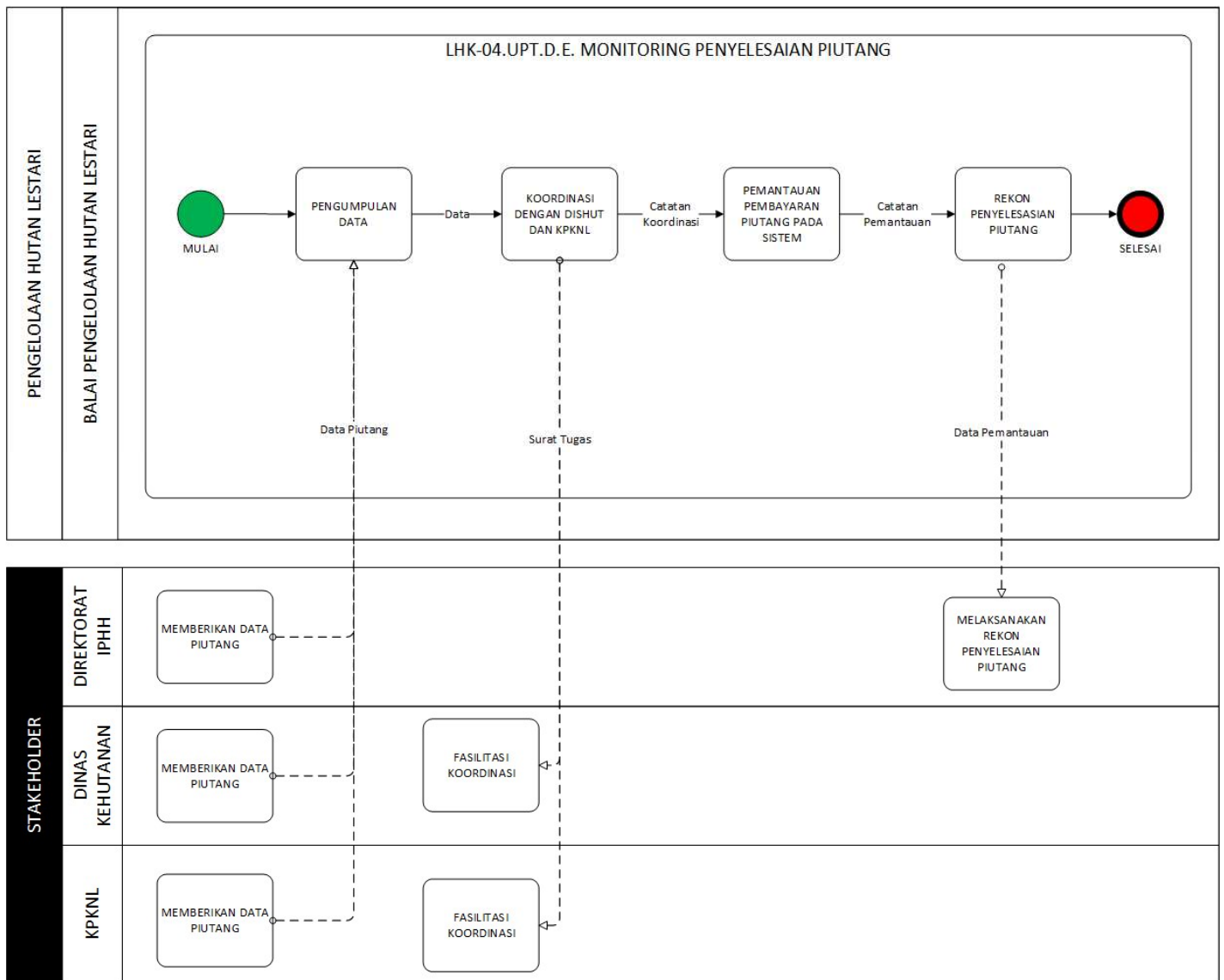
7.5.5 LHK-04.UPT.E.5. PENYUSUNAN DATA POTENSI PNB

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.E.5. PENYUSUNAN DATA POTENSI PNBP



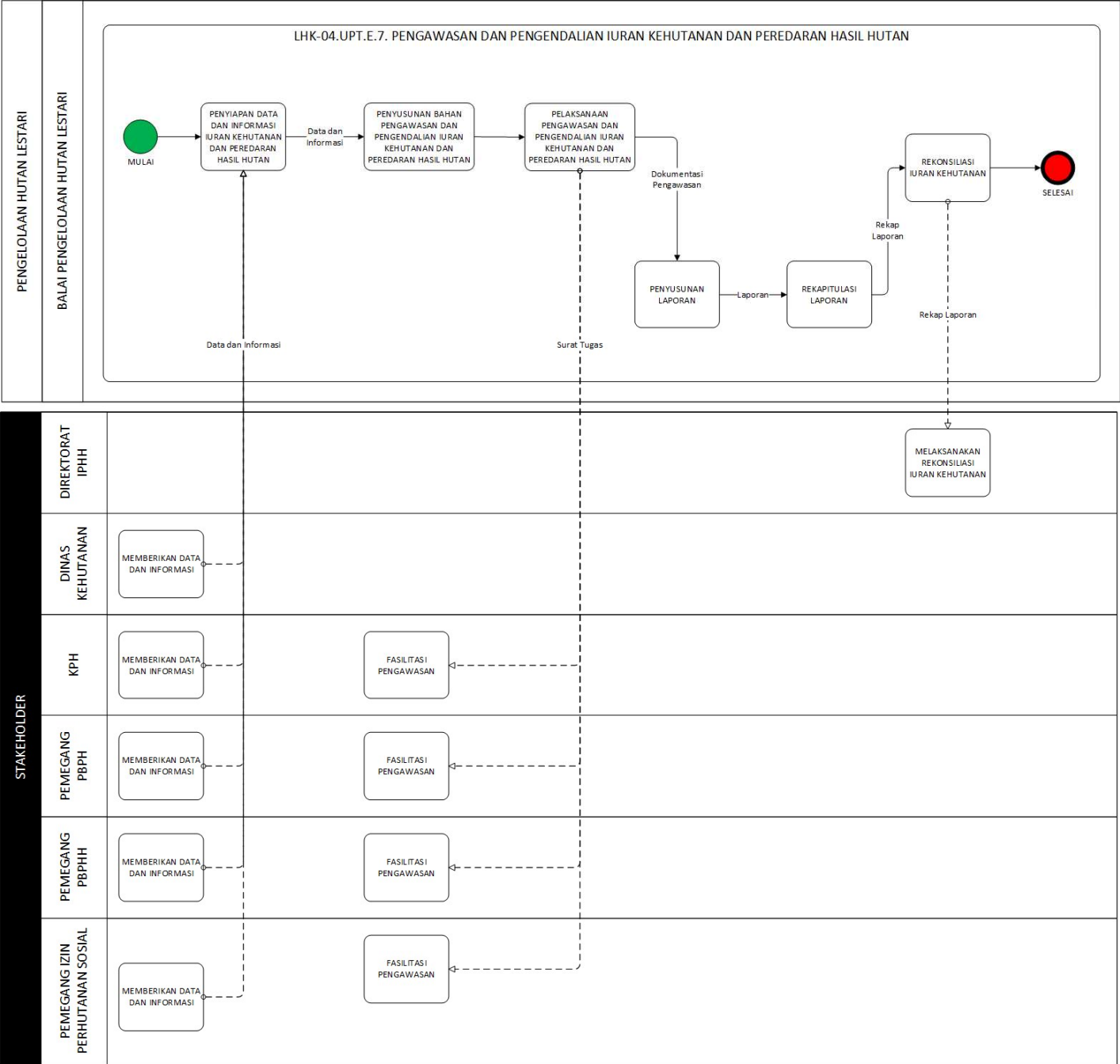
7.5.6 LHK-04.UPT.E.6. MONITORING PENYELESAIAN PIUTANG

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.D.E. MONITORING PENYELESAIAN PIUTANG



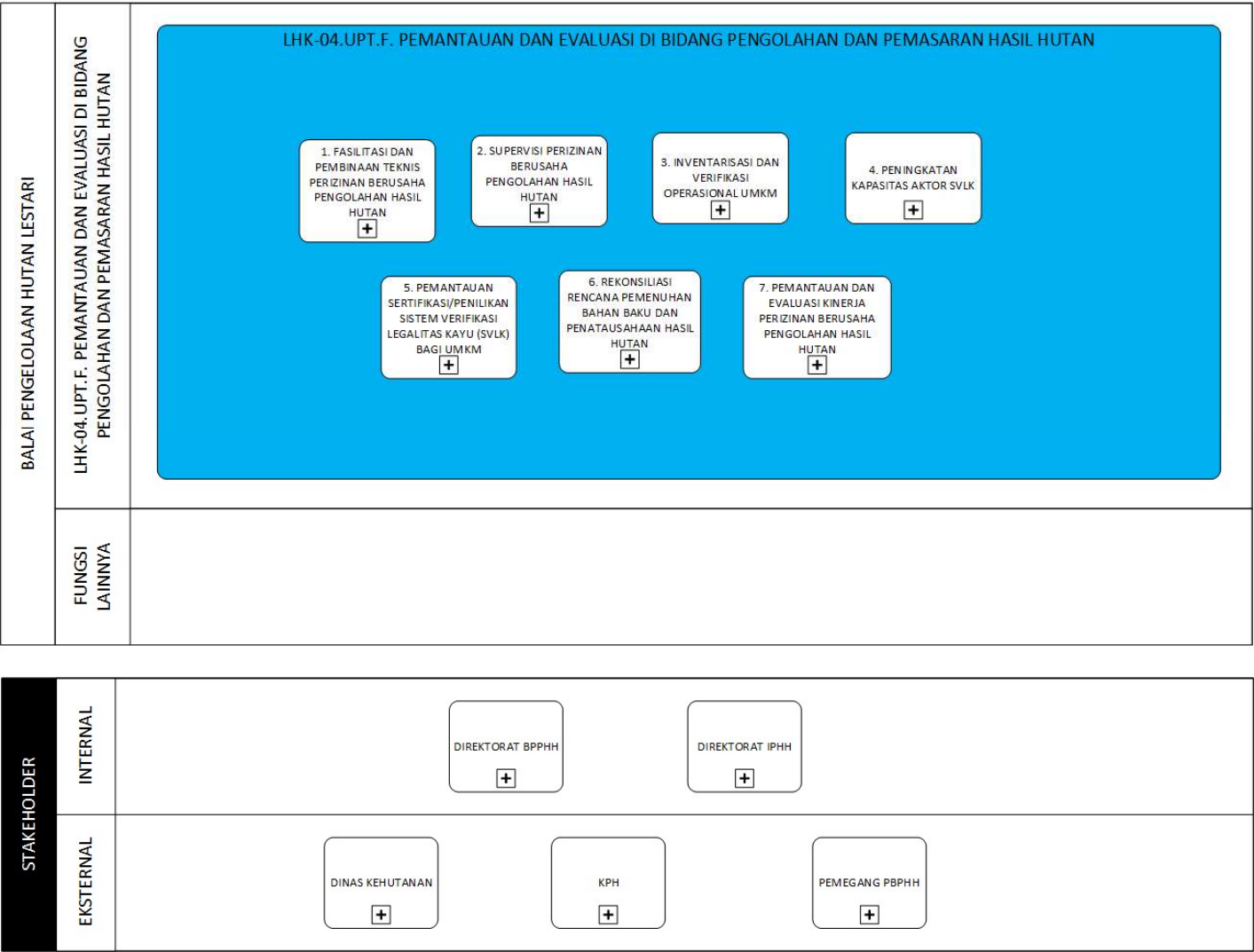
7.5.7 LHK-04.UPT.E.7. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IURAN KEHUTANAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.E.7. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IURAN KEHUTANAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN



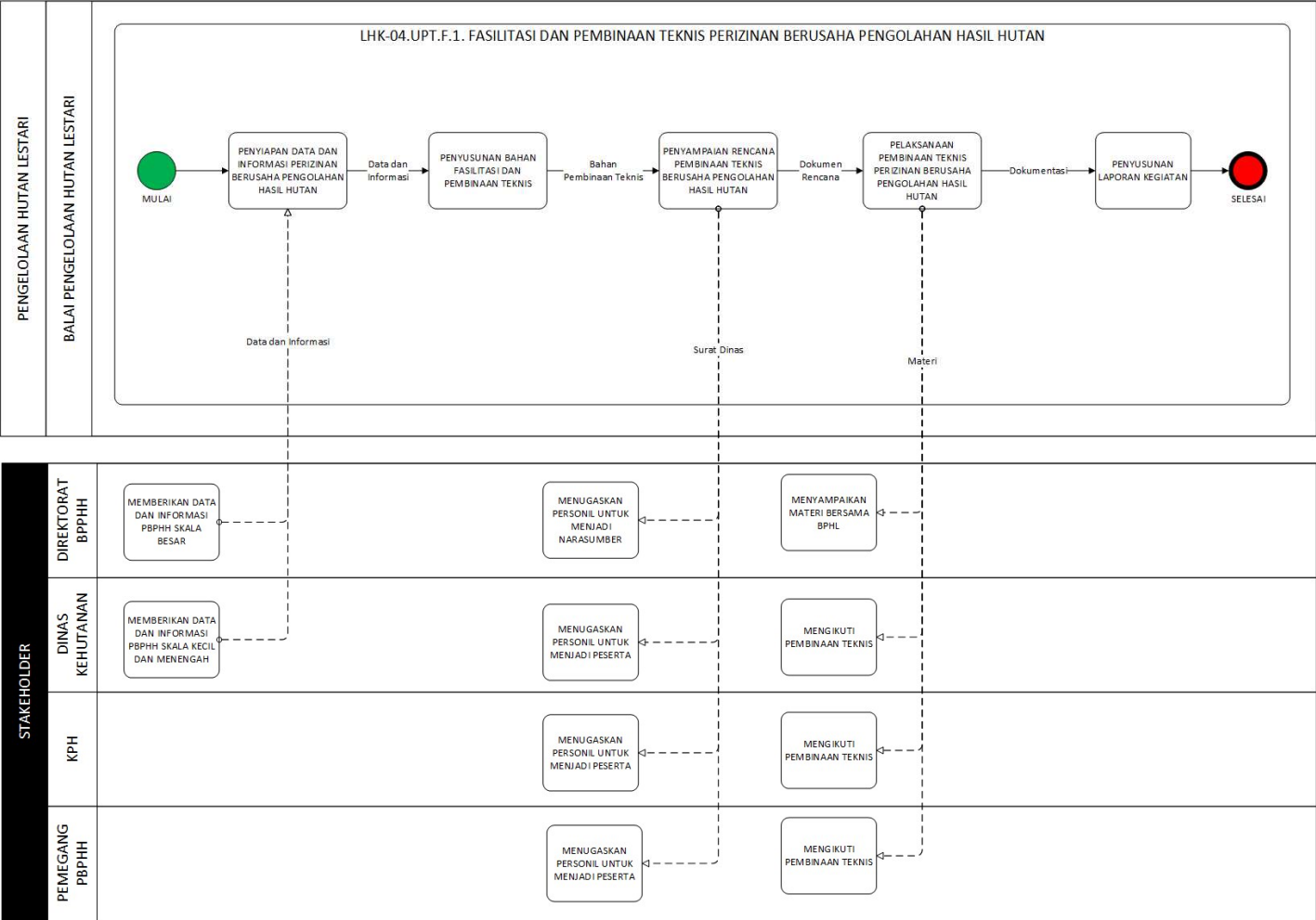
7.6 LHK-04.UPT.F. PEMANTAUAN DAN EVALUASI DI BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 3
LHK-04.UPT.F. PEMANTAUAN DAN EVALUASI DI BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN



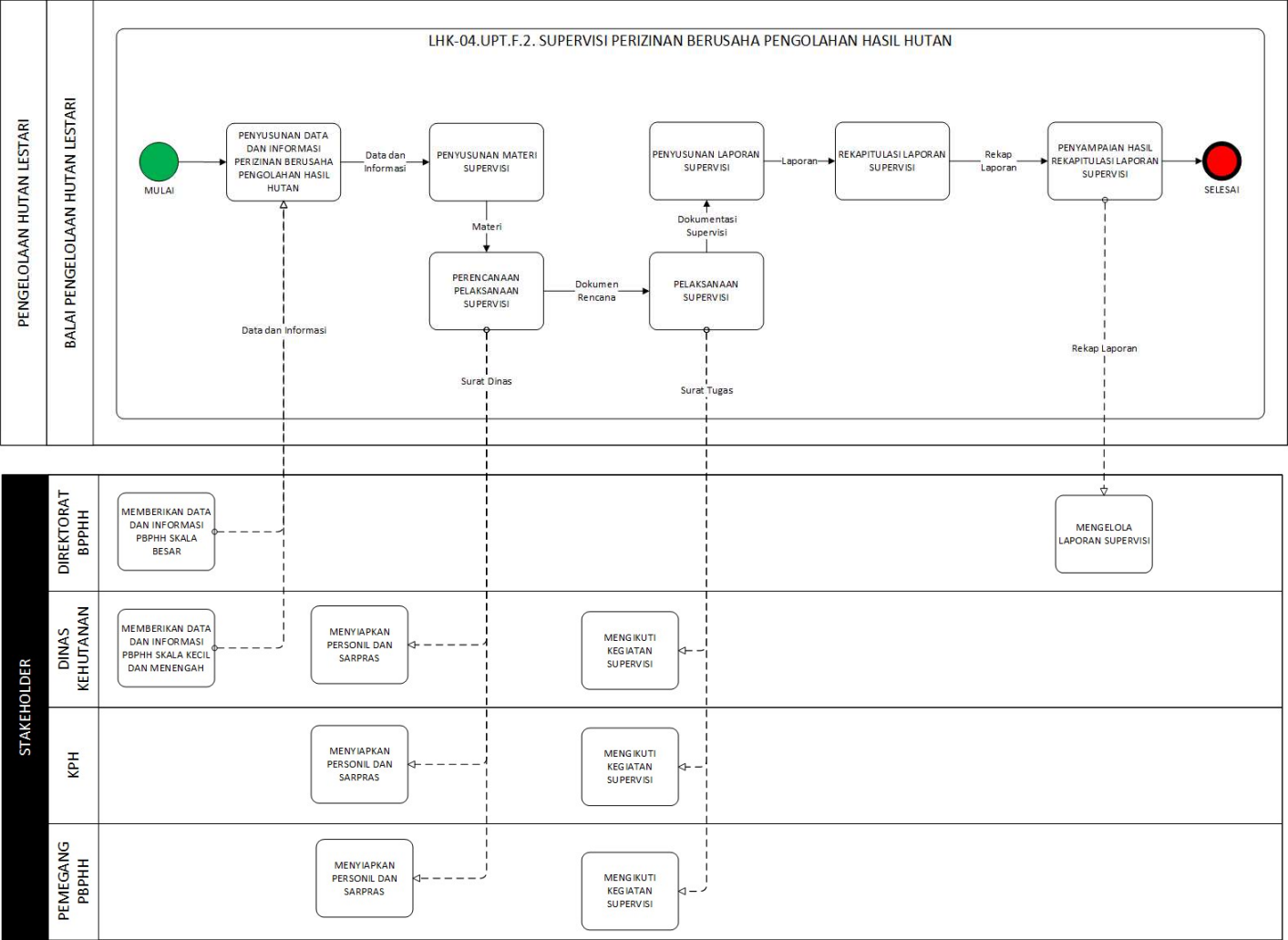
7.6.1 LHK-04.UPT.F.1. FASILITASI DAN PEMBINAAN TEKNIS PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.F.1. FASILITASI DAN PEMBINAAN TEKNIS PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN



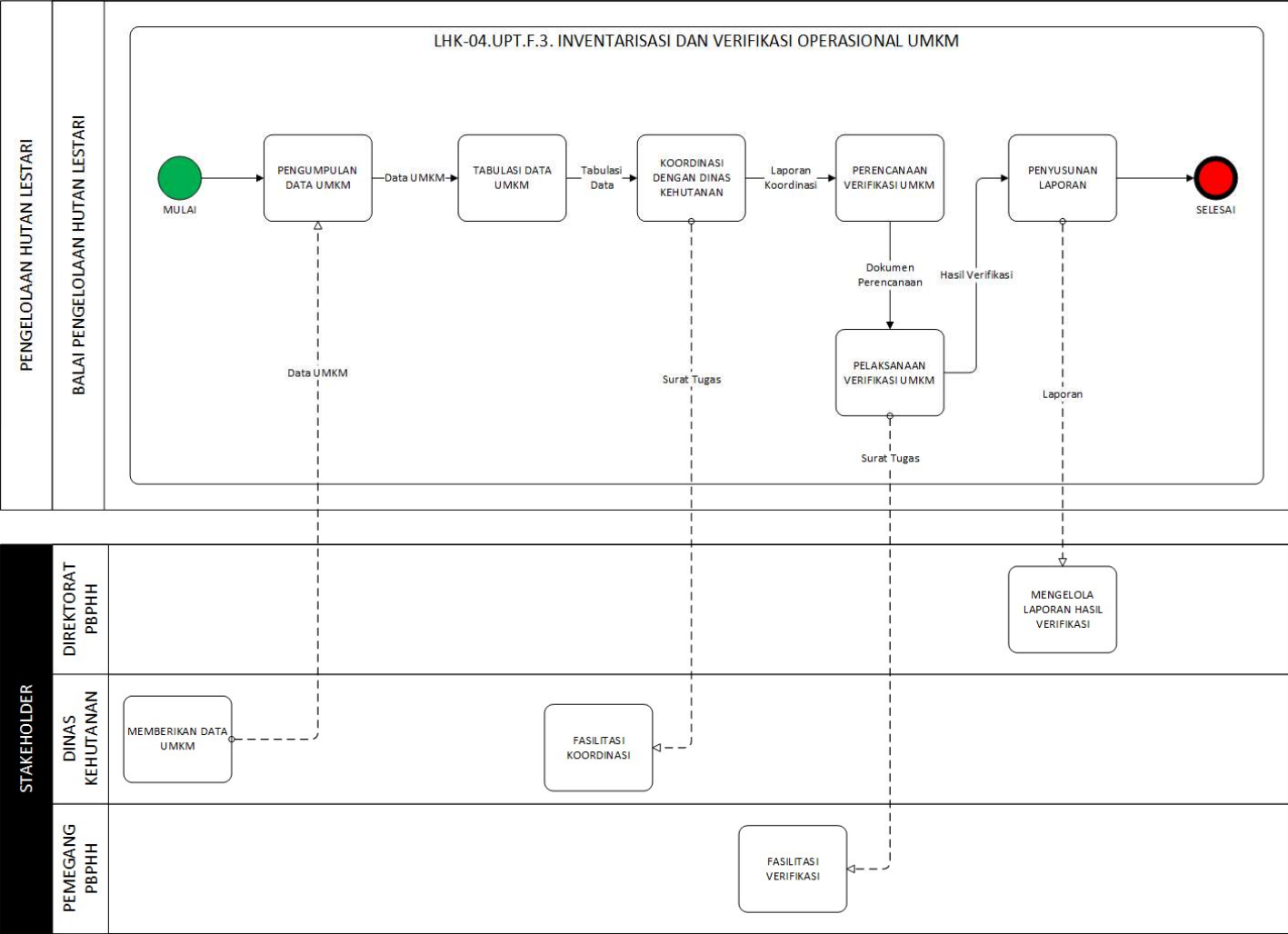
7.6.2 LHK-04.UPT.F.2. SUPERVISI PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.F.2. SUPERVISI PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN



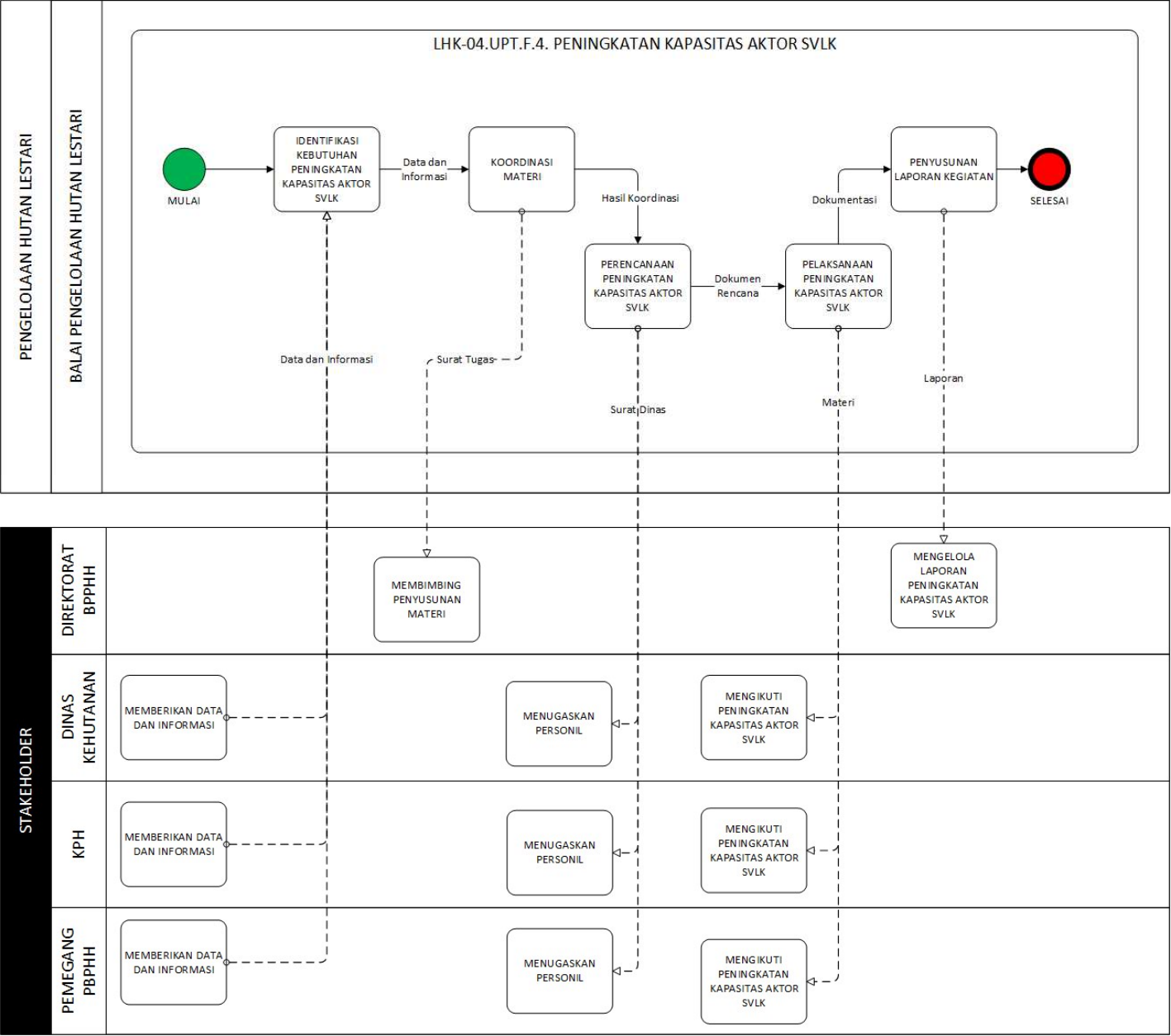
7.6.3 LHK-04.UPT.F.3. INVENTARISASI DAN VERIFIKASI UMKM

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.F.3. INVENTARISASI DAN VERIFIKASI OPERASIONAL UMKM



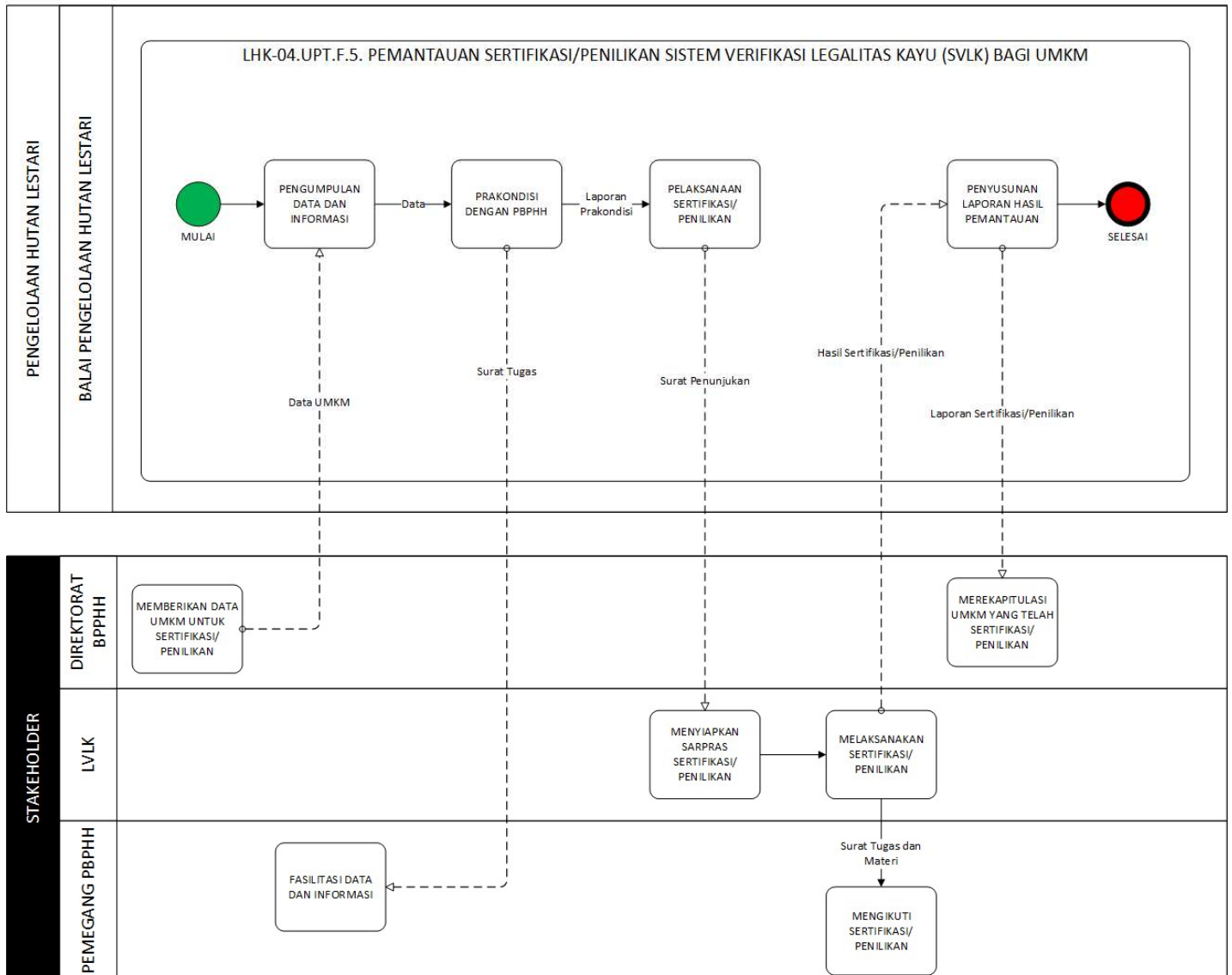
7.6.4 LHK-04.UPT.F.4. PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR SVLK

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.F.4. PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR SVLK



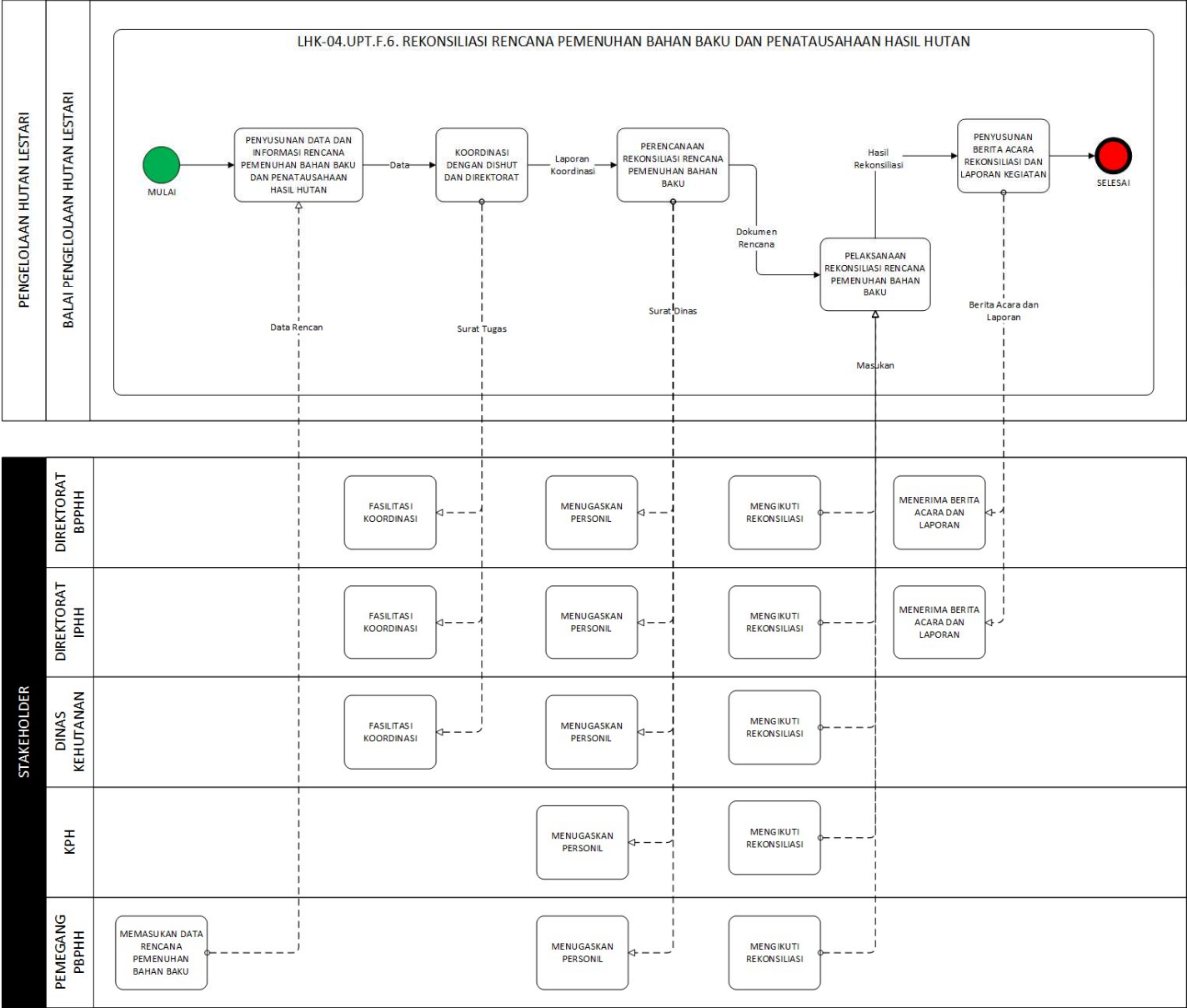
7.6.5 LHK-04.UPT.F.5. PEMANTAUAN SERTTIFIKASI/PENILIKAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) BAGI UMKM

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.F.5. PEMANTAUAN SERTTIFIKASI/PENILIKAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) BAGI UMKM



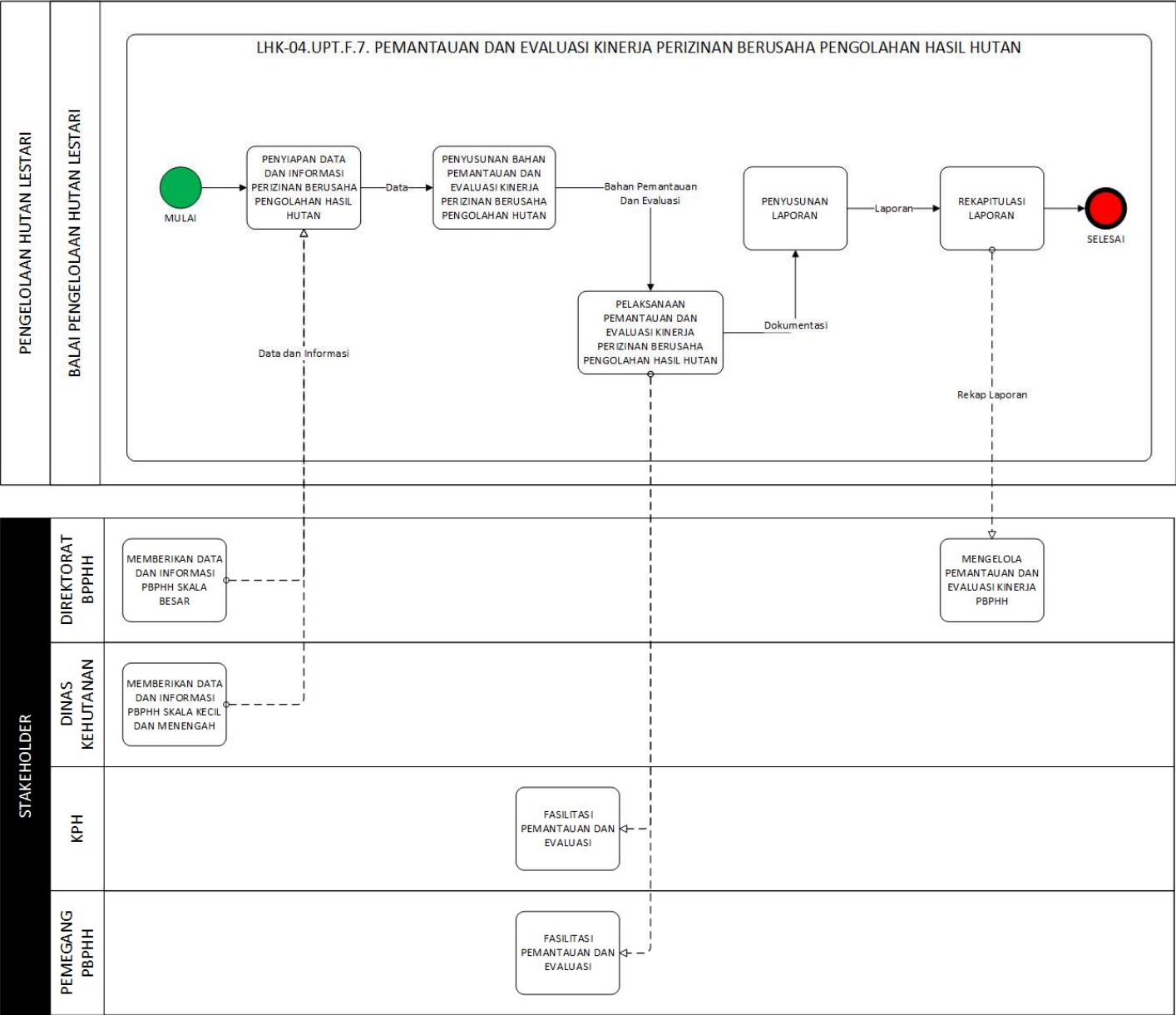
7.6.6 LHK-04.UPT.F.6. REKONSILIASI RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.F.6. REKONSILIASI RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN



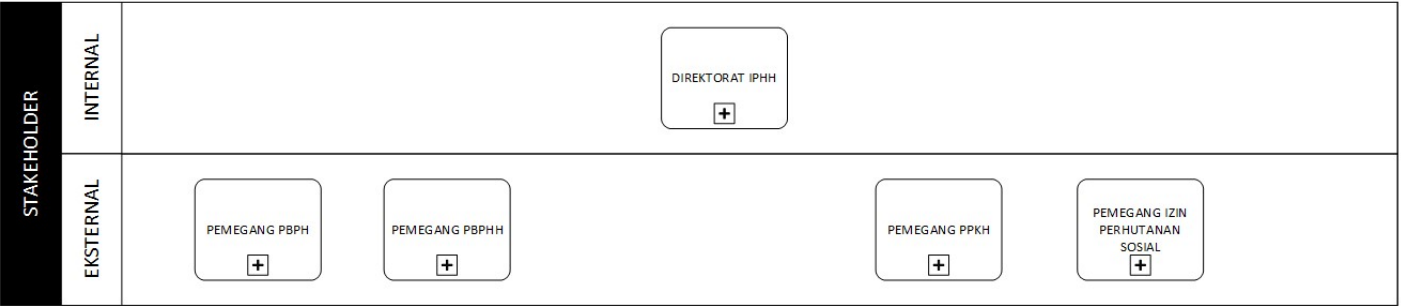
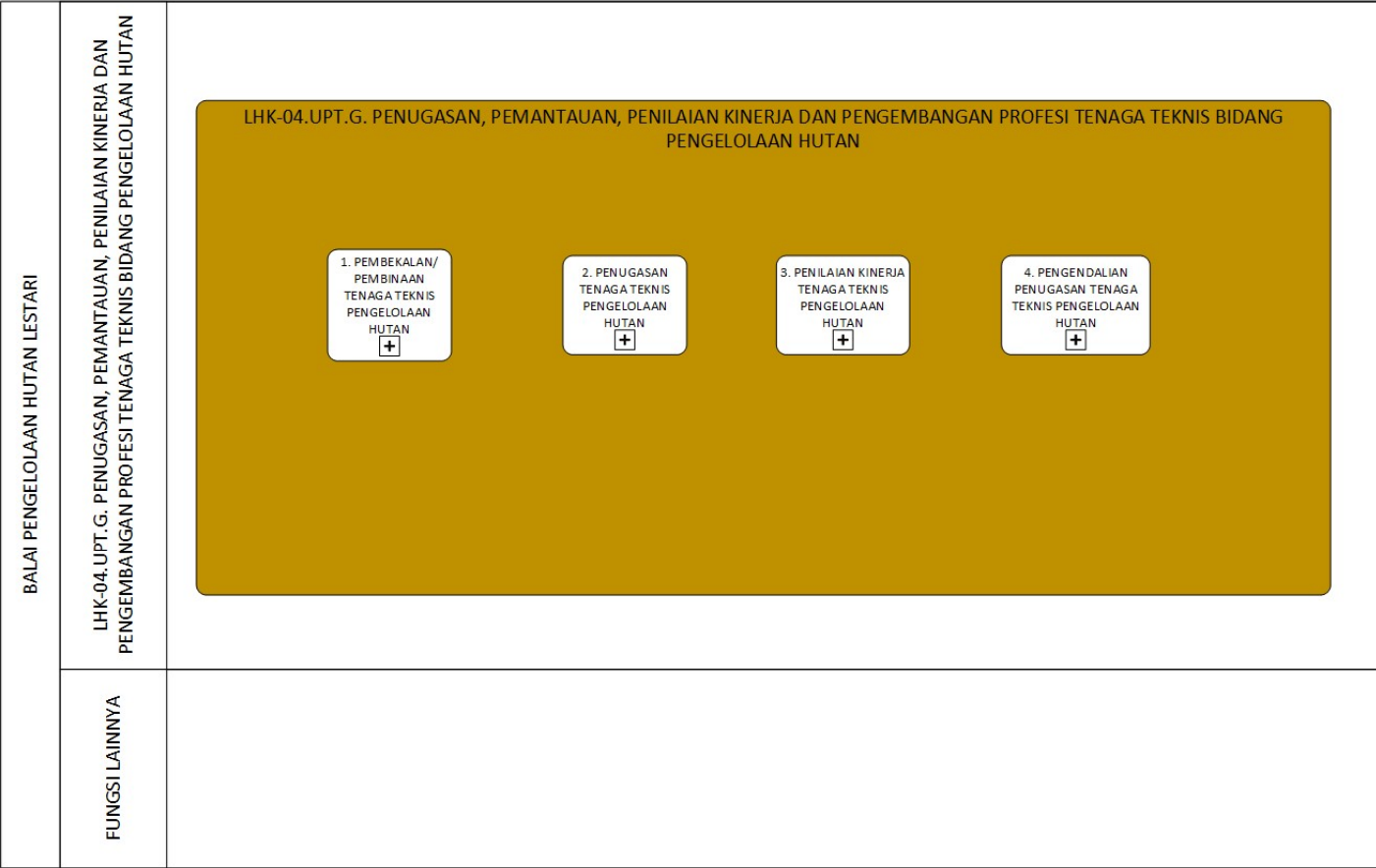
7.6.7 LHK-04.UPT.F.7. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.F.7. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN



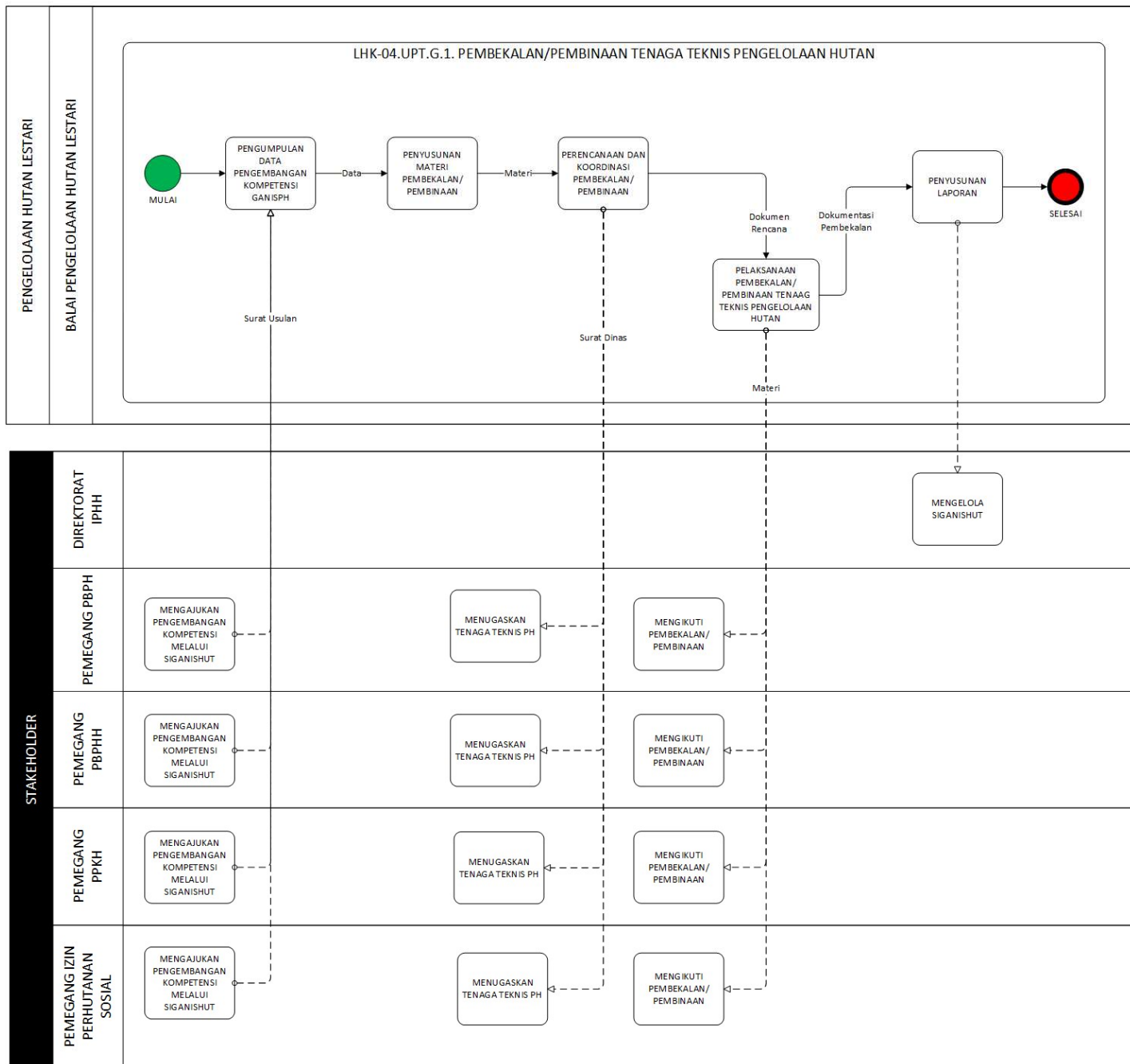
7.7 LHK-04.UPT.G. PENUGASAN, PEMANTAUAN, PENILAIAN KINERJA DAN PENGEMBANGAN PROFESI TENAGA TEKNIK BIDANG PENGELOLAAN HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 3
LHK-04.UPT.G. PENUGASAN, PEMANTAUAN, PENILAIAN KINERJA DAN PENGEMBANGAN PROFESI TENAGA TEKNIK BIDANG PENGELOLAAN HUTAN



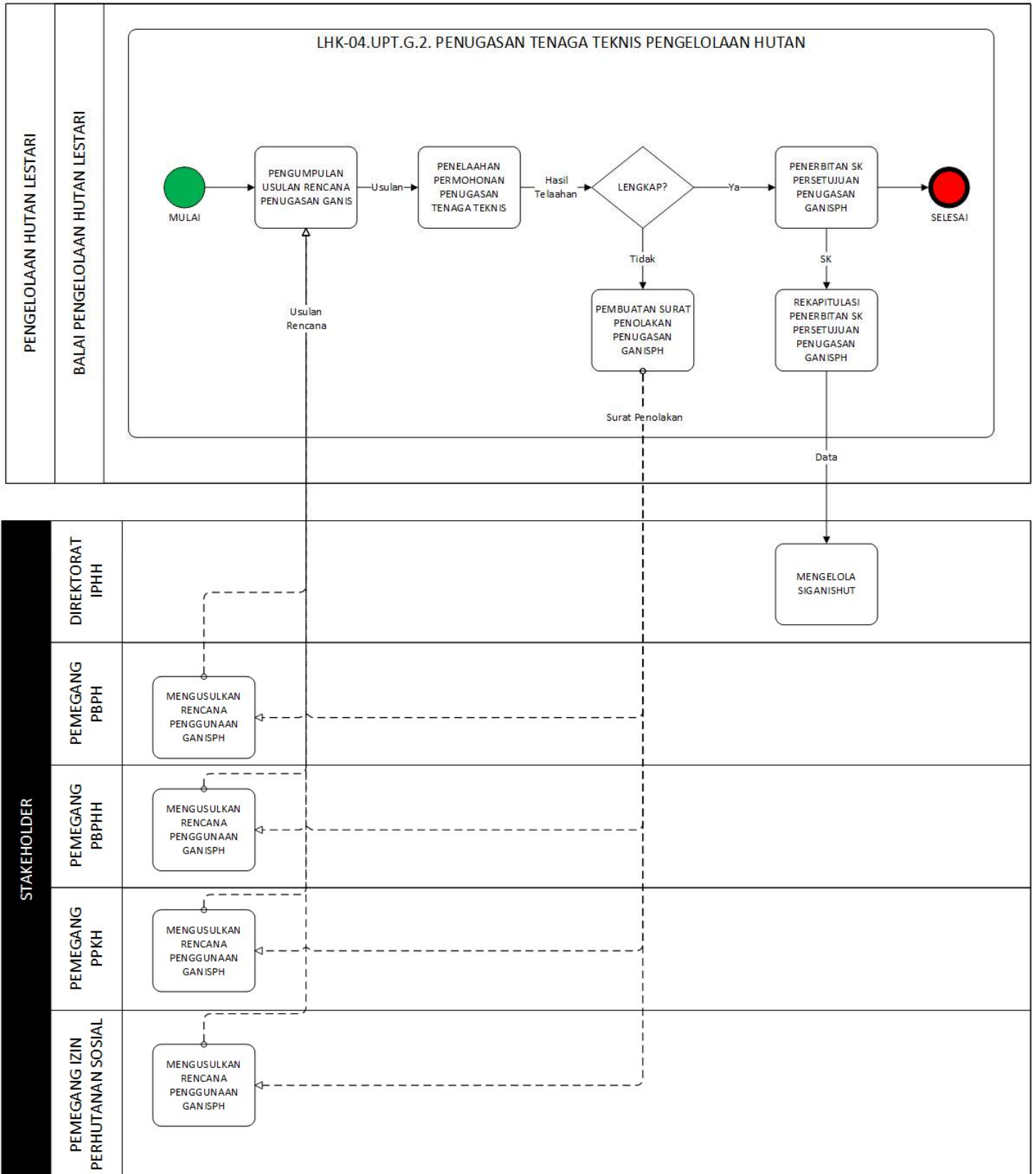
7.7.1 LHK-04.UPT.G.1. PEMBEKALAN/PEMBINAAN TEKNIS TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 4 LHK-04.UPT.G.1. PEMBEKALAN/PEMBINAAN TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN



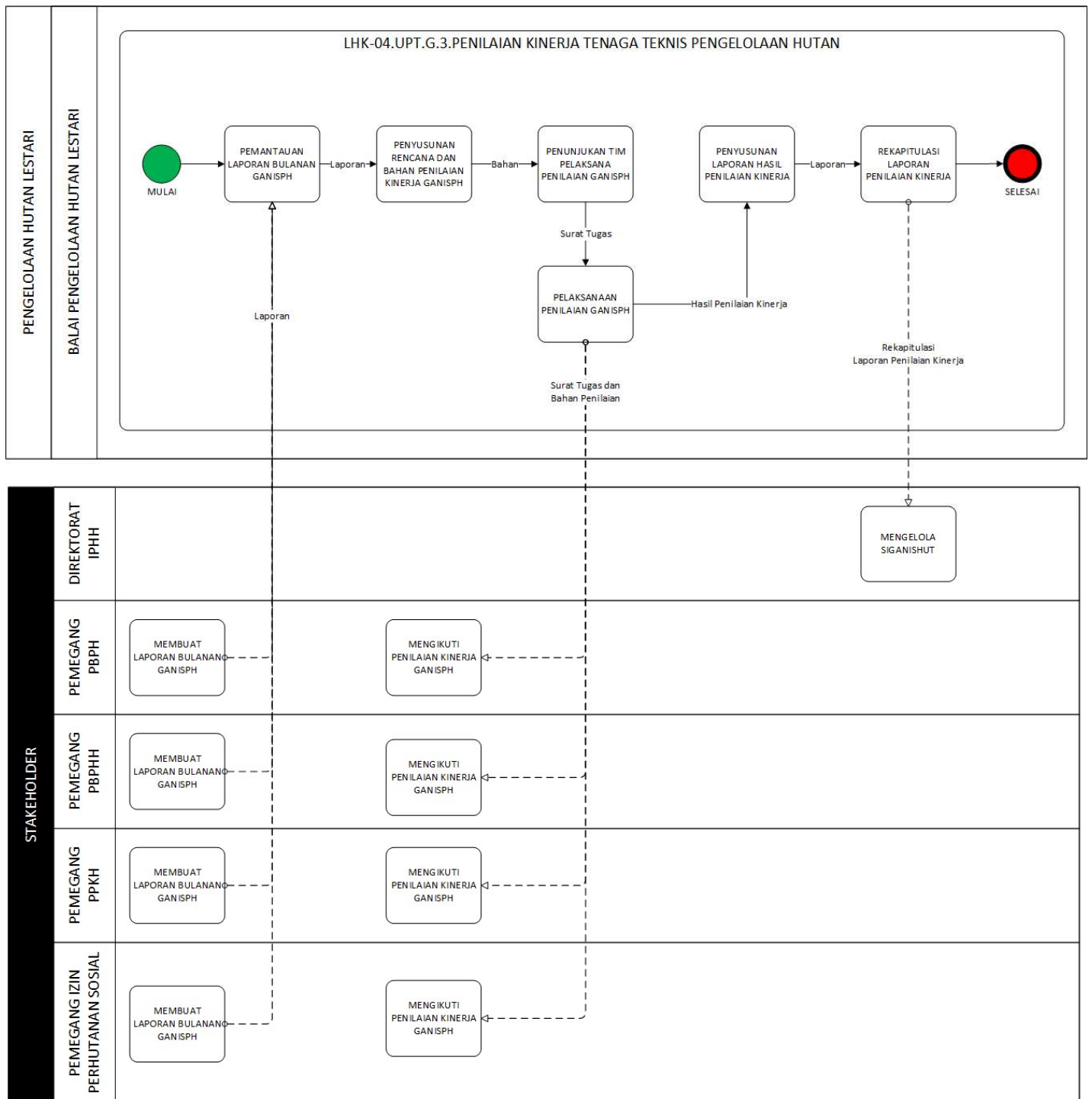
7.7.2 LHK-04.UPT.G.2. PENUGASAN TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.G.2. PENUGASAN TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN



7.7.3 LHK-04.UPT.G.3. PENILAIAN KINERJA TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 4 LHK-04.UPT.G.3.PENILAIAN KINERJA TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN



7.7.4 LHK-04.UPT.G.4. PENGENDALIAN PENUGASAN TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN

PROSES BISNIS LEVEL 4
LHK-04.UPT.G.4. PENGENDALIAN PENUGASAN TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN

